



**“KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BREBES
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BREBES TAHUN 2017”**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

Nama : RAHMATUN NAZILAH

NPM : 2115500043

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmatun Nazilah

NPM : 2115500043

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul **KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BREBES DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2017** adalah benar - benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan penuh kesadaran.

Tegal, 23 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Rahmatun Nazilah
NPM. 2115500043



**“KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BREBES
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BREBES TAHUN 2017”**


Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Tegal, 23 Januari 2020

Telah disetujui oleh,


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Drs. Sana Prabowo, M.Si
NIP. 195612251983121001


Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si
NIPY. 16952681974

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si
NIPY. 16952681974



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
Jl. Halmahera KM. 1 Tegal Telp (0283) 323290

PENGESAHAN

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BREBES DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2017

Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada hari : Kamis
Tanggal : 23 Januari 2020

1. Ketua Dewan Penguji : Drs, Sana Prabowo, M.Si
NIP. 195612251983121001
2. Sekretaris Dewan Penguji : Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si
NIPY. 16952681974
3. Anggota Dewan Penguji : Unggul Sugiharto, S.IP., M.Si
NIPY. 14251921973

()
()
()

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


FISIP
Dr. Nurdin, SH., MH
NIPY. 9351091960

MOTTO

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”.

Ketika menghadapi suatu ujian, tak perlu bersedih hati, kebahagiaan dan kesedihan kadang datang silih berganti tergantung bagaimana kita menghadapinya dan mengambil pelajaran darinya. Kembalikan segalanya pada sang pencipta bahwa segala yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik dari Nya.

(QS At Taubah : 40)

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan : sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada Nya lah kita kembali”. Sabar bukan hal yang mustahil untuk dimiliki semua mukmin, ketika ditimpa suatu ujian kadang kita menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan takdir. Ingatlah bahwa segala ujian pasti ada hikmah di dalamnya.

(QS Al Baqarah : 155 – 156)

PERSEMBAHAN

Skripsi yang telah selesai ini sangatlah tentu mengalami suka dan cita dalam proses penyelesaiannya, maka saya mempersembahkan hasil perjuangan saya ini untuk :

1. Allah SWT sebagai rasa syukur atas kekuasaan, perlindungan dan ridhonya sehingga saya senantiyasa diberikan kesehatan jasmani dan umur yang panjang dari awal kuliah sampai akhir penyusunan skripsi ini.
2. Kedua Orangtua dan keluarga tercinta, yang telah mendukung tersusunnya skripsi ini.
3. Kepada sahabatku yang saya sayangi dan saya banggakan yang sudah mendukung dan memotivasiku Nurlita Fitri Fatmawati, S.IP, Nandyta Dewi Aprilya, S.IP, Ani Zaematul Umamah, S.IP, Aulia Maulida Rohmah, A.Md, Azhariyah Khaerunnisa, S.E, Pipit Adhe Saptalia, Maslikha, dan teman-teman seperjuangan FPMM.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Nazilah, Rahmatun. NPM 2115500043. 2020. *Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017*. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Drs. Sana Prabowo, M.Si dan Pembimbing II : Agus Setio Widodo, S.IP M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dalam setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mendiskripsikan secara jelas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja menurut dari Prof. Dr. Wibowo, S.E., Phil (Manajemen Kinerja 2007:2).

Hasil penelitian menggambarkan bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dalam setiap tahapannya berjalan kurang maksimal karena masih ada beberapa kendala yang dialami pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, kendala tersebut yaitu : 1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, 2. Masih banyak data pemilih yang belum ber KTP-Elektrik, 3. Adanya ketidak netralan anggota PPK, 4. kendala faktor alam (banjir), 5. Masih ada kesalahan dalam penulisan from C1-KWK, 6. Jumlah Mesin scenner kurang memadai.

Kata Kunci : Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

ABSTRACT

Nazilah, Rahmatun. NPM 2115500043. 2020. The performance of the General Election Commission (KPU) of the Brebes Regency in the Implementation of the Brebes Regent and Deputy Regent Elections in 2017. Thesis, Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Pancasakti University, Tegal. Advisor I: Drs. Sana Prabowo, M.Sc and Counselor II: Agus Setio Widodo.S.IP M.Sc

This study aims to describe the performance of the General Election Commission (KPU) of the Brebes Regency in the Implementation of the 2017 Brebes Regent and Deputy Regent Elections in each 2017 Stages of the Brebes Regent and Deputy Regent Election in 2017.

This type of research is a qualitative descriptive study, the type of research that seeks to clearly describe the performance of the General Election Commission (KPU) of the Brebes Regency in the Implementation of the Election of Brebes Regent and Deputy Regent in 2017. The theory used in this study is the theory of performance according to Prof. Dr. Wibowo, S.E., Phil (Performance Management 2007: 2).

The results of the study illustrate that the performance of the General Election Commission (KPU) of the Brebes Regency in the Implementation of the 2017 Brebes Regent and Deputy Regent Election in each stage runs less than the maximum because there are still some obstacles experienced during the 2017 Regent and Deputy Regent Election, these obstacles are : 1. Low level of community participation, 2. There are still a lot of voter data that are not yet KTP-Electric, 3. The existence of neutrality of PPK members, 4. constraints of natural factors (flood), 5. There are still errors in writing from C1-KWK, 6. Inadequate number of scanner machines.

Keywords : Performance of the General Election Commission (KPU), Election of Regent and Deputy Regent.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul : **“Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017”** sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Nuridin, SH. MH, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian.
3. Bapak Drs. Sana Prabowo, M.Si selaku Pembimbing I yang dengan tulus, ikhlas dan sangat sabar memberikan pengarahan serta petunjuk-petunjuk yang sangat diperlukan, sehingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan saran bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dra. Erny Rosyanti M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi, dukungan, perhatian khusus kepada mahasiswa walinya;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah mendukung, membimbing, dan memberikan ilmu dengan sabar selama studi.
7. Kepada Ibu saya tercinta Almarhumah. Hj. Rotun dan Kepada Bapak saya H. Tasbikhin dan untuk keluarga tercinta, yang telah mendukung tersusunnya skripsi ini.
8. Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP, Ketua Bwaslu Kabupaten Brebes Bapak Wakro, S.IP, Jajaran staff pegawai KPU di 4 Divisi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes Bapak Teguh Turmudi dan Bapak Abdullah Syafaat dari Partai PKS. Terimakasih untuk kerjasamanya.
9. Kepada sahabat-sahabatku yang saya sayangi dan saya banggakan yang sudah mendukung dan memotivasi Nurlita Fitri Fatmawati, S.IP, Nandyta Dewi Aprilya, S.IP, Ani Zaematul Umamah, S.IP, Aulia Maulida Rohmah, A.Md, Azhariyah Khaerunnisa, S.E, Pipit Adhe Saptalia, Maslikha, dan teman-teman seperjuangan Organisasi

Forum Pemberdayaan Mahasiswa dan Masyarakat (Rani, Cintia, Aji, Nasrullah Mustaqim, Jamil, Udin, Inna, Leni, Iva).

10. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan membantu terselesaikannya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna, untuk itu segala macam saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penulisan skripsi ini.

Tegal, 23 Januari 2020

Ttd,

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Pernyataan Penulis	ii
Lembar Persetujuan Skripsi.....	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Motto.....	v
Persembahan.....	vi
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Diagram.....	xvi
Daftar Skema	xvii
Daftar Lampiran	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	8
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1 Kerangka Teori	12
II.1.1 Kinerja	13
II.1.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)	25
II.1.3 Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)	32
II.1.4 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.....	37
II.2 Penelitian Terdahulu.....	51
II.3 Definisi Konsep.....	55
II.4 Pokok Penelitian	56
II.5 Alur Pikir.....	57

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	60
III.2 Jenis dan Sumber Data	62
III.3 Macam Jenis Data dan Sumber Data.....	63
III.4 Obyek Penelitian.....	64
III.5 Informan Penelitian.....	65
III.6 Teknik Pengumpulan Data	66
III.7 Teknik Analisis Data.....	68
III.8 Sistematika Penulisan	70

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.1 Deskripsi Kabupaten Brebes	72
IV.2 Deskripsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes.....	87

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Hasil Penelitian	110
V.2 Pembahasan atas Hasil Penelitian.....	184

BAB VI PENUTUP

VI.2. Kesimpulan	214
VI.3. Saran	219

DAFTAR PUSTAKA	221
----------------------	-----

LAMPIRAN	231
----------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Kepadatan Penduduk	
	Setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes	77
Tabel IV.2	Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok	
	Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Brebes	78
Tabel IV.3	Jumlah Sarana Pendidikan Formal Menurut Jenis Sekolah	
	di Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2016/2017	84
Tabel IV.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan	
	di Kabupaten Brebes Tahun 2016/2017.....	85
Tabel IV.5	Jumlah Tempat Ibadah dan Prasarana Agama	
	di Kabupaten Brebes Tahun 2016/2017.....	86
Tabel IV.6	Daftar Rincian Jabatan Komisi Pemilihan Umum	
	Kabupaten Brebes Tahun 2017/2018.....	91
Tabel IV.7	Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum	
	Kabupaten Brebes.....	96
Tabel IV.8	Sarana dan Prasarana Komisioner Penunjang Kinerja	
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.....	97
Tabel IV.9	Sarana dan Prasarana Sekretariat	
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.....	102
Tabel IV.10	Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum	
	Selama 5 Tahun (2015-2019).....	105
Tabel V.1	Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Tahapan	
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Siklus Urutan Manajemen Kinerja.....	22
Gambar IV.1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes.....	74
Gambar V.1 Keterangan Rincian Pengembalian Formulir C6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.....	142

DAFTAR DIAGRAM

Diagram V.1 Jumlah Partisipasi Memilih Pemilihan	
Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.....	131

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1	Alur Pikir	58
Bagan IV.1	Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes	90
Bagan IV.2	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2016/2017	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara.....	224
Lampiran 2 SK Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 083/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 Tentang Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Larangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.....	231
Lampiran 3 Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 Kabupaten Brebes.....	238
Lampiran 4 Dokumentasi Tingkat Partisipasi Pemilih dari Beberapa Periode.....	239
Lampiran 5 Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.....	239
Lampiran 6 Foto Dokumentasi Wawancara.....	242
Lampiran 3 Surat Ijin Riset.....	246

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam landasan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi negara berada ditangan rakyat.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* dan *kratein*, *demos* berarti rakyat, sedangkan *kratein* berarti pemerintah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan wujud dari kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asal Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil.

Keberadaan Pemilihan Umum sebagai proses politik harus didukung oleh jajaran penyelenggara dan pelaksana yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), salah satu penyelenggara setelah orde reformasi adalah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai 5 divisi

yaitu, berdasarkan dasar : surat edaran KPU RI NOMOR : 420/KPU/VIII/TAHUN 2016 yang meliputi 1) divisi hukum, 2) divisi umum, keuangan dan logistik 3) divisi teknis 4) divisi perencanaan program dan data. 5) divisi SDM dan partisipasi masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen yang bertugas ditingkat pusat dan daerah (KPUD). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan juga dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 membahas tentang Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota.

Pengertian pemilu sendiri merupakan proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari tingkat nasional, daerah, sampai tingkat desa. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada pemilu di tingkat Daerah atau yang sering disebut Pemilukada atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Agar dapat terwujud pemilu yang sesuai dengan harapan yaitu sesuai dengan asas pemilu, maka diperlukannya peran serta kinerja dari semua lembaga penyelenggara pemilu. Dalam hal ini peran dan kinerja dari lembaga penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum. Kinerja dari Komisi Pemilihan Umum sangat penting dalam suatu Pemilihan Umum di tingkat Nasional maupun Daerah. Kinerja Komisi Pemilihan Umum dapat diukur dari enam aspek. Keenam aspek itu adalah kemandirian penyelenggara pemilu, profesionalitas, keadilan dan imparialitas, kepastian hukum, inklusifitas dan aksesibilitas, keterbukaan dan partisipasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan juga berdasarkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 014/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2017. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu :

I. Tahap Persiapan	II. Tahap Penyelenggaraan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Program dan Anggaran. 2. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis. 3. Pembentukan PPK, PPS, KPPS. 4. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencalonan 2. Kampanye 3. Laporan Dana Kampanye 4. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 5. Pemungutan dan Penghitungan 6. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) hanya dapat terwujud apabila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat Pemilu yang berkualitas. Berbeda pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebelumnya, saat itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) beranggotakan para fungsionaris peserta pemilihan umum yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena publik melihat begitu banyaknya unsur kepentingan yang mewarnai setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menghadapi situasi rumit yang tidak dapat terselesaikan.

Dalam garis hubungan antara pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di bawahnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan pelaksanaan pemerintahan hal ini dapat dilihat dari terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Pemilukada dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes merupakan Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, non partisan, tidak memihak, transparan, dan profesional berdasarkan azas-azas pemilu demokratik dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes adalah salah satu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di wilayah Jawa Tengah yang mendapatkan kewenangan sebagai penyelenggara pemilu di daerah khususnya Kabupaten Brebes yang memiliki peran sentral terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes selaku pemegang kekuasaan tersebut telah menyiapkan diri dengan persiapan yang matang agar proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Brebes berjalan sesuai rencana. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes juga

masih memiliki beberapa masalah yang terjadi di lapangan membuat menghambatnya kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri.

Mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes, yang dilihat dari 2 (dua) tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ada temuan permasalahan yang terjadi, diantaranya :

Seperti yang diberitakan dalam surat kabar online RADARTEGAL.COM dipublikasikan pada hari Senin, 20 Februari 2017 (<https://radartegal.com/berita-lokal/pimen-kiye-golput-saat-coblosan-pilkada-brebes.13872.html>), mengatakan bahwa adanya permasalahan terkait dengan partisipasi pemilih saat pencoblosan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya cukup memprihatinkan. Dari jumlah 1.522.560 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya sekitar 55,4 persen yang ternyata menggunakan hak pilihnya. Dari total 1.519.854 pemilih, berdasarkan entry data C1 hingga 20 Februari, tercatat hanya 842.246 pemilih yang menggunakan hak suaranya itu. Masing-masing rinciannya, yakni 356.612 pemilih laki-laki dan 473.193 perempuan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes Muamar Riza Pahlevi mengatakan, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada tak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Partisipasi pemilih sebanyak 55,4 persen dari DPT.

Ternyata dalam tahapan Persiapan yaitu dalam kegiatan sosialisasi tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sangat memprihatinkan/rendah. Masalah tersebut disebabkan karena tingginya tingkat mobilitas masyarakat Brebes yang merantau ke luar daerah dan faktor alam yang kurang mendukung.

Selain itu dalam tahapan penyelenggaraan di kegiatan kampanye ada temuan kasus/permasalahan sebagai berikut :

berdasarkan surat kabar online TRIBUNJATENG.COM dipublikasikan pada hari Kamis, 23 Februari 2017 (<http://jateng.tribunnews.com/2017/02/23/ada-tujuh-kasus-pelanggaran-pilkada-yang-ditangani-panwaslu-brebes-baru-satu-kasus-yang-terbukti?page=2>), mengatakan bahwa Ada laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan unsur pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Brebes 2017. Yakni ditemukannya kasus ketidaknetralan salah satu oknum anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Satu anggota PPK itu dianggap tidak netral karena menuliskan status di Facebook yang berisi dukungan terhadap salah satu pasangan calon.

Berbicara mengenai penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Brebes. Melihat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas,

Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) hanya dapat terwujud apabila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, non partisan, tidak memihak, transparan, dan professional berdasarkan azas-azas pemilu demokratik dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Namun demikian dalam proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes belum maksimal.

Berdasarkan informasi diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di Kabupaten Brebes. Untuk meneliti lebih dalam maka peneliti mengambil judul : “Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017”.

I.2 Rumusan Masalah

Pemilukada secara langsung merupakan desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Hanya saja, desain semacam ini pada kenyataannya belum mencapai sasaran

secara maksimal. Perangkat prosedur yang mengatur pelaksanaannya tidak saja disusun dalam suasana ketimpangan, melainkan juga belum mampu memberi ruang yang cukup bagi berjalannya proses pemilihan kepala daerah secara demokratis.

Sementara itu, berlangsung secara demokratis atau tidaknya proses pemilukada tidak lepas dari penyelenggara dan proses penyelenggaraannya. Kekhawatiran bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menjadi arena tarik menarik kepentingan politik memang tidak berlebihan meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD. Munculnya berbagai permasalahan Pemilukada yang terjadi di Kabupaten Brebes selama penyelenggaraannya juga tentu tidak lepas dari kelalaian kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes.

Berangkat dari fenomena di atas, maka dapat dirumuskan masalah untuk dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017?
2. Apakah Kendala dan Solusi dari Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.
2. Untuk Mengetahui Kendala dan Solusi dari Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut adalah :

➤ **Manfaat Praktis :**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Brebes, Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dibidang politik.
2. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes, sebagai bahan masukan untuk pihak instansi terkait mengenai tugas dan kinerjanya. Dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang menjadi obyek penelitian agar dapat melakukan perbaikan kinerja

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes dan terselenggarakannya pemilu yang jujur dan adil.

3. Bagi Masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan dan dapat mengetahui sejauh mana kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sistesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta pendapat yang berhubungan dengan penelitian.

II.1. Kerangka Teori

Kerangka teori dibutuhkan untuk memahami dan menguraikan permasalahan secara sistematis sehingga dapat dirumuskan dan dijelaskan suatu gejala keadaan sosial dalam suatu hubungan antar konsep (variabel-variabel) tertentu yang saling memiliki hubungan atau keterkaitan.

Teori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa, kejadian, asas-asas, hukum-hukum yang umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan serta pendapat cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu (Poerwodarminto, 1976: 1054).

Menurut Kamus Riset, Teori adalah seperangkat gagasan/konsep, definisi-definisi dan proposisi-proposisi yang berhubungan satu sama lain yang menunjukkan fenomena-fenomena yang sistematis dengan

menetapkan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena tersebut.

Menurut Sumanto, teori adalah hubungan beberapa konsep atau suatu kerangka konsep, atau definisi yang memberikan suatu pandangan sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena dengan menentukan hubungan spesifik anatara konsep-konsep tersebut dengan maksud untuk menguraikan, menerangkan, meramalkan, dan atau mengendalikan suatu fenomena.

Berdasarkan dari uraian diatas diketahui bahwa kerangka teori adalah garis besar atau rancangan seperangkat konsep sistematis yang saling berhubungan dan berkaitan erat yang membentuk pandangan tentang suatu masalah yang menjadi pegangan pokok peneliti untuk memprediksi jawaban atau permasalahan penelitian.

II.1.1. Kinerja

Kinerja dalam suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan adanya kinerja yang handal dan profesional dari individu yang bersangkutan.

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu

organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Menurut Bastian (dalam Hessel Nogi 2005:175) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut.

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dari definisi diatas kinerja lebih ditekankan pada tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan (Widodo, 2006:78).

Menurut Mahsun (2006:25) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis planning suatu organisasi.

Menurut Prof. Dr. Wibowo, S.E., Phil (dalam buku Manajemen Kinerja 2007:2) kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang dicapai sesuai dari pekerjaan tersebut. Kinerja bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja saja, tetapi juga bagaimana proses kerja itu berlangsung.

Kinerja dapat dikatakan baik sesuai dengan yang diharapkan, apabila sesuai dengan standar atau ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Artinya kinerja aparatur pemerintah pada umumnya diukur dari kemampuan menegakkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Menurut Henry Simamora (1995:82) kinerja yang baik mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Harus mampu diukur dengan cara yang dipercaya.
2. Harus mampu membedakan individu - individu sesuai dengan kinerjanya.
3. Harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui kinerjanya dinilai.

A. Penilaian Kinerja

Terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan peniaian kinerja yang efektif menurut (Gomes,2003) yaitu :

1. Adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara obyektif dan
2. Adanya obyektifitas dalam proses evaluasi.

Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri, Sondong Siagian (2002) menjelaskan bahwa bagi individu penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen sumber daya manusia.

Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik harus dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara obyektif serta didokumentasikan secara sistematis. Dengan demikian, dalam melakukan penilaian atas prestasi kerja para pegawai harus terdapat interaksi positif dan kontinu antara para pejabat pimpinan dan bagian kepegawaian.

Terdapat beberapa metode dalam mengukur prestasi kerja, sebagaimana diungkapkan oleh Gomes (2003:137-145), yaitu:

1. Metode Tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi kerja dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis.

Yang termasuk kedalam metode tradisional adalah :

- a) *Rating scale*. Metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua dan banyak digunakan, dimana penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk mengukur karakteristik, misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, kematangan, dan kontribusinya terhadap tujuan kerjanya.
- b) *Employee comparison*. Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang pegawai dengan pegawai lainya. Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang pegawai dengan pegawai lainya. Metode ini terdiri dari : (1) *alternation ranking* : yaitu metode penilaian dengan cara mengurutkan peringkat pegawai dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi berdasarkan

kemampuan yang dimilikinya (2) *paired comparison* : yaitu metode penilaian dengan cara seorang pegawai dibandingkan dengan seluruh pegawai lainnya, sehingga terdapat berbagai alternatif keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat digunakan untuk pegawai yang relatif sedikit (3) *porced comparison (grading)* : metode ini sama dengan *paired comparison*, tetapi digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif banyak.

- c) *Check list*. Metode ini hanya memberikan masukan atau informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian personalia
- d) *Freeform essay*. Dengan metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan yang berkenaan dengan orang atau karyawan atau pegawai yang akan dinilainya
- e) *Cristal incindent*. Dengan metode ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahanya sehari-hari yang kemudian dimasukan kedalam buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam ketegori tingkah laku bawahanya. Misalnya mengenai inisiatif, kerjasama dan keselamatan.

2. Metode modern. Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai prestasi kerja. Yang termasuk kedalam metode ini adalah : *asesment centre*, *Management By Objective(MBO=MBS)*, dan *human asset accounting*.

- *Assesment centre*. Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim penilai khusus. Tim penilai khusus ini bisa dari luar, dari dalam, maupun kombinasi dari luar dan dari dalam.
- *Management by obective (MBO=MBS)*. Dalam metode ini pegawai langsung diikutsertakan dalam perumusan dan pemutusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan dalam menentukan sasarnya masing-masing yang ditekankan pada pencapaian sasaran instansi
- *Human asset accounting*. Dalam metode ini faktor pekerja dinilai sebagai individu modal jangka panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan instansi.

Pengukuran kinerja pegawai penting dilakukan oleh instansi pemerintahan baik itu instansi pemerintah pusat sampai ke daerah. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan,

hambatan dan dorongan, atau berbagai faktor sukses bagi kinerja pegawai serta institusi maka terbukalah jalan menuju profesionalisasi, yaitu memperbaiki kesalahan - kesalahan yang dilakukan selama ini. Terdapat berbagai teori mengenai indikator kinerja pegawai. Salah satunya indikator kinerja pegawai menurut *Muhammad* (2009:195) mengemukakan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu :

- a. Pemahaman atas tupoksi, dalam menjalankan tupoksi, bawahan harus terlebih dahulu paham tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengajarkan tugas sesuai apa yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Inovasi, memiliki inovasi yang positif menyampaikan pada atasan serta mendiskusikannya pada rekan kerja tentang pekerjaan.
- c. Keakuratan kerja, dalam menjalankan tugas kecepatan kerja harus diperhatikan dengan menggunakan mengikuti metode kerja yang ada.
- d. Kerjasama, kemampuan dalam bekerjasama dengan rekan kerja lainnya seperti bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain.

B. Aspek-aspek Kinerja

Menurut Miner (Dalam Sudarmanto 2009) mengemukakan empat indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja yaitu :

- a. Kualitas, yaitu: tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan.
- b. Kuantitas, yaitu: jumlah pekerjaan yang dihasilkan.
- c. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu: tingkat ketidak hadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif atau jam kerja hilang.
- d. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.

Adapun aspek-aspek standar kinerja terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif (Mangkunegara 2009). Aspek kuantitatif meliputi :

- a. Proses kerja dan kondisi pekerjaan
- b. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan,
- c. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan
- d. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja.

Sedangkan aspek kualitatif meliputi :

- a. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan

- b. Tingkat kemampuan dalam bekerja
- c. Kemampuan menganalisis data/informasi, kemampuan / kegagalan menggunakan mesin / peralatan
- d. Kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan konsumen).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari kinerja terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif.

C. Faktor-faktor Kinerja

Menurut Amstrong dan Baron yang dikutip Sedarmayanti (2011:223), kinerja dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

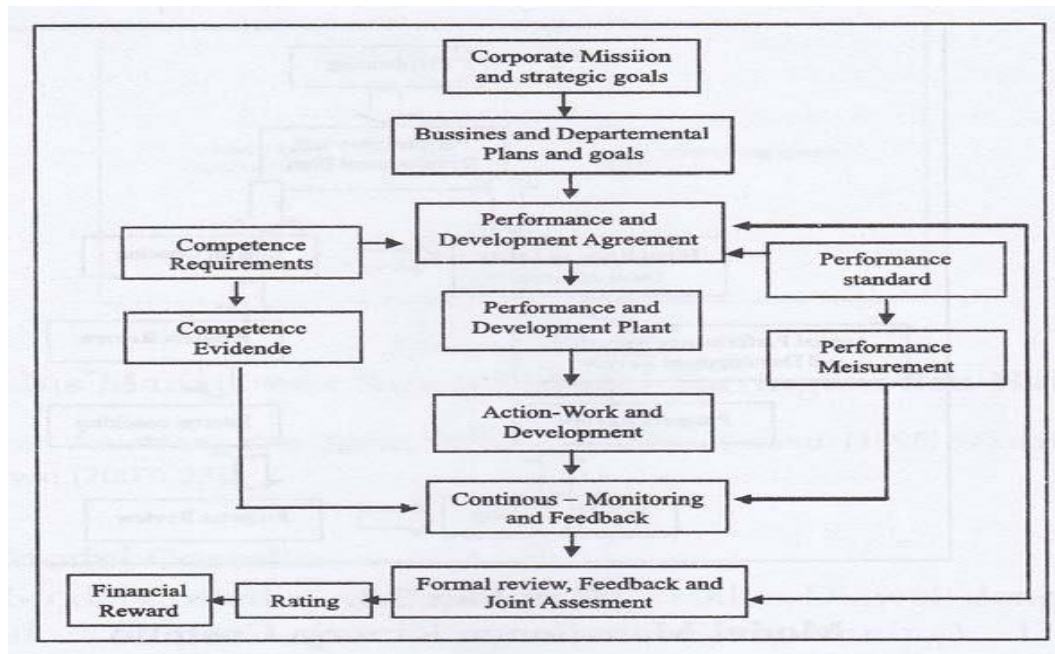
- a. *Personal factors* : ditunjukkan tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu;
- b. *Leadership factors* : ditentukan kualitas dorongan bimbingan, dan dukungan yang dilakukan team manajer dan leader;
- c. *Team factors* : ditunjukkan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja;
- d. *System factors* : ditunjukkan adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi;
- e. *Contextual/ Situational factors* : ditunjukkan tingginya tingkat tekanan lingkungan internal dan eksternal.

Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Untuk mencapai tujuan diperlukan proses-proses dalam sebuah kinerja, maka dalam kinerja perlu adanya manajemen yang baik dari proses perencanaan hingga evaluasi.

Pada hakikatnya manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan sebelumnya. Manajemen kinerja diawali dengan perumusan dan penetapan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan organisasi dicapai melalui serangkaian kegiatan, dengan mengarahkan semua sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Tujuan yang diharapkan tersebut merupakan titik awal dalam perencanaan kinerja organisasi.

Amstrong dan Baron mengemukakan siklus manajemen kinerja sebagai *sequence* atau urutan. Prosesnya merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan yang bermuara pada pencapaian hasil (kinerja) yang diharapkan. Urutan manajemen kinerja model Amstrong dan Baron dapat terlihat pada gambar berikut ini :

Siklus Urutan Manajemen Kinerja



Sumber : Amstrong dan Baron, *Performance Management* (1998:56) dalam Abdullah (2014:18).

Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses. Menurut Armstrong (2004:29) manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapat hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati.

Adapun fungsi manajemen kinerja terdiri atas 4 fungsi utama yaitu :

1. *Planning* (fungsi perencanaan) merupakan salah satu fungsi dalam penyusunan suatu tujuan dan disertai dengan penyusunan rencana – rencana yang akan di lakukan dalam mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan
2. *Organizing* (fungsi pengorganisasian) merupakan suatu fungsi pengelolaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau juga instansi.
3. *Directing* (pengarahan) merupakan sebuah fungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara optimal.
4. *Controlling* (pengendalian) merupakan segala fungsi pengawasan atau pengendalian kinerja, di sesuaikan dengan standarisasi yang telah di tetapkan pada suatu proses perencanaan.

II.1.2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Definisi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi

adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama.

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 anggota Komisi Pemilihan Umum diharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Badan-badan tersebut yaitu : (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi), (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), (5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan, (6) Pengawas Pemilu Lapangan, (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri, (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP), (9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), (10) Panitia pemungutan Suara (PPS), (11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), (12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), (13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebagai konsekuensi ketentuan konstitusional bahwa penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah satu kesatuan organisasi berjenjang walaupun telah ditentukan pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing oleh undang-undang. KPU provinsi adalah organ dari KPU yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, pedoman, dan program dari KPU, terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Di sisi lain, KPU provinsi harus mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota.

Namun demikian, prinsip kemandirian juga tetap dimiliki oleh KPU provinsi bahkan dari KPU nasional. Hal itu misalnya dalam hal penetapan hasil Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, untuk menjamin bahwa Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas-asas konstitusional. Sebaliknya KPU nasional juga dapat memberikan sanksi apabila KPU provinsi melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan pelaksanaan Pemilu.

Mengingat penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan organisasi, peran KPU provinsi meliputi semua penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya untuk Pemilu DPRD provinsi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan untuk pelaksanaan pemilihan bupati/walikota pun, KPU memiliki peran yang besar terutama dalam hal mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU provinsi juga memiliki peran dan tanggungjawab yang telah ditentukan UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilu di bawah koordinasi KPU.

Pasca pelaksanaan Pemilu 2009, peran penting KPU provinsi yang sudah di depan mata adalah pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilu bupati/walikota. Peran KPU nasional dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan;
- b. mengkoordinasikan dan memantau tahapan;

- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
- d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang
- f. sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Peran serta masyarakat direkayasa sedemilkian rupa sehingga mencerminkan suara yang sangat besar sebagai bagian dari upaya menanamkan kesan bahwa pemenangnya benar-benar *legitimate* dan memperoleh dukungan sangat kuat dari rakyat. Pada perkembangan berikutnya setelah sekurang-nya empat kali penyelenggara pemilu, dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga yang pada awal pembentukanya beranggotakan orang-orang yang non partisan dan kebanyakan dari kalangan pengurusan Tinggi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kewenanganya boleh disebut cukup besar, pada awal meneyelenggarakan Pemilu. Namun pada waktu itu, terutama substansi yang berhubungan dengan dengan orientasi baragam dari parpol pemilu dapat diselsaikan dengan baik. Bahkan perkembangan berikutnya terjadi

pelanggaran hukum oleh Anggota KPU yang membawa tindak pidana korupsi. Suksesnya Penyelenggaraan pemilu tidak cukup untuk me-nutup cacat hukum yang membawa beberapa anggotanya ke penjara. Sebuah pengalaman berharga yang membawa persepsi beragam tentang modus tindakan korupsi pada lembaga penyelenggara pemilu. Berbagai dari yang disampaikan untuk menghindarkan diri ternyata kandas karena beberapa anggota KPU harus menerima kenyataan bahwa mereka terindikasi, dan akhirnya terbukti secara yuridis melakukan tindak pidana dan untuk itu harus menjalani hukuman. Sejak awal pembentukan KPU untuk pemilu tahun 1999, mengemuka berbagai permasalahan. Pada satu sisi hal ini dapat dimaklumi karena lembaga tersebut baru saja dibentuk dan masih mencari style kinerja yang mapan dan terukur.

II.1.3. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menurut Prof. Dr. Wibowo, S.E., Phil (dalam Buku Manajemen Kinerja 2007:2) kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Untuk mencapai tujuan diperlukan proses-proses

dalam sebuah kinerja, maka dalam kinerja perlu adanya manajemen yang baik dari proses perencanaan hingga evaluasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah lembaga yang berwenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, disetiap Provinsi, Kota/ Kabupaten.

Tugas dan wewenang KPUD berdasarkan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu pada paragraf 3 pasal 10 ayat (3). Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Bupati/ Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II.1.4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Menurut Ramlan (1992:181) Pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Sedangkan menurut Harris G. Warren dan kawan-kawannya berpendapat bahwa Pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka. Serta memutuskan, apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka jaga.

Pemilukada sendiri adalah sarana demokrasi yang diciptakan untuk mengatur pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan pengertian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk berada ditatanan wilayah provinsi, bupati dan wakil bupati untuk ditatanan wilayah kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk tatanan diwilayah kota.

Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana masyarakat daerah secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Pemerintahan yang dibentuk melalui pemilukada itu berasal dari rakyat dan diabdikan untuk rakyat.

Pelaksanaan Pemilukada Langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut Winarno (2002:11) mengatakan bahwa: “sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih”.

Dengan demikian adanya Pemilukada secara langsung ini, proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat di daerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggungjawab

sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Dilaksanakannya Pemilukada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat daerah, dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya penyelenggara pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemilukada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal; Mengorganisir masyarakat kedalam suatu aktivitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi; dan Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Selain itu, hal yang terpenting dari Pemilukada ini adalah sebuah sarana demokratisasi ditingkat lokal yang dapat menegaskan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan calon yang terpilih akan kuat legitimasinya karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga tercipta stabilitas politik dalam pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 pada Bagian (3) Ketiga, Pasal 8 yaitu Tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota yang meliputi :

- a. Merencanakan anggaran, dan menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada kebijakan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada Peraturan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, apabila diperlukan;

- d. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan ini;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
- f. Menerima daftar pemilih dan melakukan dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- h. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS;

- i. Menerima laporan periodik, laporan pertanggung jawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- j. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
- k. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
- m. Menyampaikan laporan periodik laporan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU

Provinsi/KIP Aceh dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;

- n. Melakukan Tugas, Wewenang dan Kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Adapun serangkaian tugas-tugas kinerja Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari 2 tahapan yaitu :

I. Tahap Persiapan

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Penyusunan program dan anggaran menjadi salah satu tahapan persiapan yang penting dan krusial dalam mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan, program dan anggaran yang disusun untuk menentukan

besaran anggaran yang diusulkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes melalui 5 kegiatan.

2. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis

Sosialisasi pemilihan dimaksudkan untuk menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan, memberikan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat Brebes dalam pemilihan.

3. Pembentukan PPK,PPS,KPPS

Dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU Kabupaten Brebes dibantu oleh badan penyelenggara *ad hoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Keempat badan penyelenggara tersebut bersifat sementara untuk membantu pemilihan serentak di daerah.

- Pembentukan dan Pelantikan PPK
- Pembentukan Anggota PPS
- Pembentukan Anggota KPPS
- Pembentukan Anggota PPDP

4. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2015, dalam Pasal 1 ayat 24

menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari Pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih, data tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

- Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
- Penyusunan Daftar Pemilih Tetap
- Pelayanan Hak Pilih
- Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

II. Tahap Penyelenggaraan

1. Pencalonan

Merupakan proses penyeleksian tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

KPU Kabupaten Brebes telah mengumumkan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes dengan Nomor : 192/KPU-Kab-012.329305/2016. Adapun persyaratan mendaftar Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor : 054/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016.

b. Pendaftaran Pasangan Calon

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 23 September 2016.

c. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tidak terdapat Calon Perseorangan yang mendaftar.

d. Pemeriksaan Kesehatan

Pedoman pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, KPU menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Brebes nomor 064/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang penetapan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba pada Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, keputusan tersebut berpedoman pada standar pemeriksaan yang telah diterbitkan oleh dari IDI, HIMPSI dan BNN.

- e. **Peyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan**
Hasil Pemeriksaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes sesuai dalam surat nomor 445/3988/2016.
- f. **Penelitian Syarat Pencalonan Untuk Pasangan Calon**
Penelitian syarat pencalonan yang dilakukan oleh Tim yang telah dibentuk dengan melakukan Rapat Koordinasi dan Penelitian Faktual.
- g. **Pemberitahuan Hasil Penelitian**
Penyampaian hasil verifikasi penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan.
- h. **Perbaikan dan Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Pencalonan dan/ atau Syarat Calon**
KPU Kabupaten Brebes melakukan penelitian hasil perbaikan pada 11 Oktober 2016.
- i. **Penetapan Pasangan Calon**
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 075/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

- j. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Paslon
Hasil pengundian nomor urut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 077/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.
- k. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, KPU Kabupaten Brebes tidak terdapat sengketa TUN Pemilihan.

2. Kampanye

Merupakan serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak (masyarakat) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Penyampaian visi, misi dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya dengan tujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih sebagaimana disebut sebagai kegiatan kampanye.

- a. Rapat Koordinasi Kampanye

- b. Kampanye Ikrar Damai
- c. Debat Publik/Terbuka antara Paslon
- d. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik
- e. Masa tenang dan pembersihan alat peraga

3. Laporan Dana Kampanye

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan.

- a. Persiapan Laporan Dana Kampanye
- b. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye
- c. Pengumuman Penerimaan LADK
- d. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- e. Pengumuman Penerimaan LPSDK
- f. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- g. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)
- h. Audit LPPDK
- i. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Brebes

- j. Penyalpaian Hasil Audit LPPDK kepada Paslon
 - k. Pengumuman Hasil Audit
4. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

KPU Kabupaten Brebes dalam melakukan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berpedoman pada prinsip efisien dan efektif.

- a. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu KPU Kabupaten Brebes melakukan proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya melalui manual saja namun juga dilakukan secara elektronik.
- b. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu pengelolaan logistik dimulai saat logistik pemilihan diproduksi oleh penyedia barang, barang logistik tiba di KPU Kabupaten sampai logistik tersebut didistribusikan ke tingkat KPPS.

5. Pemungutan dan Penghitungan

Adalah mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Pemilih yang mempunyai hak harus mencoblos pilihannya di bilik suara, kemudian

dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya. Pemungutan suara merupakan salah satu mekanisme yang dipilih dalam menjalankan demokrasi.

- a. Persiapan Pemungutan
- b. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- c. Proses Scan dan Entri Form Model C1-KWK

6. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

Proses rekapitulasi dilakukan secara manual dari TPS, PPK hingga Kabupaten.

- a. Pelaksanaan Rekapitulasi d Tingkat PPK
- b. Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten
- c. Penetapan Calon Terpilih
- d. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan

II.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menurut Muhammad Fajri Ichsan, Muhajirah Hasanuddin, Syamsir Rahim, dalam penelitian berjudul Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam Pelaksanaan Pemilukada dan untuk mengetahui faktor yang

mendukung serta menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam mensukseskan pemilukada di Kabupaten Takalar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kuantitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar dikategorikan kurang berhasil dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Komunikasi, Hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan. (b). Sumber Daya Keuangan, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam pelaksanaannya. (c). Sumber Daya Manusia, Peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan Pemilukada, Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Sumber Daya Keuangan, Pemilukada di Kabupaten Takalar

tertunda karena Dana Penyelenggaraan Pemilu belum diberikan. (b).
Aktivitas Masyarakat, Banyaknya masyarakat Takalar sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti Pemilu dan menjadi golput.

- b. Menurut Wahyu Desambodo, dalam penelitian berjudul Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Paser. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Paser dan Untuk Mengetahui Hambatan/Kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Paser dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Paser. Jenis penelitian adalah jenis deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data, penulis mengumpulkan data-data dengan cara data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu Ketua KPU Kabupaten Paser beserta Stafnya dengan menggunakan Purposive Sampling sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip yang didapat dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Untuk analisis data menggunakan metode kualitatif model interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Paser, pertama terkait dengan

produktivitas pihak KPU sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur. Kedua yaitu kualitas pelayanan, dimana pihak KPU dalam memberikan pelayanan senantiasa bersikap ramah, sopan dan berusaha tepat waktu. Kemudian yang ketiga terkait responsivitas, pihak KPU melakukan diskusi dan transparansi kepada masyarakat. Keempat, responsibilitas pun sudah cukup baik dimana pihak KPU bersikap tanggap dalam menindak lanjuti isu-isu negatif yang beredar terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan yang kelima adalah akuntabilitas, pihak KPU menyajikan informasi terkait kinerjanya melalui media internet, papan pengumuman untuk masyarakat, serta membuat laporan tertulis yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada KPU Provinsi dan Pusat.

- c. Penelitian yang akan saya teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian saya akan membahas mengenai sejauh mana Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dan untuk mengetahui kendala dan solusi dari Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Jenis penelitian adalah jenis deskriptif kualitatif.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner.

II.3. Definisi Konsep

Menurut Bahri (2008:30), menguraikan Pengertian Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata.

Penulis mengajukan definisi konsep sebagai berikut :

1. Kinerja adalah bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

II.4. Pokok Penelitian

Pokok-pokok penelitian adalah tahapan dimana kita berusaha menjabarkan konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur. Definisi operasional atau pokok-pokok penelitian berfungsi untuk menjelaskan ukuran atau aspek-aspek penelitian agar data yang diperoleh lebih konkret.

Pokok-pokok penelitian mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 indikatornya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan juga berdasarkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 014/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2017 Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu :

I. Tahap Persiapan

1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis
3. Pembentukan PPK,PPS,KPPS
4. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

II. Tahap Penyelenggaraan

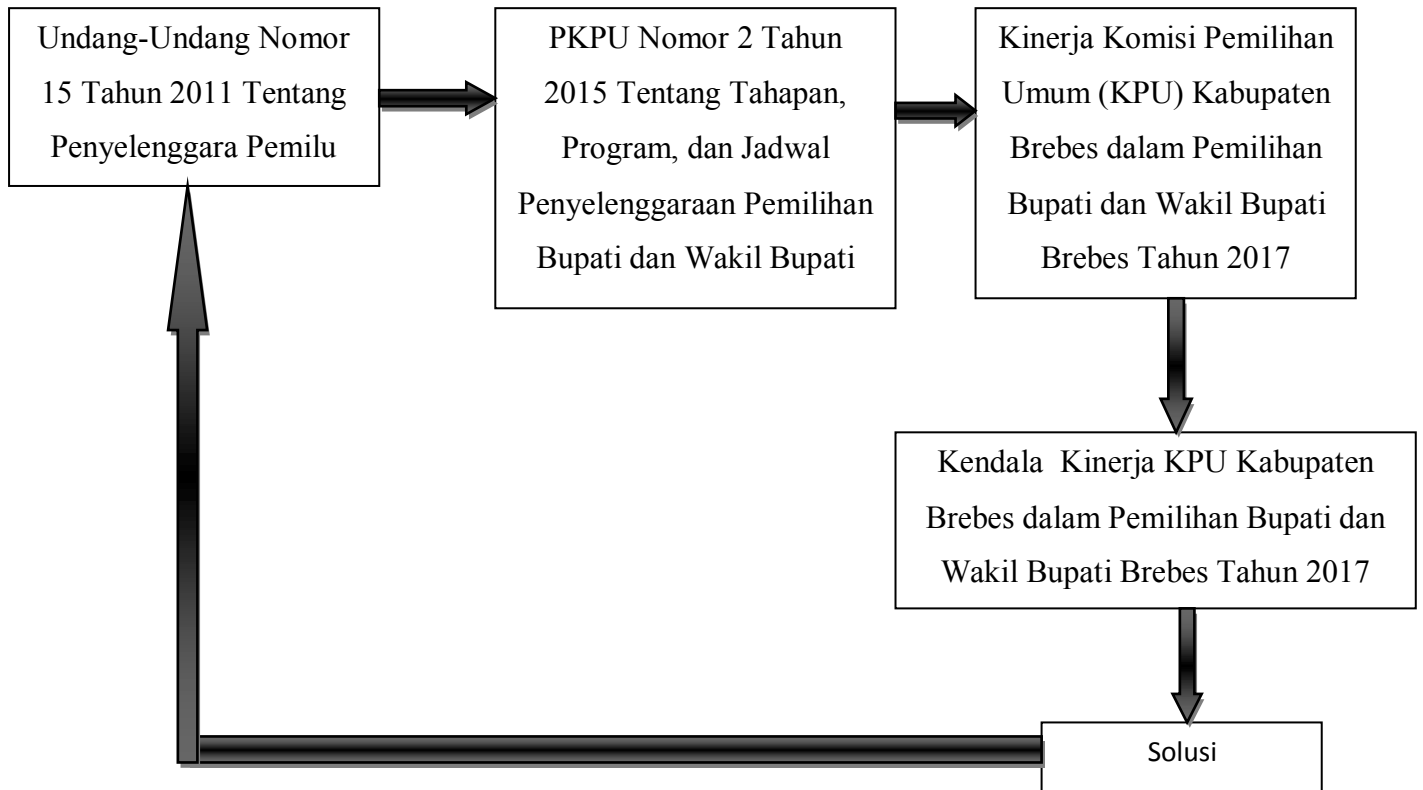
1. Pencalonan
2. Kampanye
3. Laporan Dana Kampanye
4. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
5. Pemungutan dan Penghitungan
6. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

II.5. Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai proses yang memuat langkah-langkah atau proses-proses urutan mengenai topik atau tema penelitian. Peranan peneliti sangat dominan dalam menentukan keberhasilan penelitian sedangkan alur pikir sifatnya hanya membantu mengarahkan proses penelitian agar berjalan dengan sistematis.

Dalam alur pikir Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dapat di gambarkan sebagai berikut :

Bagan Alur Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk menentukan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Di dalam ciri keilmuan ada ciri keilmuan rasional yaitu kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Keilmuan empiris yaitu cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Keilmuan sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (dalam Buku Sugiyono 2016 : 2)

Setiap penelitian memiliki tujuan penelitian, Secara umum tujuan penelitian di bagi tiga macam yaitu yang pertama, penelitian yang bersifat penemuan yang berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah di ketahui, yang kedua penelitian pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, sedangkan yang ke tiga penelitian yang bersifat pengembangan berarti memperdalam, memperluas pengetahuan yang telah ada (dalam Buku Sugiyono 2016 : 3).

Dengan demikian uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah suatu ilmu tentang metode-metode ilmiah sebagai cara kerja yang digunakan dalam kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan.

Sesuai dengan penelitian yang hendak diteliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh gambaran secara rinci dan mendalam mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Dari gambaran diatas, maka dapat diartikan bahwa peneliti dengan menggunakan metode deskriptif, disamping menggambarkan tetapi juga menganalisa, mempresentasikan data yang telah disajikan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tidak banyak memerlukan statistik, dan data hasil penelitian diperoleh secara langsung misalnya dengan wawancara dan observasi.

Dari beberapa tujuan penelitian di atas sebenarnya tujuan utama dalam penelitian adalah pemecahan suatu permasalahan yang terjadi. Dengan begitu maka bab metode penelitian akan meliputi bagian-bagian berikut :

III.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Berikut ini tipe-tipe penelitian yang terbagi atas beberapa tipe penelitian yaitu tipe penelitian historis, tipe penelitian

eksploratif/penjajakan, tipe penelitian deskriptif dan tipe penelitian eksplanatori (penjelasan/eksperimen).

1. Penelitian Historis

Penelitian historis, bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau, proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi.

2. Penelitian Eksploratif/Penjajakan

Penelitian eksploratif/penjajakan penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu permasalahan yang luas dan kompleks.

3. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Peneliti ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-

variabel yang diteliti. Penelitian semacam ini sering dilakukan oleh pejabat-pejabat guna mengambil kebijakan atau keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam melakukan tugasnya.

4. Penelitian Eksplanatori (Penjelasan/Eksperimen)

Penelitian eksplanatori (penjelasan/eksperimen), bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu, pada tipe penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif.

Jadi berdasarkan penjelasan tipe penelitian diatas maka Tipe yang akan digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif kualitatif yaitu karena data yang terkumpul adalah terkait mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi saat ini dan data diperoleh dari informen berupa kata-kata.

III.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data di dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data di sebut responden. Pengertian responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila penelitian menggunakan teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu penelitian yang mengamati (dalam Arikunto 2010:172).

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan subyek penelitian, maka dikenal 3 jenis yaitu :

1. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi.
 2. Sempel adalah sebagian atau wilayah populasi yang diteliti, jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi maka penelitian ini disebut sampel.
 3. Kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, gejala tertentu.
- Jadi Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan subyek penelitian ini adalah sampel.

III.3 Macam Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data, namun terdapat dua macam data dalam penelitian yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Menurut Sugiyono, Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, atau foto.
- b. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan/skoring.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya akan lebih banyak diperoleh dari wawancara dengan narasumber/stakeholder dan dokumen-dokumen.

2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong, menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan pengertian ini maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu :

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

III.4 Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Brebes khususnya pada lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.

III.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisis latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Informan dari penelitian ini terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang memiliki Peran dalam mewujudkan suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes yaitu Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP.
2. Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas yaitu Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP.

3. Ka. Sub. Bag. Program dan Data yaitu Bapak Heru Kristanto, S.Kom.
4. Ka. Sub. Bag. Hukum yaitu Bapak Iman Syah Budiono, SH.
5. Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik yaitu Bapak Andi Budi Harjanto, ST.
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes yaitu Bapak Wakro, S.IP.
7. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes yaitu Bapak Teguh Turmudi.
8. Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Suswono dan Ahmad Musttaqin DPD Partai PKS Kabupaten Brebes yaitu Bapak Abdullah Syafaat.

III.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Observasi menurut Nasution (1988) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research & Developmen, yaitu dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasikan dengan jelas. Jadi observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian dan untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan observasi kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menurut Esterberg (2002) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research & Developmen, merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh melalui penelitian berupa dokumen (foto) dan merekam hasil wawancara dengan menggunakan audio visual. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa foto, karena foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi berfungsi untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang digunakan dalam kerangka teori.

e. Penelusuran data *online*, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini seperti studi kepustakaan diatas. Namun yang akan membedakan hanya media tempat pengambilan data atau informasi. Teknik ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas internet.

Dalam penelitian ini semua teknik pengumpulan data digunakan. Sebab untuk memperoleh data yang lebih akurat.

III.7 Teknik Analisis Data

Berangkat dari penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah

yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis ketingkat abstraksi yang lebih tinggi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

III.8 Sistematika Penulisan

A. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.

B. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan Kernagka Teori, Penelitian Terdahulu, Definisi Konsep, Pokok Penelitian, Alur Pikir.

C. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini mencakup Jenis dan Tipe penelitian, Jenis dan Sumber Data, Macam Data dan Sumber Data, Obyek Penelitian, Informen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan.

D. Bab IV Deskripsi Wilayah Penelitian

Dalam bab ini penelitian memberikan gambaran umum Kabupaten Brebes dan gambaran umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes.

E. Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menyajikan hasil-hasil yang diperoleh pada saat melakukan penelitian dan rangkaian pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian.

F. Bab VI Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari rumusan permasalahan dan saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, peneliti kemudian memberikan gambaran umum lokasi penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

IV.1 Deskripsi Kabupaten Brebes

A. Letak Geografis Kabupaten Brebes

a. Keadaan Geografis Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108°41'37,7" - 109°11'28,92" Bujur Timur dan 6°44'56'5" - 7°20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan Bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, biasanya disebut dengan Bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam Bahasa Sunda dan banyak nama tempat

yang dinamai dengan Bahasa Sunda menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan Bahasa Sunda atau biasa disebut dengan Bahasa Sunda Brebes, adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, Bantarkawung, dan sebagian lagi ada di beberapa Desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan dan Larangan.

Ibu kota kabupaten Brebes terletak di bagian Timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan Kota Tegal, sehingga kedua kota ini dapat dikatakan "menyatu".

Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya Gunung Pojoktiga dan Gunung Kumbang), sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet.

Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.

Batas wilayah Kabupaten Brebes :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah selatan : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap

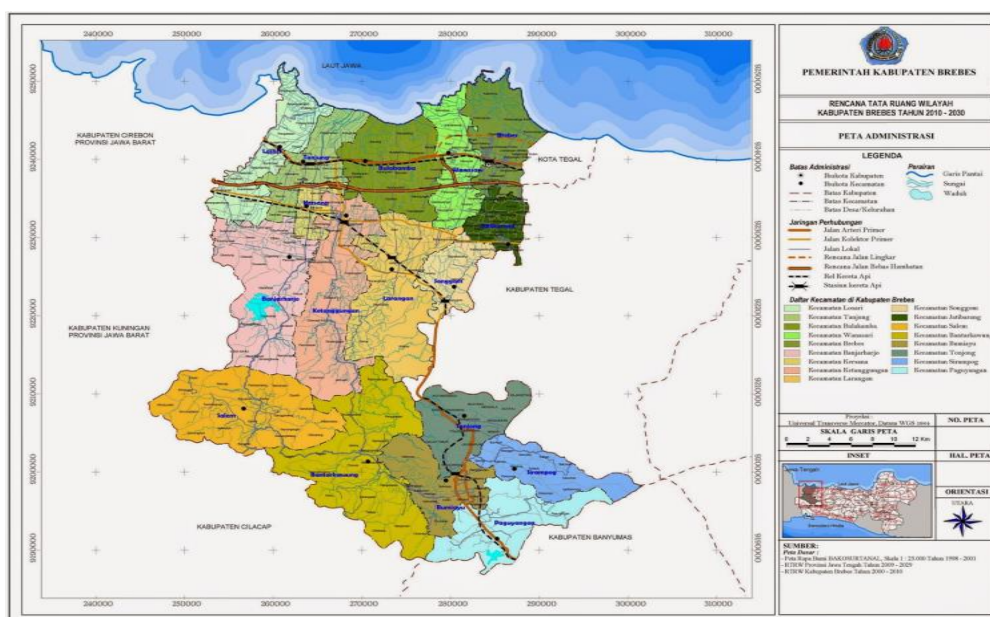
Sebelah barat : Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan
(Jawa Barat)

Sebelah timur : Kabupaten Tegal, Kota Tegal

b. Luas Wilayah Kabupaten Brebes

Gambar IV.1

Peta Administrasi Kabupaten Brebes



Sumber : <http://ppid.brebeskab.go.id/index.php?menu=profilbrebes>

Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah sebesar 1.662,96 km², terdiri dari 17 Kecamatan dan 297 Desa/Kelurahan. Kecamatan Bantarkawung merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah 205 km², sedangkan luas wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Jatibarang dengan luas 35,18 km². Wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan sebagian besar terletak di dataran tinggi, sedangkan wilayah bagian utara terletak di daerah dataran

rendah, wilayah Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 m.

Menurut penggunaan tanah dibagi menjadi tanah sawah dan tanah bukan sawah. Berdasarkan Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) pada Tahun 2014, luas tanah sawah sebesar 627,03 km² (37,70%) dan luas tanah bukan sawah sebesar 1.035,93 km² (62,30%). Sebagian besar luas tanah sawah merupakan sawah berpengairan 46.087 Ha (73,50%), baik merupakan irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana maupun irigasi desa, sedangkan sisanya (26,50%) merupakan sawah tadah hujan.

Jumlah curah hujan rata-rata di Kabupaten Brebes pada tahun 2016 sebesar 2.882 mm, rata-rata jumlah curah hujan per bulan 240 mm sedangkan jumlah rata-rata hari hujan per bulan pada tahun 2016 adalah 14 hari. Curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Larangan sebesar 4.904 mm, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak adalah 274 hari terjadi di Kecamatan Bumiayu.

B. Keadaan Demografi Kependudukan Kabupaten Brebes

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2016 tercatat 1.788,880 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Dengan sekala rasio sebesar 101,00. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Secara absolut, masing-masing

jumlahnya adalah 898.877 penduduk laki-laki, dan 890.003 penduduk perempuan.

Tiga Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bulakamba 169.542 jiwa (9,55 persen), Kecamatan Brebes 160.050 jiwa (8,94 persen), dan Kecamatan Wanasari sebanyak 149.644 jiwa (8,46 persen). Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kersana sebanyak 59.027 jiwa atau (3,28 persen). Namun jika dilihat dari tingkat kepadatannya, dimana luas daerah ikut diperhitungkan, Kecamatan Jatibarang menempati urutan pertama sebagai kecamatan yang paling padat penduduknya di Kabupaten Brebes, dimana kepadatan penduduknya 2.443 penduduk/Km² yang berarti bahwa tiap 1 Km² ditempati 2.443 penduduk. Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah ditempati oleh Kecamatan Salem, dimana kepadatan penduduknya hanya 393 penduduk/Km² yang berarti bahwa tiap 1 Km² hanya ditempati 393 penduduk.

Tabel IV.1
Jumlah Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km²
1. Salem	3.44	393
2. Bantarkawung	98	435
3. Bumiayu	5.48	1330

4. Paguyangan	5.62	957
5. Sirampog	3.58	955
6. Tonjong	3.71	818
7. Larangan	7.81	849
8. Ketanggungan	7.69	923
9. Banjarharjo	6.80	967
10. Losari	6.85	1371
11. Tanjung	5.36	1415
12. Kersana	3.30	2340
13. Bulakamba	9.48	1647
14. Wanasari	8.37	2010
15. Songgom	3.89	1420
16. Jatibarang	4.80	2443
17. Brebes	8.95	1977
Kabupaten Brebes	100.00	1076

Sumber : Badan Pusat Statisti Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2017

Dari tabel IV.1 jumlah kepadatan penduduk setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes tahun 2017 dapat diketahui keseluruhan jumlah kepadatan penduduk per Km² adalah 1.076 jiwa/Km² dengan persentase penduduk 100.00. Kepadatan penduduk di 17 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jatibarang dengan kepadatan sebesar 2.443 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan

Salem yaitu sebesar 393 jiwa/km² secara rinci dapat dilihat pada Tabel di atas.

Tabel IV.2
Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Brebes

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4 Tahun	76.928	72.875	149.803
5-9 Tahun	80.240	76.091	156.331
10-14 Tahun	85.277	80.853	166.130
15-19 Tahun	87.897	77.379	165.276
20-24 Tahun	78.586	69.676	148.262
25-29 Tahun	67.610	64.872	132.482
30-34 Tahun	64.184	64.964	129.148
35-39 Tahun	65.050	65.370	130.420
40-44 Tahun	57.918	57.982	115.900
45-49 Tahun	53.569	55.661	109.230
50-54 Tahun	49.026	53.420	102.446
55-59 Tahun	42.973	45.522	88.495
60-64 Tahun	37.382	37.159	74.541
65 Tahun Keatas	52.237	68.179	120.416
Jumlah	898.877	890.003	1.788.880

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2017

Dilihat dari Tabel IV.2 jumlah kepadatan penduduk menurut kelompok umum dan jenis kelamin di Kabupaten Brebes

menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk yang masih remaja cukup banyak, adalah pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu dengan jumlah laki-laki 87.897 jiwa dan perempuan 77.379 jiwa dan pada kelompok umur 10-14 tahun menempati jumlah terbanyak yaitu dengan jumlah laki-laki 85.277 jiwa dan perempuan 80.853 jiwa. Terdapat pula jumlah penduduk yang termasuk usia produktif berusia 20-24 tahun yang yaitu dengan jumlah laki-laki 78.586 jiwa dan perempuan 69.676 jiwa.

C. Keadaan Perekonomian Kabupaten Brebes

Perekonomian di Kabupaten Brebes didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sektor pertanian di Kabupaten Brebes merupakan lapangan pekerjaan mayoritas penduduknya dan karena sumber daya sektor pertanian masih sangat besar.

Luas areal sawah di Kabupaten Brebes pada tahun 2016 63.463 Ha. Sebagian besar areal sawah di Kabupaten Brebes ditanami padi sawah dengan luas panen pada tahun 2016 105.227 Ha, terjadi kenaikan seluas 5,362 Ha bila dibandingkan dengan tahun 2015.

Selain padi sawah juga dihasilkan padi ladang untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2016 luas panen padi ladang sebesar 2.456 Ha mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 seluas 26 Ha.

Tanaman palawija yang mendominasi di Kabupaten Brebes yakni salah satunya adalah jagung. Pada tahun 2016 luas panen jagung 18.539 Ha, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2105 sebesar 619 Ha.

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Brebes sebagian besar tanaman perkebunan rakyat. Dilihat dari sisi luasannya, tanaman perkebunan rakyat yang mempunyai area yang cukup tinggi pada tahun 2016 adalah tanaman kelapa sebesar 1.497.69 Ha dengan produksi 1.078.94 ton.

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Brebes adalah ternak besar, yaitu sapi, kerbau dan kuda sedangkan ternak kecil antara lain kambing, domba, dan kelinci. Disamping itu juga diusahakan ternak unggas yaitu ayam ras, ayam kampung, itik dan puyuh. Populasi ternak besar pada tahun 2016 untuk sapi, kerbau dan kuda masing-masing tercatat 27.542 ekor, 7.650 ekor dan 182 ekor. Kecamatan Bantarkawung dan Ketanggungan merupakan kecamatan dengan jumlah ternak besar terbanyak di Kabupaten Brebes.

Pada tahun 2016 populasi ternak kecil yaitu kambing dan domba sebanyak 108.336 ekor dan 168.508 ekor. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya populasi ternak kecil baik kambing maupun domba mengalami penurunan.

Banyaknya ternak besar yang dipotong pada tahun 2016 tercatat sebagai berikut : sapi yang dipotong sebanyak 4.898 ekor, sedangkan kerbau dipotong 282 ekor. Banyaknya ternak kecil yang dipotong pada tahun 2016 meliputi kambing sebanyak 8.912 ekor dan domba sebanyak 34.227 ekor baik yang dipotong di RPH maupun yang diluar RPH.

Sub sektor perikanan meliputi kegiatan usaha perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan darat terdiri dari usaha budidaya (tambak, sawah, kolam dan karamba), dan perairan umum (waduk, sungai, telaga/rawa). Jumlah Rumah Tangga Perikanan tangkap berdasarkan hasil Sensus pertanian 2013 adalah 2.151 untuk perikanan laut dan 103 untuk perikanan perairan umum.

Naik turunnya produksi padi disamping karena bertambah atau berkurangnya luas panen, juga disebabkan oleh naik turunnya tingkat produktivitas tanaman padi di Kabupaten Brebes.

Kegiatan ekonomi di Kabupaten Brebes merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes. Di Kabupaten Brebes selain masyarakatnya bekerja di sektor pertanian pada umumnya ada juga mata pencaharian seperti perdagangan. Juga terdapat usaha industri besar, sedang maupun industri kecil. Seperti: logam, bidang konstruksi, pertambangan, maupun energi, yaitu penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penjual eceran yang tersebar rata disetiap desa.

D. Keadaan Sosial di Kabupaten Brebes

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan yang dapat dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pembangunan suatu bangsa tidak bisa mengandalkan sumber daya alam semata maka usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan, dimana pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tersebut.

Peningkatan di bidang pendidikan akan berimbas pada kualitas penduduk yang semakin baik. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa tersebut. Salah satu sisi yang dapat dilihat untuk mengetahui gambaran pendidikan suatu daerah adalah jumlah guru, murid dan sekolah. Pada tahun 2016 sebagian besar jumlah sekolah di Kabupaten Brebes jumlahnya masih sama dengan tahun sebelumnya, kecuali MTs dan MA yang mengalami penambahan.

Jumlah guru dalam suatu kabupaten akan menggambarkan ketersediaan tenaga pendidik dalam wilayah tersebut. Jumlah guru di Kabupaten Brebes pada tahun 2016 relatif bertambah jumlahnya jika dibandingkan dengan tahun 2015. Jumlah murid di Kabupaten Brebes relatif meningkat pada tahun 2016 dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya kecuali jumlah murid pada tingkat SD.

Jumlah murid SD/MI pada tahun 2016 adalah 153.380 orang, berkurang sebanyak 5.601 orang jika dibandingkan dengan 2015. Penduduk usia sekolah digolongkan menjadi tiga, yaitu usia 7-12 tahun atau usia SD, 13-15 tahun atau usia SMP, dan 16-18 tahun atau usia SMA.

Kabupaten Brebes memiliki fasilitas pendidikan formal dari SD hingga SMA sederajat. Jumlah fasilitas dirinci sebagai berikut : SD 893 unit, MI 210 unit, SMP sebanyak 146 unit, MTs sebanyak 97 unit, SMA 32 unit, MA sebanyak 28 unit, dan SMK sebanyak 91 unit.

Banyaknya murid SD sebanyak 153.380 murid, murid MI sebanyak 39.640 murid, murid SMP sebanyak 57.239 murid, murid MTs sebanyak 30.890 murid, SMA sebanyak 18.041 murid, murid MA sebanyak 5.953 murid dan SMK sebanyak 38.595 murid.

Jumlah dari bangunan pendidikan formal tersebut masih berjumlah relatif sama, hanya saja ada perubahan pada jumlah siswa maupun jumlah pengajar setiap tahunnya.

Tabel IV.3
Jumlah Sarana Pendidikan Formal Menurut Jenis Sekolah
di Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2016/2017

No	Nama Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Pendidik	Jumlah Murid
1.	SD	893	7.895	153.380
2.	MI	210	1.840	39.640
3.	SMP	146	3.567	57.239
4.	MTs	97	2.160	30.890
5.	SMA	32	1.097	18.041
6.	MA	28	637	5.953
7.	SMK	91	2.633	38.595

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Dari Tabel IV.3 jumlah sarana pendidikan formal menurut jenis sekolah di Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2016/2017 yaitu jumlah tingkatan sarana pendidikan sekolah yang paling banyak adalah tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 893 gedung/bangunan sedangkan sarana pendidikan yang paling sedikit yaitu tingkat sekolah MA dengan jumlah 28 gedung/bangunan.

b. Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia, oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan sangatlah penting. Di Kabupaten Brebes fasilitas kesehatan terbilang cukup memadai.

Peningkatan status kesehatan dan gizi dalam suatu masyarakat sangatlah penting dalam upaya peningkatan kualitas manusia dalam aspek lainnya, seperti pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Tercapainya kualitas kesehatan dan gizi yang baik tidak hanya penting untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi selanjutnya.

Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini akan terwujud bila adanya dukungan pemerintah dan swasta sekaligus.

Tabel IV.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan
di Kabupaten Brebes Tahun 2016/2017

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	11
2	Rumah Bersalin	4
3	Puskesmas	38
4	Posyandu	1.752
5	Klinik/Balai Kesehatan	21
6	Polindes	236
Jumlah		2.062

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes

Dari Tabel IV.4 jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Brebes tahun 2016/2017 yaitu jumlah rumah sakit

umum ada 11 buah terdiri dari rumah sakit umum negeri 2 buah, dan rumah sakit umum swasta 9 buah. Didukung pula oleh tersedianya puskesmas induk sebanyak 38 unit dan 236 polindes.

Dilihat dari tabel diatas jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Brebes sudah cukup memadai.

c. Agama

Kabupaten Brebes merupakan mayoritas penduduk beragama islam, yang sisanya terbagi dalam keempat agama lain yaitu Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

Tabel IV.5
Jumlah Tempat Ibadah dan Prasarana Agama
di Kabupaten Brebes Tahun 2016/2017

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1.220
2	Langgar/Mushola	5.348
3	Gereja	29
4	Wihara	1
5	Pura	2
6	Klenteng	0
Jumlah		6.600

Sumber : Kementrian Agama Kabupaten Brebes

Dilihat dari Tabel IV.5 jumlah tempat ibadah dan prasarana agama di Kabupaten Brebes tahun 2016/2017 yaitu jumlah Sarana peribatan di wilayah Kabupaten Brebes meliputi masjid sebanyak

1.220 unit, musholla sebanyak 5.348 unit, gereja sebanyak 29 unit, dan wihara 2 unit.

IV.2 Deskripsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes

A. Letak Geografis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes terletak di lingkungan pusat Pemerintahan Kabupaten Brebes, tepatnya di sebelah barat gedung SMA N 3 Brebes dan bersebelahan dengan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dipimpin oleh seorang Ketua Muamar Riza Pahlevi, S.I.P. Dalam keterbukaan informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu, Pengelolaan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan *website* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dengan alamat <http://kpu-brebeskab.go.id/> dan <https://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3329>

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

B. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan melakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

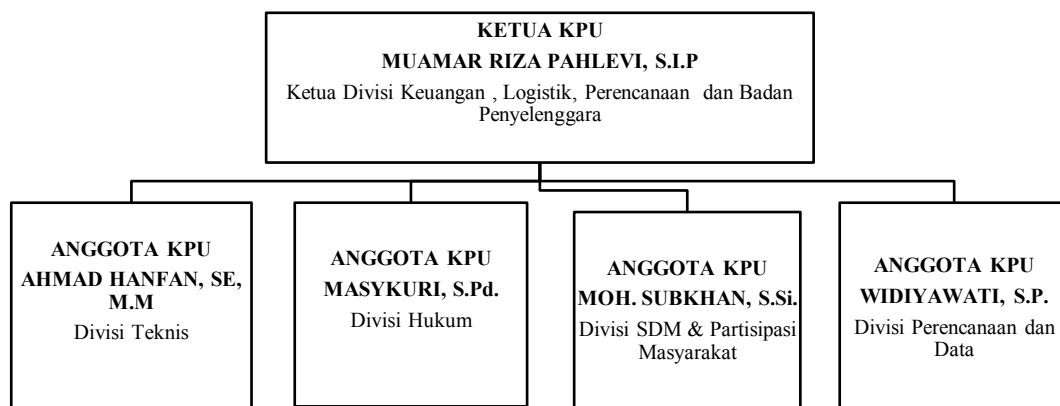
**C. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Brebes**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes adalah periode 5 (lima) tahunan dimana saat ini adalah periode ketiga dengan masa tugas tahun 2015-2019. Berikut daftar nama anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes periode 2015-2019 :

Bagan IV.1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes



Sumber : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes

Keterangan Nama Perangkat (Bagan IV.1):

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Ketua KPU Kabupaten Brebes | : Muamar Riza Pahlevi, S.I.P |
| 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu | : Ahmad Hanfan, SE, MM |
| 3. Divisi Hukum dan Pengawasan | : Masykuri, S.Pd. |
| 4. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat | : MOH. Subkhan, S.Si. |
| 5. Divisi Perencanaan dan Data | : Widiyawati, S.P. |

Tabel IV.6

Daftar Rincian Jabatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Tahun 2017/2018

No.	Nama	Jabatan
1.	Muamar Riza Pahlevi, S.IP	Ketua
2.	Ahmad Hanfan, SE, M.M	Divisi Teknis
3.	Masykuri, S.Pd.	Divisi Hukum
4.	Moh. Subkhan, S.Si.	Divisi SDM & Partisipasi Masyarakat
5.	Widiyawati, S.P.	Divisi Perencanaan dan Data
6.	Bambang Yusmanto, SE, M.Si.	Sekretaris
7.	Heru Kristanto, S.Kom	Sub. Bag. Program dan Data
8.	Wijayanti, SE	Pelaksana
9.	Akhmad Nuryanto, S.IP.	Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas
10.	Herry Fajar Purnomosidi, SE	Pelaksana
11.	Agus Wahyono	Pelaksana
12.	Awang Adhie Setiawan, S.Kom	Pelaksana
13.	Iman Syah Budiono, SH.	Sub. Bag. Hukum
14.	Rahayu Kurniawati, S.IP.	Pelaksana
15.	Andi Budi Harjanto, ST.	Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik
16.	Lesiana Wijastuti, S.Kom	Pelaksana
17.	Moh. Saefudin	Pelaksana
18.	Syaiful Anwar	Pelaksana
19.	Hendro Cipto	Pelaksana

20.	Pendi	Pelaksana
21.	Sugiarti	Pelaksana
22.	Washadi	Pelaksana
23.	Suripto	Pelaksana
24.	Untung Prayoga Arya, A.Md	Pelaksana
25.	Ferdy Kurniawan	Pelaksana
26.	Basuki	Pelaksana
27.	Anggoro Sugiharto	Pelaksana
28.	Ngatimin	Pelaksana

Sumber :Data primer yang telah diubah tahun 2018

Dapat dilihat dari Tabel IV.6 rincian jabatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tahun 2017/2018 yaitu berdasarkan jenis kelamin pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes terdiri dari 5 (lima) orang perempuan dan 23 (dua puluh tiga) orang laki-laki. Semua pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes mempunyai tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) masing-masing serta bertanggung jawab dengan tugasnya.

Dengan SDM yang baik maka akan tercipta kinerja yang baik juga, maka harus dibutuhkan tata manajemen dan kerjasama yang baik antar anggotanya.

D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada paragraf 3 pasal 10 ayat (3). Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Bupati/ Walikota meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan

- memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam

Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel IV.7

Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Berikut Pendidikan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	S2	1
2	S1	14
3	D3	1
4	SMA	10
5	SMP	1
6	SD	1

Sumber: data sekunder Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes per Desember 2015

Dari Tabel IV.7 pendidikan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dapat diketahui bahwa jika dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan tamat SD sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk latar belakang tamat pendidikan SMP sebanyak 1 orang, tamat pendidikan SMA berjumlah 10 orang, tamat pendidikan D3

berjumlah 1 orang, tamat pendidikan S1 berjumlah 14 orang dan S2 berjumlah 1 orang.

E. Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Dalam pelaksanaan tugas Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tidak terlepas dari sarana prasarana penunjang kinerja. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan jumlah yang tersedia berdasarkan hasil wawancara antara lain :

Tabel IV.8
Sarana dan Prasarana Komisioner penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi/Keadaan	
			Baik	Rusak
1		2	3	4
1.	Mobil	5	5	-
2.	Sepeda Motor	-	-	-
3.	Lemari Besi	5	5	-
4.	Lemari kayu	1	1	-
5.	White Board Electronic	1	1	-
6.	Meja Kerja Kayu	6	6	-
7.	Kursi Besi/ Metal	5	5	-
8.	Meja Rapat	1	1	-
9.	AC	2	2	-
10.	Kulkas	1	1	-
11.	Laptop	5	5	-

12.	Printer	1	1	-
-----	---------	---	---	---

Sumber: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes

Berdasarkan tabel IV.8 diatas sarana prasarana dalam menunjang kinerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, semuanya dalam keadaan baik.

F. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Bagan IV.2

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Tahun 2016/2017



Sumber: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

G. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Kabupaten Brebes

Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana

diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dukungan sekretariat sangat diperlukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum (KPU);
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Brebes melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes menerbitkan sejumlah keputusan.

H. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum

1. Tugas Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

- b. Memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- d. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU;
- f. Membantu pelaksanaan system pengendalian internal, dan;
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (KPU)

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;

- d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat Jendral KPU Provinsi, dan Sekretariat Jendral KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu, dan;
 - c. Mengelola barang inventaris KPU.
4. Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**I. Sarana dan Prasarana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Brebes**

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tidak terlepas dari sarana prasarana penunjang kinerja. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan jumlah yang tersedia yaitu :

**Tabel IV.9
Sarana dan Prasaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Brebes**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi/Keadaan	
			Baik	Rusak
1		2	3	4
1.	Kendaraan (Mobil)	4	3	1
2.	Sepeda Motor	6	6	-
3.	Scanner (Universal Taster)	1	1	-
4.	Lemari Besi/Metal	7	7	-
5.	Lemari kayu	2	2	-
6.	Filling Cabinet Besi	4	4	-
7.	Lemari Display	1	1	-
8.	Papan Visual/Papan Nama	18	18	-
9.	Over Head Projector	2	2	-
10.	White Board Electronic	1	1	-
11.	Display	1	1	-
12.	Focus Screen/ Layar LCD	2	2	-

13.	Alat Kantor Lainnya	1	1	-
14.	Meja Kerja Kayu	23	23	-
15.	Kursi Besi/ Metal	30	30	-
16.	Kursi Kayu	7	7	-
17.	Meja Rapat	2	2	-
18.	Meja Komputer	2	2	-
19.	Meja Telpon	1	5	-
20.	Kursi Fiber Glas	5	5	-
21.	Meubel Lainnya	1	1	-
22.	A.C. Split	5	5	-
23.	Kipas Angin	4	4	-
24.	Televisi	2	2	-
25.	Tape Recorder	1	1	-
26.	Sound System	2	2	-
27.	Wirelles	1	1	-
28.	Stabilisator	14	1	5
29.	Tiang Bendera	1	1	-
30.	Dispenser	2	2	-
31.	Handy Cam	1	1	-
32.	Camera Electronic	1	1	-
33.	Camera Digital	1	1	-
34.	Peralatan Studio vidio dan film	2	2	-
35.	Intermediate Telepone	1	1	-
36.	Facsmile	2	2	-
37.	Unit Tape Recorder	1	1	-

38.	Kursi Dorong	10	10	-
39.	Klem Jaringan	1	1	-
40.	Generator set	1	1	-
41.	P.C. Unit	34	32	-
42.	Laptop	4	4	1
43.	Note Book	16	14	1
44.	Hard Disk	2	2	-
45.	Scanner (Universal Taster)	5	5	-
46.	Printer	28	24	-
47.	External	1	1	-
48.	DVD writer	2	2	-
49.	Scanner (Peralatan Personal komputer)	10	5	5
50.	Peralatan Komputer lainnya	4	4	-
51.	Hub	3	2	-
52.	Switch	1	1	-
53.	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	1	-
	Jumlah	286	256	13

Sumber: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes

Berdasarkan tabel IV.9 diatas sarana dan prasarana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam menunjang kinerjanya dalam keadaan baik hanya saja ada kerusakan di kendaraan (mobil), laptop, notebook dengan masing-masing jumlah 1. Sementara gedung yang saat ini ditempati Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Brebes merupakan gedung dengan status pinjam pakai milik Pemerintah Kabupaten Brebes.

J. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.10

Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	1.833.134	2.606.929	2.687.421	2.770.860	2.857.337	12.755.681
076.01.02	<u>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	2.447.671	-	-	-	-	2.447.671
076.01.06	<u>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</u>	55.055	59.300	62.199	65.251	68.447	310.252
TOTAL		4.335.860	2.666.229	2.749.620	2.836.111	2.925.784	15.513.604

Sumber : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes 2015-

2019

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam kurun waktu lima tahun yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp. 12.755.681.000,-;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp. 2.447.671.000,-;
3. Program penguatan demokrasi dan perbaikan proses politik sebesar Rp. 310.252.000,-;

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian deskriptif kualitatif penulis memilih informan tidak pada besaran, tetapi kedalaman informasi yang didapatkan penulis dengan memilih orang-orang yang mengetahui persis seluk beluk permasalahan penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca.

Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, serta untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 lalu memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan dalam kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes di setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 .

Metode yang peneliti gunakan dalam memperoleh data yakni melalui wawancara secara mendasar dan mendalam pada keseluruhan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang berwenang terkait dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 serta yang berwenang di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk laporan. Hasil penelitian ini juga dilengkapi pula dengan berbagai jenis

data sekunder lain yang berfungsi sebagai data pendukung analisis deskriptif tersebut.

Pokok-pokok penelitian mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan juga berdasarkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 014/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2017 Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu :

III. Tahap Persiapan

1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis
3. Pembentukan PPK,PPS,KPPS
4. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

IV. Tahap Penyelenggaraan

1. Pencalonan
2. Kampanye
3. Laporan Dana Kampanye
4. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

5. Pemungutan dan Penghitungan

6. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

Dalam pokok-pokok penelitian tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes
yaitu Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP
2. Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas yaitu Bapak
Akhmad Nuryanto, S.IP.
3. Ka. Sub. Bag. Program dan Data yaitu Bapak Heru
Kristanto, S.Kom
4. Ka. Sub. Bag. Hukum yaitu Bapak Iman Syah Budiono,
SH.
5. Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik yaitu Bapak
Andi Budi Harjanto, ST.
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes yaitu Bapak Wakro, S.IP.

7. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes yaitu Bapak Teguh Turmudi
8. Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Suswono dan Ahmad Musttaqin DPD Partai PKS Kabupaten Brebes yaitu Bapak Abdullah Syafaat

Data sekunder lain yang berfungsi sebagai data pendukung analisis deskriptif adalah data yang ada kaitannya dengan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, data tersebut seperti: data sekunder dari proses tahapan-tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 itu sendiri karena tanpa data sekunder tersebut hasil penelitian belum terbukti dapat dipertanggung jawabkan. Data sekunder dapat berupa apa saja, bisa berupa pengumuman, foto, artikel dari website, buku laporan, dan selebaran.

Hasil penelitian yaitu untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dan untuk mengetahui kendala dan solusi dari kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

V.1 Hasil Penelitian

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu :

A. Tahap Persiapan

a. Perencanaan Program dan Anggaran :

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Apa saja tahap-tahap dalam proses perencanaan program dan anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Dalam hal ini teman-teman dari pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data adalah yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran. Dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yaitu yang pertama penyusunan rencana anggaran dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan rapat antara Komisioner KPU Kabupaten Brebes dengan pejabat eselon III dan IV Sekretariat KPU Kabupaten Brebes. Kegiatan penyusunan Program dan Anggaran dilaksanakan pada awal tahun 2015 sebelum tahapan pemilihan dilaksanakan, KPU Kabupaten Brebes sendiri telah melakukan rapat guna menyusun konsep program dan anggaran yang akan dilaksanakan pada pemilihan tahun 2017. Dalam melakukan penyusunan Program dan Anggaran, KPU Kabupaten Brebes berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. Setelah itu ada pembahasan anggaran dengan tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Brebes, lalu ada penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), ada pengesahan/revisi hibah dan tahap terakhir adanya perubahan/revisi rencana kebutuhan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Adapun pendapat Bapak Heru Kristanto, S.Kom (selaku Ka. Sub. Bag. Program dan Data) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Pada saat itu, terkait tahapan dalam proses perencanaan program dan anggaran yang disusun untuk menentukan besaran anggaran yang diusulkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes melalui 5 (lima) kegiatan yaitu :

- 1. Penyusunan rencana anggaran biaya/rancangan kebutuhan honorarium dan kebutuhan barang/jasa dan revisi anggaran hibah pemilihan.*
- 2. Pembahasan anggaran dengan tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Brebes.*
- 3. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).*
- 4. Pengesahan/revisi hibah.*
- 5. Perubahan/revisi rencana kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa tahapan dalam proses perencanaan program dan anggaran, dalam melakukan penyusunannya, KPU Kabupaten Brebes berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. Dalam proses penyusunan tahapan perencanaan program dan anggaran melalui 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan rencana anggaran biaya/rancangan kebutuhan honorarium dan kebutuhan barang/jasa dan revisi anggaran hibah pemilihan.

2. Pembahasan anggaran dengan tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Brebes.
 3. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 4. Pengesahan/revisi hibah.
 5. Perubahan/revisi rencana kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.
- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Bagaimana proses perencanaan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Proses perencanaan program dan anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, pada saat itu penyusunan anggaran diawali dengan pembahasan konsep awal yang telah dibuat sebelumnya dalam rapat koordinasi KPU Kabupaten Brebes tanggal 27 Februari 2015, dilanjutkan dengan rapat pleno KPU Kabupaten Brebes tanggal 5 Maret 2015 dan disepakati besaran anggaran yang akan diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Selanjutnya kita menyusun semua anggaran waktu itu kira” sebesar 54 Milyar. Kemudian dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah dibahas bersama kemudian dikirim ke DPRD di Komisi I DPRD disitu di bahas bersama dan disetujui. Setelah disetujui masuk di APBD kemudian ada perjanjian hibah, setelah tahapan hibah selesai, dari Sekretariat KPU Kabupaten Brebes membuat rekening dan sebagainya, baru dicairkan langsung 100 %, dan selama perjalananpun juga ada proses revisi, proses revisi itu dilaporkan di TAPD.

Pendapat Bapak Heru Kristanto, S.Kom (selaku Ka. Sub. Bag. Program dan Data) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Proses penyusunan anggaran diawali dengan pembahasan konsep awal yang telah dibuat sebelumnya dalam rapat koordinasi KPU Kabupaten Brebes tanggal 27 Februari 2015, dilanjutkan dengan rapat pleno KPU Kabupaten Brebes tanggal 5 Maret 2015 dan disepakati besaran anggaran yang akan diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2015, KPU Kabupaten Brebes mengajukan usulan permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam bentuk proposal permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, pada tanggal 2, 6 dan 7 April 2015 KPU Kabupaten Brebes melalui rapat pleno membahas perubahan permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dikarenakan penyesuaian dengan regulasi dan standar biaya yang baru. Kemudian usulan permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Brebes dalam rapat kerja sebanyak 2 (dua) kali. Hasil verifikasi anggaran oleh TAPD Kabupaten Brebes selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Brebes dengan TAPD dan Komisi I DPRD Kabupaten Brebes. Dan pada akhir Desember 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah menerbitkan petikan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD). Dalam dokumen anggaran tersebut belanja hibah KPU Kabupaten Brebes untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tercantum sebesar Rp. 40.565.089.000,-. Anggaran tersebut sudah melalui revisi-revisi anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Untuk secara umum sudah terlaksana dengan baik semua proses tahapan perencanaan dan anggarannya. Dalam artian bahwa semua yang direncanakan dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran itu berdasarkan dengan regulasi yang ada dan standar anggaran-anggaran, jadi karena program itu kan di rencanakan, karena kan di perencanaan itu sudah berdasar peraturan yang ada sudah standar nasional dan juga standar daerah itu sudah direncanakan semuanya.

Tabel V.1

Rekapitulasi Rincian Kebutuhan Biaya Tahapan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

KODE	URAIAN	BIAYA (Rp)
A	Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara Pemilihan	

I	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan	1.542.400.000
II	Honorarium Penyelenggara Pemilihan	17.472.958.000
III	Uang Lembur (10 Hari)	204.840.000
B	Kebutuhan Barang dan Jasa Pemilihan	
I	Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan	
1	Perencanaan Program dan Anggaran	0
2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	0
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	26.760.0000
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	2.214.409.000
5	Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP	1.727.563.000
6	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	550.068.000
7	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	0
8	Pencalonan	161.462.000
9	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	4.829.463.000
10	Laporan Audit Dana Kampanye	88.900.000
11	Proses Perhitungan	343.200.000
12	Advokasi Hukum	1.075.670.000
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.867.822.000
14	Rapat Kerja/Pelatihan/Bimtek dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS	140.690.000
15	Rapat Kerja dan Supervisi	68.600.000
16	Perjalanan Dinas	1.877.115.000
17	Evaluasi dan Pelaporan	9.780.000
II	Operasional dan Administrasi Perkantoran	
18	Pemeliharaan	0
19	Bahan Bakar Minyak Roda 4 dan Roda 3	0
20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.708.973.000
21	Sewa Roda 4, Roda 2 atau Kendaraan Lainnya	275.500.000
22	Pngelolaan Logistik Pemilihan	378.916.000
	JUMLAH	40.565.089.000

Sumber : Buku Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa tahapan dalam proses perencanaan program dan anggaran,

dalam melakukan proses perencanaan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 pada saat itu, penyusunan anggaran diawali dengan pembahasan konsep awal yang telah dibuat sebelumnya dalam rapat koordinasi KPU Kabupaten Brebes, setelah itu dilanjutkan dengan rapat pleno KPU Kabupaten Brebes. kemudian, disepakati besaran anggaran yang akan diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. KPU Kabupaten Brebes mengajukan usulan permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam bentuk proposal permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. KPU Kabupaten Brebes melalui rapat pleno membahas perubahan permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dikarenakan penyesuaian dengan regulasi dan standar biaya yang baru. Kemudian usulan permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Brebes. Kemudian hasil verifikasi anggaran oleh TAPD Kabupaten Brebes selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Brebes dengan TAPD dan Komisi I DPRD Kabupaten Brebes. Dalam dokumen anggaran tersebut belanja hibah KPU Kabupaten Brebes untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sudah disepakati bersama, anggaran tersebut sudah

melalui revisi-revisi anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Berdasarkan jawaban dari 2 pertanyaan di atas mengenai Perencanaan Program dan Anggaran peneliti simpulkan bahwa tahapan dalam proses perencanaan program dan anggaran sangat baik dan tidak menemui masalah. Dan dalam melakukan penyusunannya, KPU Kabupaten Brebes berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. Dalam proses penyusunan tahapan perencanaan program dan anggaran melalui 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan rencana anggaran biaya/rancangan kebutuhan honorarium dan kebutuhan barang/jasa dan revisi anggaran hibah pemilihan.
2. Pembahasan anggaran dengan tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Brebes.
3. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
4. Pengesahan/revisi hibah.

5. Perubahan/revisi rencana kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Dan dalam melakukan proses perencanaan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 pada saat itu, penyusunan anggaran diawali dengan pembahasan konsep awal yang telah dibuat sebelumnya dalam rapat koordinasi KPU Kabupaten Brebes, setelah itu dilanjutkan dengan rapat pleno KPU Kabupaten Brebes. kemudian, disepakati besaran anggaran yang akan diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. KPU Kabupaten Brebes mengajukan usulan permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. KPU Kabupaten Brebes melalui rapat pleno membahas perubahan permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dikarenakan penyesuaian dengan regulasi dan standar biaya yang baru. Dan kemudian dalam melakukan proses perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Brebes berkoordinasi dengan pihak terkait proses penyusunan anggarannya yaitu berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Brebes dan Komisi I DPRD Kabupaten Brebes.

b. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis :

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu
Bagaimana proses kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam rangka persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Sosialisasi pada saat itu seingat saya, proses kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam rangka persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 di isi dengan beberapa kegiatan, adapun kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Brebes dalam rangka persiapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yaitu :

- 1. Doa dan pertemuan tokoh demokrasi*
- 2. Launching tahapan dan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017*
- 3. Sosialisasi tahapan dan pencalonan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017*
- 4. MoU media cetak dan elektronik*
- 5. Pembentukan relawan demokrasi*
- 6. Bimbingan teknis relawan demokrasi*
- 7. Stand pameran pembangunan*
- 8. Karnaval pembangunan*
- 9. Sosialisasi tahapan dan pemuatn data dan daftar pemilih kepada Organisasi Masyarakat (Ormas), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Tokoh Agama (Toga)*
- 10. Sosialisasi kepada partai politik (pencalonan dan pengawasan)*
- 11. Sepeda santai dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan Pemilukada*
- 12. Sosialisasi kepada masyarakat Brebes yang ada di Semarang*
- 13. Sosialisasi kepada masyarakat Brebes yang ada di Jakarta*
- 14. Sosialisasi kepada PNS Kabupaten Brebes*
- 15. Sosialisasi kepada keluarga TNI dan POLRI Brebes*
- 16. Jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil*
- 17. Sosialisasi kepada kelompok adat*
- 18. Sosialisasi kepada Ormas, Tomas, Toga tentang pemuatn data pemilih*

19. *Pawai ta'aruf dan festival rebana*
20. *Sosialisasi kepada wartawan, LSM, pemantau dan organisasi kepemudaan*
21. *Sosialisasi kepada pemilih perempuan*
22. *Sosialisasi kepada warga Lembaga Pemasyarakatan Brebes*
23. *Sosialisasi bagi kelompok berkebutuhan khusus*
24. *Sosialisasi kepada pemilih pemula melalui festival band*
25. *Music on the road*
26. *Sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara di Rumah Sakit, Puskesmas, Rawat Inap dan Tahanan*
27. *Doa bersama menuju Pilbup damai*

Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag.

Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 061/Kpts/KPU-Kab-021.329305/2017, salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 adalah sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS. adapun kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Brebes dalam rangka persiapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 meliputi :

1. *Doa dan pertemuan tokoh demokrasi*
2. *Launching tahapan dan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017*
3. *Sosialisasi tahapan dan pencalonan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017*
4. *MoU media cetak dan elektronik*
5. *Pembentukan relawan demokrasi*
6. *Bimbingan teknis relawan demokrasi*
7. *Stand pameran pembangunan*
8. *Karnaval pembangunan*
9. *Sosialisasi tahapan dan pemutakhiran data dan daftar pemilih kepada Organisasi Masyarakat (Ormas), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Tokoh Agama (Toga)*
10. *Sosialisasi kepada partai politik (pencalonan dan pengawasan)*
11. *Sepeda santai dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan Pemilukada*
12. *Sosialisasi kepada masyarakat Brebes yang ada di Semarang*

13. *Sosialisasi kepada masyarakat Brebes yang ada di Jakarta*
14. *Sosialisasi kepada PNS Kabupaten Brebes*
15. *Sosialisasi kepada keluarga TNI dan POLRI Brebes*
16. *Jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil*
17. *Sosialisasi kepada kelompok adat*
18. *Sosialisasi kepada Ormas, Tomas, Toga tentang pemutakhiran data pemilihan*
19. *Pawai ta'aruf dan festival rebana*
20. *Sosialisasi kepada wartawan, LSM, pemantau dan organisasi kepemudaan*
21. *Sosialisasi kepada pemilih perempuan*
22. *Sosialisasi kepada warga Lembaga Pemasyarakatan Brebes*
23. *Sosialisasi bagi kelompok berkebutuhan khusus*
24. *Sosialisasi kepada pemilih pemula melalui festival band*
25. *Music on the road*
26. *Sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara di Rumah Sakit, Puskesmas, Rawat Inap dan Tahanan*
27. *Doa bersama menuju Pilbup damai*

Selain beberapa kegiatan tersebut, penyebaran informasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten Brebes tidak hanya melalui metode tatap muka, namun juga melalui media massa, bahan sosialisasi (poster, leaflet, baliho, spanduk, dan alat peraga sosialisasi), laman KPU Kabupaten Brebes dan media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa proses kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Brebes dalam rangka persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 melalui 2 (dua) metode kegiatan yaitu tatap muka dan non tatap muka (melalui media massa).

Meliputi beberapa kegiatan yaitu :

1. Doa dan pertemuan tokoh demokrasi
2. Launching tahapan dan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

3. Sosialisasi tahapan dan pencalonan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017
4. MoU media cetak dan elektronik
5. Pembentukan relawan demokrasi
6. Bimbingan teknis relawan demokrasi
7. Stand pameran pembangunan
8. Karnaval pembangunan
9. Sosialisasi tahapan dan pemutakhiran data dan daftar pemilih kepada Organisasi Masyarakat (Ormas), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Tokoh Agama (Toga)
10. Sosialisasi kepada partai politik (pencalonan dan pengawasan)
11. Sepeda santai dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan Pemilukada
12. Sosialisasi kepada masyarakat Brebes yang ada di Semarang
13. Sosialisasi kepada masyarakat Brebes yang ada di Jakarta
14. Sosialisasi kepada PNS Kabupaten Brebes
15. Sosialisasi kepada keluarga TNI dan POLRI Brebes
16. Jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil
17. Sosialisasi kepada kelompok adat
18. Sosialisasi kepada Ormas, Tomas, Toga tentang pemutakhiran data pemilih

19. Pawai ta'aruf dan festival rebana
20. Sosialisasi kepada wartawan, LSM, pemantau dan organisasi kepemudaan
21. Sosialisasi kepada pemilih perempuan
22. Sosialisasi kepada warga Lembaga Pemasyarakatan Brebes
23. Sosialisasi bagi kelompok berkebutuhan khusus
24. Sosialisasi kepada pemilih pemula melalui festival band
25. Music on the road
26. Sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara di Rumah Sakit, Puskesmas, Rawat Inap dan Tahanan
27. Doa bersama menuju Pilbup damai

Selain beberapa kegiatan tersebut, penyebaran informasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten Brebes tidak hanya melalui metode tatap muka, namun juga melalui media massa, bahan sosialisasi (poster, leaflet, baliho, spanduk, dan alat peraga sosialisasi), laman KPU Kabupaten Brebes dan media sosial.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah kegiatan sosialisasi dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sudah maksimal dilakukan ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Sosialisasi sudah maksimal ya, dengan anggaran ya cukup besar. Maksimal meliputi semua masyarakat, anggarannya cukup besar dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana.

Pendapat Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Kegiatan sosialisasi sudah semaksimal mungkin kita lakukan, itu kegiatannya melalui kegiatan tatap muka itu pertemuan” tempatnya bisa diruangan atau bisa diluar ruangan, ada melalui kegiatan olah raga seperti sepeda santai, jalan sehat, terus ada lagi kegiatan pertunjukan seni dan lomba cerdas cermat untuk sasarannya pelajar SMA, cerdas cermat dengan tema kepemiluan, yang di ikuti oleh semua SMA, baik SMA ataupun MAN seluruh Brebes dan pertemuan dengan kelompok-kelompok tani, kelompok perempuan, dan lain-lain. Serata melakukan sosialisasi ke Ormas-ormas yang ada di Kabupaten Brebes. Bahkan pada saat itu kita melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati Tahun 2017 sampai ke luar kota (Jakarta dan Semarang), agar masyarakat Kabupaten Brebes yang merantau tau bahwa ada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan mengetahui tanggal pelaksanaannya. Dan kita juga melakukan iklan melalui radio.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sudah semaksimal mungkin dilakukan, hal ini terbukti karena banyaknya serangkaian kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Brebes. Dengan biaya kegiatan sosialisasi yang cukup besar, semua kegiatan sosialisasi terlaksana dengan baik dan menyeluruh ke semua warga masyarakat Kabupaten Brebes.

3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu siapa saja sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yaitu, kita (KPU Kabupaten Brebes) melakukan sosialisasi ke organisasi, ke PNS juga, ke ORMAS (organisasi masyarakat), ke Tokoh adat, dan kemudian ke organisasi yang ada di organisasi masal, organisasi kepemudaan, organisasi agama, dan kesekolah- sekolah, kampus (Universitas), dan juga kemasyarakat umum. Jadi sosialisasi juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Brebes, PPK, PPS sampai KPPS (semua badan adhoc). Selain itu, kita juga koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk ikut membantu sosialisasi. Nah, dari organisasi-organisasi itu, selain ikut sosialisasi mereka juga dapat ikut menginformasikan/mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 (getok tular).

Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi meliputi komponen masyarakat umum, pemilih pemula, tokoh masyarakat/pemuka adat, kelompok media massa, partai politik, pengawas, pemantau pemilihan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok adat, instansi pemerintah, partai politik dan pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas). Keseluruhan komponen tersebutlah menjadi objek sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Brebes selama tahapan persiapan pemilihan berlangsung. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut, KPU Kabupaten Brebes juga di bantu oleh PPK, PPS, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 berdasarkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi meliputi komponen masyarakat umum, pemilih pemula, tokoh masyarakat/pemuka adat, kelompok media massa, partai politik, pengawas, pemantau pemilihan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok adat, instansi pemerintah, partai politik dan pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas). Keseluruhan komponen tersebut telah menjadi objek sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Brebes selama tahapan persiapan pemilihan berlangsung. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut, KPU Kabupaten Brebes juga di bantu oleh PPK, PPS, dan partisipasi masyarakat.

4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimanakah ke ikut sertaan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Ke ikut sertaan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, ya sangat antusias ya, mereka ketika di undang sosialisasi itu 90% hadir, malah kadang sekitar 95% karena ada sovenir (setiker-setiker/gantungan kunci) jadi adanya pembagian sovenir itu agar menarik masyarakat/kelompok masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang di adakan oleh KPU Kabupaten Brebes.

Pendapat dari Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub.

Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Oh kalau mengenai ke ikut sertaan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 itu masyarakat sangat antusias, kalo kita melakukan sebuah kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka itu ya banyak yang datang, artinya yang kita undang rata-rata datang menghadiri kegiatan sosialisasi, ya kan yang kita undang itu perwakilan dari organisasi perempuan, perwakilan dari organisasi kelompok tani, pelajar (pemula dan pemuda), banyak yang datang. Kemudian ketika diadakan kegiatan sosialisasi yang bersifat masal, dalam bentuk olah raga entah itu sepeda santai, atau jalan sehat itu sangat antusias. Bahkan pagi-pagi aja mereka udah datang, bahkan panitianya belum datang masyarakat sudah datang duluan. Jadi kalau kegiatan sosialisasi tidak ada masalah, malah masyarakat sangat antusias, kemudian juga kalau kita melaksanakan sebuah kegiatan kesenian/hiburan masyarakat sangat antusias mengikuti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa ke ikut sertaan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Brebes, misalnya dalam sebuah kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka banyak yang datang, artinya yang di undang rata-rata datang menghadiri kegiatan sosialisasi, yang di undang itu perwakilan dari organisasi perempuan, perwakilan dari organisasi kelompok tani, pelajar

(pemula dan pemuda), banyak yang datang. Kemudian ketika diadakan kegiatan sosialisasi yang bersifat masal, dalam bentuk olahraga entah itu sepeda santai, atau jalan sehat itu sangat antusias. Kemudian kegiatan sosialisasi berupa sebuah kegiatan kesenian/hiburan masyarakat sangat antusias mengikutinya.

5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana dampak kegiatan sosialisasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Dampaknya ya seharusnya peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, akan tetapi dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2012, pada saat tahun 2012 tingkat partisipasinya/penggunaan hak pilihnya sebesar 61,03% dan pada saat tahun 2017 tingkat partisipasinya sebesar 55,04% jadi tingkat partisipasi/penggunaan hak pilih masyarakat mengalami penurunan karena disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi. Disini perlu dijelaskan bahwa, penurunan tingkat partisipasi bukan karena kegiatan sosialisasi belum maksimal dilakukan, akan tetapi karena faktor alam dan faktor mobilisasi masyarakat Kabupaten Brebes.

Pendapat dari Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Ya kalo dampak sosialisasi itu ya sangat berpengaruh, karena kan masyarakat jadi mengetahui ya, diantaranya mengetahui tanggal pemungutan suaranya kapan dilaksanakan, terus pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati siapa saja, seperti itu. Lalu mengingatkan pada hari H (hari pemungutan suara) itu supaya melakukan

pemungutan suara/mencoblos Paslon Bupati dan Wakil Bupati Brebes ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kalo tidak diingatkan seperti itu, ya masyarakat tidak akan tahu, jadi sosialisasi yang kita laksanakan dengan sangat masif di jajaran lembaga-lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, masyarakat, perkumpulan-perkumpulan, kemudian di kelompok-kelompok remaja, pelajar itu tentu berpengaruh mereka jadi tahu bahwa brebes akan melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati kembali. Namun di tingkat partisipasi pada saat pencoblosan (pemungutan suara), masih rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor alam dan faktor mobilisasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dampak kegiatan sosialisasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sangat berpengaruh, karena lewat kegiatan sosialisasi masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan pemungutan suara, mengetahui pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan mengingatkan untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya. Namun di tingkat partisipasi pada saat pencoblosan (pemungutan suara), masih rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor alam dan faktor mobilisasi masyarakat.

- 6) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Apakah sudah maksimal ? jika belum maksimal, apa yang menyebabkan tingkat partisipasi yang rendah ? dan apa solusi yang tepat agar partisipasi masyarakat bisa maksimal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes untuk tahun/periode berikutnya ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 belum maksimal, disini jujur ya. Tetapi ini harus dijelaskan, kenapa belum maksimal? Yang pertama bahwa masyarakat Kabupaten Brebes sangat mobile artinya yang merantau itu banyak, yang pengusaha warteg, menempuh pendidikan di luar kota/kuliah, mondok di pesantren. Bisa dilihat dari formulir C6 (surat undangan untuk memilih) yang kembali, itu sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat artinya mereka tidak ada ditempat/di rumah itu formulir C6 yang kembali ada sekitar 306.676 lembar formulir C6. Penyebab dari tingkat partisipasi yang rendah itu karena banyaknya masyarakat Kabupaten Brebes yang merantau itu sekitar 30% dan karena faktor alam pada saat itu ada musibah bencana banjir. Solusinya yaitu kegiatan sosialisasi yang sudah pernah dilakukan kita maksimalkan dan perbanyak sosialisasi di daerah rantau seperti di Kota Jakarta, Semarang dan kedepannya bisa ditambah sosialisasi ke kota yang banyak perantau dari masyarakat Brebes. Dan kalo bisa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tidak pada musim penghujan.

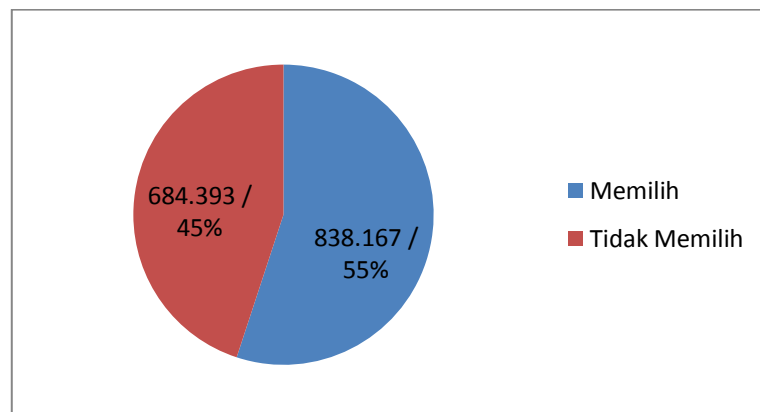
Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, partisipasi pada saat itu sifatnya relatif. Pada saat itu tingkat partisipasinya sebesar 55,04% jadi kalo secara nilai terlihat masih rendah. Tapi perlu kita ketahui memang faktornya itu banyak, bukan saja dari lembaga KPU sendiri yang artinya kurang dalam melakukan sosialisasi. Tapi kita perlu ketahui bahwa masyarakat brebes itu, kita tidak bisa memungkiri banyak yang berada diluar daerah, nah tinggal bagaimana kesadaran masyarakat itu dalam rangka mereka turut berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes mereka mau menyempatkan pulang atau tidak, kalau mereka mau menyempatkan pulang ya tentunya tingkat partisipasinya akan naik. Makanyakan pada saat Pilkada itu biasanya di hari libur atau hari yang diliburkan, akan tetapi banyak masyarakat Brebes yang diluar daerah itu bukan saja orang-orang yang bekerja di instansi atau

lembaga-lembaga resmi, kebanyakan bekerja di swasta/usaha, pedagang, dan juga sekolah diluar kota. Jika pilkada itu sifatnya wajib mungkin masyarakat yang ada diluar kota akan pulang dan mencoblos, tapi kan pilkada ini sifatnya tidak wajib dan hanya sebatas hak bukan kewajiban. Solusinya, ya kalo terkait kesadaran masyarakatnya itu kembalinya pada pembinaan masyarakat selaku warga negara mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi diantaranya pesta demokrasi lokal itu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati itu adalah peran/tugas dari semua lapisan masyarakat baik pemerintah, lembaga pendidikan, bahwa bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebuah pemilihan bupati itu menjadi hal yang penting dan berpengaruh untuk kemajuan masyarakat. Dan kemudian selain itu juga tidak kalah menjadi faktor mereka mau berpartisipasi itu, calon pimpinan yang nantinya terpilih apakah pimpinan tersebut membawa kemajuan daerah kalo ternyata ada kemajuan membawa kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat akan lebih antusias (mesin dari sebuah pemilihan pemimpin daerah).

Diagram V.1

Jumlah Partisipasi Memilih Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Brebes Tahun 2017



Sumber : Buku Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Brebes 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 belum maksimal, Tetapi ini harus dijelaskan, kenapa belum maksimal? Yang pertama bahwa masyarakat Kabupaten Brebes sangat mobile artinya yang merantau itu banyak, yang pengusaha warteg, menempuh pendidikan di luar kota/kuliah, mondok di pesantren. Bisa dilihat dari formulir C6 (surat undangan untuk memilih) yang kembali, itu sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat artinya mereka tidak ada ditempat/di rumah itu formulir C6 yang kembali ada sekitar 306.676 lembar formulir C6. Penyebab dari tingkat partisipasi yang rendah itu karena banyaknya masyarakat Kabupaten Brebes yang merantau dan karena faktor alam pada saat itu ada musibah bencana banjir. Dan selain itu juga tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Brebes akan penyelenggaraan pesta demokrasi (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes) masih kurang. Solusinya yaitu kegiatan sosialisasi yang sudah pernah dilakukan kita maksimalkan dan perbanyak sosialisasi di daerah rantau seperti di Kota Jakarta, Semarang dan kedepannya bisa ditambah sosialisasi ke kota yang banyak perantau dari masyarakat Brebes. Dan kalo bisa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tidak pada musim penghujan. Dan terkait kesadaran masyarakatnya itu kembalinya pada pembinaan masyarakat selaku warga negara mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi diantaranya pesta demokrasi lokal itu Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati dan kemudian selain itu juga tidak kalah menjadi faktor mereka mau berpartisipasi.

Berdasarkan jawaban dari 6 pertanyaan di atas mengenai Sosialisasi / Penyuluhan / Bimbingan Teknis, peneliti simpulkan bahwa kegiatan sosialisasi secara keseluruhan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sudah maksimal dilaksanakan. Dan ke ikut sertaan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Brebes. Kemudian sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi meliputi komponen masyarakat umum, pemilih pemula, tokoh masyarakat/pemuka adat, kelompok media massa, partai politik, pengawas, pemantau pemilihan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok adat, instansi pemerintah, partai politik dan pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas). Dan dampak kegiatan sosialisasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sangat berpengaruh, karena lewat kegiatan sosialisasi masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan pemungutan suara, mengetahui pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan mengingatkan untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya. Namun di tingkat partisipasi pada saat pencoblosan (pemungutan suara), masih rendah karena

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor alam (musibah bencana banjir) dan faktor mobilisasi masyarakat (merantau ke luar kota). Dan solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu kegiatan sosialisasi yang sudah pernah dilakukan dimaksimalkan dan perbanyak sosialisasi di daerah rantau seperti di Kota Jakarta, Semarang dan kedepannya bisa ditambah sosialisasi ke kota yang banyak perantau dari masyarakat Brebes. Dan diharapkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tidak pada musim penghujan.

c. Pembentukan PPK, PPS, KPPS

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimanakah proses pembentukan anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP se-Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Keseluruhan proses pembentukan anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP se-Kabupaten Brebes sesuai dengan regulasi yang ada. Ya walaupun selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 berlangsung, ada 5 (lima) kali dilakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota PPK. Adapun alasan adanya PAW anggota PPK yaitu adanya anggota PPK yang telah diterima sebagai pendamping desa, pindah keluar kota dan melanggar kode etik.

Menurut Bapak Heru Kristanto, S.Kom (selaku Ka. Sub. Bag. Program dan Data) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Untuk proses pembentukan anggota PPK dan anggota PPS itu melalui beberapa proses yaitu :

1. *Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS*
2. *Menerima pendaftaran calon PPK dan PPS*
3. *Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS*
4. *Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS*
5. *Melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS*
6. *Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS*

Selain itu proses pembentukan anggota KPPS dibentuk dengan keputusan ketua PPS dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Brebes. Dan dalam rangka melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, KPU Kabupaten Brebes membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Proses pembentukan PPDP dilakukan secara terbuka melalui pengumuman Ketua KPU Kabupaten Brebes Nomor 165/KPU-Kab-021.329305/VIII/2016 di website KPU Kabupaten Brebes. Kemudian calon anggota PPDP menyampaikan dokumen pendaftaran sebanyak 1 (satu) rangkap kepada PPS. Selanjutnya PPS melakukan seleksi terhadap dokumen persyaratan calon anggota PPDP, dokumen yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan kemudian diusulkan ke KPU Kabupaten Brebes melalui PPK. PPDP terpilih ditetapkan oleh Ketua PPS atas nama KPU Kabupaten Brebes melalui keputusan Ketua PPS dengan masa kerja anggota PPDP selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa proses pembentukan anggota PPK, PPS, KPPS dan anggota PPDP se-Kabupaten Brebes, dalam penyelenggaraan pemilihan. KPU Kabupaten Brebes dibantu oleh badan penyelenggara ad hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Keempat badan penyelenggara tersebut bersifat sementara untuk membantu pemilihan serentak di daerah. Untuk proses pembentukan anggota PPK dan anggota PPS itu melalui beberapa proses yaitu :

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS
2. Menerima pendaftaran calon PPK dan PPS
3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS
4. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS
5. Melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS
6. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS

Selain itu proses pembentukan anggota KPPS dibentuk dengan keputusan ketua PPS dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Brebes. kemudian proses pembentukan PPDP dilakukan secara terbuka melalui pengumuman Ketua KPU Kabupaten Brebes Nomor 165/KPU-Kab-021.329305/VIII/2016 di website KPU Kabupaten Brebes. Setelah semua proses dilakukan PPDP terpilih ditetapkan oleh Ketua PPS atas nama KPU Kabupaten Brebes melalui keputusan Ketua PPS dengan masa kerja anggota PPDP selama 1 (satu) bulan.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Apakah proses pembentukan dan pelantikan anggota PPK, PPS, KPPS dan anggota PPDP se-Kabupaten Brebes sudah terlaksana dengan baik ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Ya seperti yang saya bilang tadi, dalam hal proses pembentukan dan pelantikan anggota PPK, PPS, KPPS dan anggota PPDP se-Kabupaten Brebes tugas dari Sub. Bag. Perencanaan Program dan Data Divisi SDM. Pada saat itu, proses pembentukan dan pelantikan anggota PPK, PPS, KPPS dan anggota PPDP se-Kabupaten Brebes sudah terlaksana dengan baik, sudah mengikuti regulasi yang ada.

Menurut Bapak Heru Kristanto, S.Kom (selaku Ka. Sub. Bag. Program dan Data) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan : *Ini adalah tugas saya dari Sub. Bag. Perencanaan Program dan Data Divisi SDM, pada saat proses pembentukan dan pelantikan anggota PPK, PPS, KPPS dan anggota PPDP se-Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 berjalan dengan baik sesuai apa yang sudah di rencanakan dan sesuai dengan regulasi yang ada pada saat itu.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa proses pembentukan dan pelantikan anggota PPK, PPS, KPPS dan anggota PPDP se-Kabupaten Brebes, semua prosesnya terlaksana dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti. proses pembentukan dan pelantikan anggota PPK, PPS, KPPS dan anggota PPDP se-Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan jawaban dari 2 pertanyaan di atas mengenai pembentukan dan pelantikan anggota PPK, PPS, KPPS, peneliti simpulkan bahwa untuk proses pembentukan anggota PPK dan anggota PPS itu melalui beberapa proses yaitu :

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS
2. Menerima pendaftaran calon PPK dan PPS
3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS
4. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS

5. Melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS
6. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS

Dan proses pembentukan dan pelantikan anggota PPK, PPS, KPPS dan anggota PPDP se-Kabupaten Brebes, semua prosesnya terlaksana dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Walaupun selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 berlangsung, ada 5 (lima) kali dilakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota PPK. Adapun alasan adanya PAW anggota PPK yaitu adanya anggota PPK yang telah diterima sebagai pendamping desa, pindah keluar kota dan melanggar kode etik.

d. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Apa saja tahapan penyusunan DPS, DPT dan proses pencatatan DPTb ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Proses Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini juga termasuk tugasnya dari Sub. Bag. Perencanaan Program dan Data, Divisi Data dan Informasi. Keseluruhan proses tahapan penyusunan DPS, DPT dan proses pencatatan DPTb sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015, dalam pasal 1 ayat 24 menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan

cara melakukan verifikasi faktual data pemilih, data tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. KPU Kabupaten Brebes sebelum melakukan pemutakhiran daftar pemilih membentuk kelompok kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang di tetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 040/Kpts/KPU-Kab-012. 329305/2016 tentang kelompok kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 Tahun Anggaran 2016.

Menurut Bapak Heru Kristanto, S.Kom (selaku Ka. Sub. Bag.

Program dan Data) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Saya selaku yang bertanggungjawab dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, untuk penyusunan DPS, DPT, dan proses pencatatan DPTb itu ada tahapannya masing-masing diantaranya:

- a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara*
 - 1. Pengelolaan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4)*
 - 2. Penyusunan daftar pemilih*
 - 3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran*
 - 4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)*
- b. Penyusunan daftar pemilih tetap*
 - 1. Rapat kerja dan koordinasi persiapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT)*
 - 2. Rekapitulasi daftar pemilih tetap*
- c. Proses pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)*

Pemilih yang telah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, dalam hal belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga Kabupaten Brebes yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara menggunakan KTP-elektrik atau surat keterangan dari Disdukcapil Kabupaten Brebes kemudian pemilih tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di

simpulkan bahwa proses tahapan penyusunan DPS, DPT dan proses

pencatatan DPTb berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015, dalam pasal 1 ayat 24 menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih, data tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.. Dan untuk penyusunan DPS, DPT, dan proses pencatatan DPTb itu ada tahapannya masing-masing diantaranya:

- a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
 1. Pengelolaan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4)
 2. Penyusunan daftar pemilih
 3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran
 4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- b. Penyusunan daftar pemilih tetap
 1. Rapat kerja dan koordinasi persiapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT)
 2. Rekapitulasi daftar pemilih tetap
- c. Proses pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pemilih yang telah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, dalam hal belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga Kabupaten Brebes yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara menggunakan KTP-elektrik atau surat keterangan dari Disdukcapil Kabupaten Brebes kemudian pemilih tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Persoalan apa saja yang muncul dalam proses tahapan penyusunan DPS, DPT dan DPTb ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Permasalahannya terdapat data NIK dan NKK invalid, masyarakat kurang aktif dalam melihat apakah sudah masuk dalam DPS ataupun DPT, masih banyak data pemilih yang belum ber KPT-Elektrik. Solusi dari persoalan tersebut data diteliti ulang untuk dicocokkan dengan buku induk di kelurahan, memperbanyak sosialisasi mengenai DPS maupun DPT, PPS menghimbau masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-Elektronik.

Menurut Bapak Heru Kristanto, S.Kom (selaku Ka. Sub. Bag. Program dan Data) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Persoalannya ya aturan/Juknis coklit pemilih mengalami perubahan di tengah jalan (pengecekan pemilih ber KTP-EL dan tidak ber KTP-EL), pemilih yang sudah dimasukkan dalam portal mengalami perubahan (data yang sudah diajukan oleh PPS tidak muncul dalam DPS maupun DPT), banyak ditemukan pemilih dengan NIK,

Nama dan Tanggal lahir yang sama (ganda) serta NIK sama tetapi dengan nama yang berbeda, data awal yang diterima untuk cokolit banyak yang tidak sesuai dengan data riil. Solusinya yaitu mengundang kembali sebagian pemilih yang telah dicoklit, pemilih tersebut dimasukkan dalam DPTb saat menggunakan hak pilihnya, setelah dilakukan kroscek di lapangan ada yang benar-benar orangnya sama dan ada pula orangnya berbeda, dilakukan kroscek langsung perbaikan.

Gambar V.1
Keterangan Rincian Pengembalian Formulir C6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

NO	KETERANGAN	JUMLAH
	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	
1	2	3
1	MENINGGAL DUNIA	9.014
2	PINDAH ALAMAT	12.857
3	TIDAK DIKENAL	19.951
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	195.498
5	LAIN-LAIN	69.356
TOTAL		306.676

Sumber : Divisi Perencanaan Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa Persoalan yang muncul dalam proses tahapan penyusunan DPS, DPT dan DPTb dan solusinya yaitu terdapat data NIK dan NKK invalid, masyarakat kurang aktif dalam melihat apakah sudah masuk dalam DPS ataupun DPT, masih banyak data pemilih yang belum ber KPT-Elektrik, aturan/Juknis cokolit pemilih mengalami perubahan di tengah jalan (pengecekan pemilih ber KTP-EL dan tidak ber KTP-EL), pemilih yang sudah dimasukkan dalam portal mengalami perubahan (data yang sudah diajukan oleh PPS tidak muncul dalam DPS maupun DPT), banyak ditemukan pemilih

dengan NIK, Nama dan Tanggal lahir yang sama (ganda) serta NIK sama tetapi dengan nama yang berbeda, data awal yang diterima untuk cokolit banyak yang tidak sesuai dengan data riil. Solusi dari permasalahannya data diteliti ulang untuk dicocokkan dengan buku induk di kelurahan, memperbanyak sosialisasi mengenai DPS maupun DPT, PPS menghimbau masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-Elektronik, mengundang kembali sebagian pemilih yang telah dicokolit, pemilih tersebut dimasukkan dalam DPTb saat menggunakan hak pilihnya, setelah dilakukan kroscek di lapangan ada yang benar-benar orangnya sama dan ada pula orangnya berbeda, dilakukan kroscek langsung perbaikan.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apa saja langkah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam proses pelayanan hak pilih warga Kabupaten Brebes yang belum terdaftar dalam DPT dan belum memiliki E-KTP ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Dalam hal proses pelayanan hak pilih warga Kabupaten Brebes yang belum terdaftar dalam DPT dan belum memiliki E-KTP menempuh beberapa langkah agar warga/masyarakat Kabupaten Brebes dapat menggunakan hak pilihnya. Pada saat itu kita membuat surat edaran terhadap penyelenggara tingkat bawah dan kita KPU Kabupaten Brebes ikut serta dengan Disdukcapil melakukan perekaman KTP-EL keliling wilayah Kabupaten Brebes yang masih banyak belum melakukan perekaman KTP-EL.

Menurut Bapak Heru Kristanto, S.Kom (selaku Ka. Sub. Bag.

Program dan Data) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Dalam rangka pelayanan hak pilih warga Kabupaten Brebes yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan belum memiliki KTP-Elektrik, KPU Kabupaten Brebes menempuh beberapa langkah diantaranya :

- 1. Membuat surat edaran terhadap penyelenggara tingkat bawah agar menghimbau penduduk Kabupaten Brebes yang belum memiliki KTP-Elektrik atau Surat Keterangan pengganti KTP-Elektrik agar segera melakukan perekaman KTP-Elektrik.*
- 2. Ikut serta dengan Disdukcapil melakukan perekaman KTP-Elektrik keliling kantong-kantong penduduk Kabupaten Brebes yang banyak belum melakukan perekaman KTP-Elektrik.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di

simpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam proses pelayanan hak pilih warga Kabupaten Brebes yang belum terdaftar dalam DPT dan belum memiliki E-KTP, Kabupaten Brebes menempuh beberapa langkah diantaranya :

1. Membuat surat edaran terhadap penyelenggara tingkat bawah agar menghimbau penduduk Kabupaten Brebes yang belum memiliki KTP-Elektrik atau Surat Keterangan pengganti KTP-Elektrik agar segera melakukan perekaman KTP-Elektrik.
2. Ikut serta dengan Disdukcapil melakukan perekaman KTP-Elektrik keliling kantong-kantong penduduk Kabupaten Brebes yang banyak belum melakukan perekaman KTP-Elektrik.

Berdasarkan jawaban dari 3 pertanyaan di atas mengenai Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, proses tahapan penyusunan DPS, DPT dan proses pencatatan DPTb berdasarkan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015, dalam pasal 1 ayat 24 menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih, data tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.. Dan untuk penyusunan DPS, DPT, dan proses pencatatan DPTb itu ada tahapannya masing-masing diantaranya:

- a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
 - 1. Pengelolaan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4)
 - 2. Penyusunan daftar pemilih
 - 3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran
 - 4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- b. Penyusunan daftar pemilih tetap
 - 1. Rapat kerja dan koordinasi persiapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT)
 - 2. Rekapitulasi daftar pemilih tetap
- c. Proses pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pemilih yang telah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, dalam hal belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga Kabupaten Brebes yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara menggunakan KTP-elektrik atau surat keterangan dari Disdukcapil Kabupaten Brebes kemudian pemilih tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan. Persoalan yang muncul dalam proses tahapan penyusunan DPS, DPT dan DPTb dan solusinya yaitu terdapat data NIK dan NKK invalid, masyarakat kurang aktif dalam melihat apakah sudah masuk dalam DPS ataupun DPT, masih banyak data pemilih yang belum ber KPT-Elektrik, aturan/Juknis coklit pemilih mengalami perubahan di tengah jalan (pengecekan pemilih ber KTP-EL dan tidak ber KTP-EL), pemilih yang sudah dimasukkan dalam portal mengalami perubahan (data yang sudah diajukan oleh PPS tidak muncul dalam DPS maupun DPT), banyak ditemukan pemilih dengan NIK, Nama dan Tanggal lahir yang sama (ganda) serta NIK sama tetapi dengan nama yang berbeda, data awal yang diterima untuk coklit banyak yang tidak sesuai dengan data riil. Solusi dari permasalahannya data diteliti ulang untuk dicocokkan dengan buku induk di kelurahan, memperbanyak sosialisasi mengenai DPS maupun DPT, PPS menghimbau masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-

Elektronik, mengundang kembali sebagian pemilih yang telah dicoklit, pemilih tersebut dimasukkan dalam DPTb saat menggunakan hak pilihnya, setelah dilakukan kroscek dilapangan ada yang benar-benar orangnya sama dan ada pula orangnya berbeda, dilakukan kroscek langsung perbaikan. Dan untuk pelayanan hak pilih warga Kabupaten Brebes yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan belum memiliki KTP-Elektrik, KPU Kabupaten Brebes menempuh beberapa langkah diantaranya :

1. Membuat surat edaran terhadap penyelenggara tingkat bawah agar menghimbau penduduk Kabupaten Brebes yang belum memiliki KTP-Elektrik atau Surat Keterangan pengganti KTP-Elektrik agar segera melakukan perekaman KTP-Elektrik.
2. Ikut serta dengan Disdukcapil melakukan perekaman KTP-Elektrik keliling kantong-kantong penduduk Kabupaten Brebes yang banyak belum melakukan perekaman KTP-Elektrik.

B. Tahap Penyelenggaraan

a. Pencalonan

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Persoalan apa saja yang muncul dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, dan bagaimana solusinya dari persoalan tersebut ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Dalam hal pencalonan untuk menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 pada saat itu, secara prinsip tidak ada persoalan yang berarti, hanya saja ada salah satu pasangan calon yang mendaftarkan pasangan calon wakilnya mendaftar di hari terakhir, padahal pada saat itu pencalonan dilakukan hanya waktu 3 (tiga) hari. Kemarin sih tidak ada masalah ya, Cuma kalau pada saat itu terjadi kekurangan berkas-berkas maka akan merepotkan mereka (pasangan calon). Solusi dari persoalan tersebut, ya kita (KPU Kabupaten Brebes) berharap para calon dari partai politik kalau mendaftar di awal jangan di akhir pendaftaran jadi kalau ada kekurangan berkas bisa diselesaikan.

Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, waktu itu tidak persoalan yang berat, ya pada saat itu saya ingat ada salah satu pasangan calon yang mendaftar pada hari terakhir. Dan itu masih bisa diatasi dan berkas-berkas pendaftarannya pun lengkap. Solusi dari persoalan tersebut, ya berharap agar para calon dari partai politik jika mendaftar harus dilakukan di awal jangan di akhir pendaftaran jadi kalau ada kekurangan berkas tidak merepotkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam tahapan pencalonan tidak ada persoalan yang berarti yang muncul dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, hanya saja ada salah satu pasangan calon yang mendaftarkan pasangan calon wakilnya mendaftar di hari terakhir. Solusi dari persoalan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes berharap para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes dari partai politik mendaftarkan diri

di awal jangan di akhir pendaftaran jadi kalau ada kekurangan berkas bisa diselesaikan.

b. Kampanye

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Apa saja tahapan jadwal kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan apakah jadwal kampanye sudah terlaksana dengan baik ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Jadwal kampanye dilaksanakan melalui 1. Rapat Koordinasi Kampanye yang berisi rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kampanye dan ikrar damai yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 15 oktober 2016 pukul 10.00 WIB bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Brebes dengan agenda teknis pelaksanaan kampanye, alat peraga kampanye dan waktu pelaksanaan kampanye, 2. Kampanye Ikrar Damai dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB di Gedung KORPRI Kabupaten Brebes. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato politiknya dilanjutkan dengan pelaksanaan konvoi damai oleh kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 beserta simpatisan kurang lebih 100 orang, dengan 25 mobil tiap pasangan calon yang dimulai pukul 16.00 WIB dengan rute perjalanan Jatibarang – Ketanggungan – Pejagan – Wanasari - Brebes. Pelaksanaan jadwal kampanye berlangsung dengan baik, dan sesuai dengan yang direncanakan.

Adapun pendapat Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Jadwal kampanye yang sudah kami buat diserahkan kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun

2017 agar jadwal pelaksanaan kampanye dilaksanakan dengan baik dan damai. Kegiatannya meliputi :

1. Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1

No	Bentuk Kampanye	Waktu	Tempat
1.	Kampanye damai yang diselenggarakan KPU Kabupaten Brebes	Hari : Jum'at Tanggal : 28 Oktober 2016 Pukul : 13.00- 17.00 WIB.	Gedung KORPRI Kabupaten Brebes
2.	Pembentukan Tim Sukses	Hari : Kamis- Sabtu. Tanggal : 03 s/d 12 November 2016. Pukul : 07.00- 21.00 WIB.	Ketanggungan, Brebes, Losari, Wanasari, Paguyangan, Bulakamba, Jatibarang, Songgom, Tanjung, Bumiayu, Banjarharjo, Kersana, Sirampog, Larangan, Salem dan Bantarkawung.
3.	Silaturahmi, Sosialisasi dan Blusukan	Hari : Kamis- Kamis. Tanggal : 17 s/d 24 November 2016. Pukul : 07.00- 21.00 WIB.	Desa Tengguli Kec. Tanjung, Bumiayu Kec. Bumiayu, Ketanggungan, Bulakamba, Desa Tambakserang Kec. Bantarkawung, Desa Cilibur Kec. Pguyangan.
4.	Silaturahmi, Sosialisasi dan Blusukan	Hari : Sabtu- Minggu. Tanggal : 19 s/d 27 November 2016. Pukul : 07.00- 21.00 WIB.	Berkunjung ke pasar Ketanggungan, di Pasar Losari, Berkunjung ke Pasar Linggapura Kec. Tonjong, dll.

Sumber : Buku Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes

2017.

2. Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2

No	Bentuk Kampanye	Waktu	Tempat
1.	Kampanye damai yang diselenggarakan KPU Kabupaten Brebes	Hari : Jum'at Tanggal : 28 Oktober 2016 Pukul : 13.00-17.00 WIB.	Gedung KORPRI Kabupaten Brebes
2.	Kampanye Dialogis	Hari : Selasa-Jum'at. Tanggal : 1 s/d 4 November 2016 Pukul : 07.00-22.00 WIB.	Pasar Linggapura, Tonjong, Tanggeran, Purwodadi, Pepedan, Watujaya, Purbayasa, Talok, Pasar Induk, Jatisawit, Laren, Kalisumur, nagaradaha, dll
3.	Kampanye Dialogis	Hari : Sabtu-Selasa. Tanggal : 5-8 November 2016. Pukul : 07.00-22.00 WIB.	Pasar Losari, Pasar Limbangan Kec. Losari, ke Kampung Bumiayu, Pasar Sirampog, Pasar Jatibarang, Klampis, Pasar Larangan, Sitanggal, Pasar Songgom dan Jatorokeh.
4.	Kampanye Dialogis	Hari : Rabu-Minggu. Tanggal : 9-13 November 2016. Pukul : 07.00-22.00 WIB.	Ke Tokoh Masyarakat Kec. Tonjong, Pasar Songgom, Jatirokeh, pasar Larangan, Salatiri, Sitanggal, pasar Bantarkawung, dll.
5.	Kampanye Dialogis	Hari : Senin-Minggu. Tanggal : 14-20 November 2016. Pukul : 07.00-22.00 WIB.	Pasar Brebes, Rapat DPC, PDIP Brebes, pengajian di Kel. Limbangan Kec. Brebes, Pasar PKL/Jatisawit, Pasar Wage, dll.
6.	Silaturahmi, Sosialisasi dan Blusukan	Hari : Senin-Rabu.	Pasar Jatibarang, pasar ayam

		Tanggal : 21-23 November 2016. Pukul : 07.00-21.00 WIB.	kelompok, pasar Sawojajar dan pasar bawang Kelampok, dll.
7.	Silaturahmi, Sosialisasi dan Blusukan	Hari : Kmis-Minggu. Tanggal : 24-27 November 2016. Pukul : 07.00-21.00 WIB.	Blusukan di Desa Negla, Karangjunti, Karangsambung, Bojongsari, dll.
8,	Silaturahmi, Sosialisasi dan Blusukan	Hari : Senin-Rabu. Tanggal : 28-30 November 2016. Pukul : 07.00-21.00 WIB.	Pengajian di Ds. Padakaton, Blusukan di Ds. Ciduwet Kec. Ketanggungan, Ds. Dukuhlo Kec. Bulakamba, Blusukan di Kec. Salem, dan menghadiri Pengajian di Ds.Kubangwungu, dll.

Sumber : Buku Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes

2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam tahapan jadwal kampanye sudah terlaksana dengan baik, damai dan sesuai yang direncanakan.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Persoalan apa saja yang muncul dalam tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Tidak ada pelanggaran yang fatal, cuman Tim relawan banyak yang tidak dilaporkan ini persoalan di kampanye. Kalau jadwal kampanye sudah kita bikin dan tidak ada pelanggaran jadwal kampanye. Pelanggaran ini kaitannya dengan Tim relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes banyak yang tidak di daftarkan ke KPU Kabupaten Brebes. Solusinya ya agar semua Tim relawan itu di daftarkan ke KPU Kabupatenn Brebes sehingga bisa lebih di koordinasikan lagi. Kalau dalam permasalahan kampanye bisa ditanyakan ke Bawaslu Kabupaten Brebes barangkali ada laporan-laporan pelanggaran karena kan mereka yang lebih fokus terkait kegiatan pengawasannya.

Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Kampanye di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 itu ya relatif minim tidak terlalu banyak masalah, karena jadwal sudah kita siapkan ya tinggal melaksanakan saja kampanyenya. Kampanye kan cenderung perannya si calon ya, yang diawasi oleh bawaslu ya tidak ada masalah ya. Pelanggaran-pelanggaran di sana-sini yang sifatnya ringan itu wajar. Solusinya ya kita dari semua elemen masyarakat harus mengawal jalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes agar persoalan-persoalan yang muncul tidak terulang lagi dikemudian hari.

Adapun pendapat dari Bapak Iman Syah Budiono, SH. (selaku Ka. Sub. Bag. Hukum) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Kalau masalah kampanye memang lumrah, banyak terjadi dilapangan. Tapi untuk KPU sendiri sudah memberikan jadwal untuk masing-masing Paslon melakukan kampanye. Memang waktu itu ada persoalan di anggota PPK ada yang tidak netral/melanggar kode etiknya tapi kami (KPU Kabupaten Brebes) langsung bertindak dan melakukan pemberhentian kepada oknum yang bersangkutan, dan KPU langsung membuat SK Pengganti Antar Waktu (PAW). Solusi dari permasalahannya ya kita bukan hanya dari pihak KPU Kabupaten Brebes saja yang mengawal jalannya pemilihan, tetapi

harus dari semua elemen masyarakat, dan instansi pemerintahan agar jalannya pemilihan berjalan tanpa permasalahan.

Adapun argumen Bapak Wakro, S.IP. (selaku Ketua Bawaslu

Kabupaten Brebes) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Pada saat itu kan yang menjadi Ketua Pak kuntoro Tayubi yah, nah saat itu kita masih menjadi badan ad hoc (PANWASLU). Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, persoalan yang muncul pada masa kampanye setidaknya ada dua persoalan, pertama salah satu paslon calon adalah incumbent yang maju untuk kedua kalinya, potensi untuk terjadinya mobilisasi ASN atau unsur-unsur birokrasi sangat terasa bahkan sampai di tingkat desa. Kedua adanya ketidak netralan/pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tim Penyelenggara Pemilihan yaitu oknum anggota PPK. Ketiga regulasi yang digunakan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Solusi dari persoalan yang ada yaitu dikuatkannya aturan hukum yang mendasari pelaksanaan Pilkada tersebut agar meminimalisir permasalahan yang terjadi.

Adapun Pendapat Bapak Teguh Turmudi (selaku Ketua DPD

Partai Golkar Kabupaten Brebes) pada tanggal 8 Januari 2020, mengatakan:

Jadi kalau tahapan kampanye dari sisi tim pengusung pasangan calon itu tidak ada masalah karena kita melihatnya secara subyektif dan kita kan calonnya menang jadi ya merasa tidak ada persoalan yang berarti, karena itu sudah di manajemen oleh tim kampanyenya pasangan calon. Dan tim kampanyenya meliputi dari beberapa partai pengusung dan partai pendukung calon sehingga ditahapan itu praktis kita diskusikan bersama, walaupun iya muncul dinamika mungkin pada saat penyusunan jadi pada saat keputusan kita sudah jalankan dengan baik.

Adapun sanggahan dari Bapak Syafaat (selaku Ketua Tim

Sukses Pasangan Calon Suswono dan Ahmad Musttaqin DPD Partai

PKS Kabupaten Brebes), pada tanggal 13 Januari 2020, mengatakan :

Jadi pada saat itu sebenarnya pada tahapan kampanye ketika dilapangan banyak terjadi persoalan akan tetapi susah diungkapkan dan dibuktikan, jika saya bilang tidak ada apa-apa pada tahapan kampanye itu tidak mungkin. Jadi walaupun dibuktikan datanya sulit dan ini sudah lama dilaksanakan data-datanyapun harus dicari-cari

lagi. Solusinya ya harus dikawal prosesnya agar tidak terjadi permasalahan pada saat kampanye.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam tahapan kampanye ada persoalan-persoalan. Ada beberapa pendapat mengenai persoalan yang muncul dalam tahapan kampanye. Menurut beberapa narasumber seperti KPU Kabupaten Brebes, Bawaslu Kabupaten Brebes dan ketua Tim sukses dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes dengan nomor 1 (satu) itu adanya permasalahan yang terjadi pada tahapan kampanye. Menurut pihak KPU Kabupaten Brebes dan Bawaslu permasalahan itu datang dari tim relawan kampanye dari parpol pengusung dan ketidak netralan oknum anggota PPK. Dan menurut Ketua Tim Kampanye dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) yaitu paslon Suswono dan Ahmad Musttaqin bahwa ada banyak permasalahan yang terjadi pada saat kampanye tapi bukti-bukti itu tidak kuat. Kemudian ada pendapat dari partai pengusung pasangan calon yang memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yaitu dari partai golkar sendiri tidak mempermasalahkan apa-apa yang menjadi persoalan dari tahapan kampanye, semuanya berjalan dengan baik. Solusi dari permasalahan yang ada dalam tahapan kampanye yaitu agar semua Tim relawan di daftarkan ke KPU Kabupaten Brebes sehingga bisa lebih di koordinasikan lagi dan juga semua elemen masyarakat harus mengawal jalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes agar

persoalan-persoalan yang muncul tidak terulang lagi dikemudian hari. Dan dikuatkannya aturan hukum yang mendasari pelaksanaan Pilkada tersebut.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim penyelenggara pemilihan dalam tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? jika ada, apakah ada sanksi yang diberikan? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut agar tidak terulang kembali ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Bentar mba saya ingat-ingat dulu ya, oh iya ada mba. Waktu itu ada pelanggaran itu laporan dari masyarakat dan dari Pihak Bawaslu Kabupaten Brebes pun ikut memberitahu kami (KPU Kabupaten Brebes) bahwa ada temuan pelanggaran yang dilakukan oleh tim penyelenggara itu anggota PPK Kecamatan Larangan yang melanggar kode etik/tidak netral ya mba. Dan kita (KPU Kabupaten Brebes) langsung menghentikan oknum anggota PPK tersebut dan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk PPK Larangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati saat itu. Solusi untuk penyelenggaraan pemilihan agar tidak terulang kembali hal yang sama kita perlu memaksimalkan tim pemantau penyelenggaraan pemilihan dan memberikan pemahaman dan selalu mengingatkan kepada tim penyelenggara terutama badan ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) agar menjaga netralitas dan kode etiknya.

Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Iya benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tim penyelenggara, waktu itu tim penyelenggara tingkat bawah PPK dan

KPU melakukan tindakan ya berupa pemberhentian. Kemudian pertama ya diklarifikasi baik kalo memang ternyata terbukti ya baik itu sebuah pengakuan ataupun memang dengan bukti-bukti yang ada dari laporan masyarakat, ya KPU Kabupaten Brebes akan melakukan tindakan pemberhentian dari mulai teguran ya, terus kemudian kalau memang dirasa pelanggarannya berat ya langsung diberhentikan. Kalau KPU sendirikan dari awal sudah melakukan pembentukan badan adhoc ya PPK, PPS, dan KPPS ketika dilantik kan juga ada sumpah terus ada penandatanganan fakta integritas itu kan isinya mengenai norma-norma pemilu/pilkada itu dimulai dari situ, kita ya dari situ berharap supaya tidak ada pelanggaran pada saat melakukan tugasnya, ya kalo ternyata mereka mengingkari sumpahnya atau pakta integritasnya yang sudah ditanda tangani sendiri nanti ada sanksi yakan, solusinya seperti itu ya mulai dari pertama itu memang ada aturannya pelantikannya itukan melalui sumpahkan, terus kemudian penandatanganan pakta integritas yakan, terus selain itu ada pembinaan supaya tidak melanggar norma-norma yang ada di kepemiluan.

Menurut Bapak Iman Syah Budiono, SH. (selaku Ka. Sub. Bag.

Hukum) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Iya mba terjadi pelanggaran saat itu yang dilakukan oleh anggota PPK ya, waktu itu PPK Larangan yang melanggar tidak menjaga netralitasnya mba, kalo tidak salah penyebabnya itu mendukung salah satu pasangan calon (Suswono dan Ahmad Musttaqin) karena dulunya ada hutang budi. Kami pun pada saat itu langsung mengambil tindakan memanggil oknum tersebut untuk diklarifikasi, setelah itu mengakui kebenarannya oknum tersebut membuat surat pernyataan untuk pengunduran diri dan kami (KPU Kabupaten Brebes) memberikan SK Pemberhentian kepada yang bersangkutan. Kemudian kami (KPU Kabupaten Brebes) membuat SK pergantian Antar Waktu untuk PPK Larangan. Solusi untuk pemilihan selanjutnya ya kami (KPU Kabupaten Brebes) akan memberi pembinaan, selalu mengingatkan dan menegaskan untuk menjaga netralitas dan pakta integritasnya.

Menurut Bapak Wakro, S.IP. (selaku Ketua Bawaslu

Kabupaten Brebes) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Oh pelanggaran ya pasti ada mba tapi kebanyakan pelanggaran pada saat kampanye itu dilakukan oleh tim relawan kampanye, tapi untuk tim penyelenggara pemilihan dalam hal ini kan KPU Kabupaten Brebes ya, ada pelanggaran mba itu berawal dari laporan masyarakat yang dilaporkan ke pihak Panwaslu Brebes pada saat itu. Dan kemudian kami memberitahukan kepada KPU

bahwa ada tim penyelenggara pemilihan yang melakukan pelanggaran yaitu oknum anggota PPK dari Kecamatan Larangan yang tidak netral karena menuliskan status memihak/mendukung salah satu pasangan calon di media sosial (Facebook) dan disitu KPU kabupaten Brebes langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan langsung melakukan pemberhentian kepada oknum anggota PPK Larangan dan mengganti dengan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Dan solusinya dari pihak bawaslu/panwaslu sendiri ya untuk pemilihan berikutnya diharapkan dari tim penyelenggara pemilihan untuk menjaga pakta integritas dan netralitasnya. Dan kami pun akan memaksimalkan tugas pengawasan agar tidak terjadi lagi pelanggaran pada saat pemilihan.

Menurut Bapak Teguh Turmudi (selaku Ketua DPD Partai

Golkar Kabupaten Brebes) pada tanggal 8 Januari 2020, mengatakan:

Ya kalo untuk tim penyelenggara pemilihan sih ya mba pada waktu itu sih kayanya ada cuman ya saya dengar pihak KPU nya langsung memberi tindakan pemberhentian. Solusinya ya untuk jajaran KPU Kabupaten Brebes beserta badan adhocnya harus menjaga kode etik dan kenetralannya.

Menurut Bapak Syafaat (selaku Ketua Tim Sukses Pasangan

Calon Suswono dan Ahmad Musttaqin DPD Partai PKS Kabupaten

Brebes), pada tanggal 13 Januari 2020, mengatakan :

Waktu itu ya mba saya agak lupa cuman ya kalo mungkin ada pelanggaran pasti KPU Kabupaten Brebes langsung memberi tindakan. Solusinya ya agar KPU Kabupaten Brebes selalu komitmen dalam menjaga netralitas dan kode etiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam tahapan kampanye ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim penyelenggara pemilihan laporan tersebut berawal dari masyarakat yang dilaporkan ke Panwaslu Brebes. Dan kemudian Panwaslu Kabupaten Brebes memberitahukan kepada KPU bahwa ada tim penyelenggara pemilihan yang melakukan pelanggaran yaitu oknum anggota PPK dari Kecamatan Larangan

yang tidak netral karena menuliskan status memihak/mendukung salah satu pasangan calon di media sosial (Facebook) dan disitu KPU kabupaten Brebes langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan langsung melakukan pemberhentian kepada oknum anggota PPK Larangan dan mengganti dengan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Solusi agar tidak terulang untuk pemilihan berikutnya yaitu ada pada pelantikan badan adhoc yang berisi aturan-aturan norma-norma kepemiluan dan adanya pengucapan sumpah, kemudian penandatanganan pakta integritas. Selain itu harus ada pembinaan supaya tidak melanggar norma-norma yang ada di kepemiluan. Dan selalu mengingatkan dan menegaskan untuk menjaga netralitas, kode etik dan pakta integritasnya.

Berdasarkan jawaban dari 3 pertanyaan di atas mengenai tahapan kampanye yaitu tentang pelaksanaan jadwal tahapan kampanye terlaksana dengan baik, aman, damai dan sesuai rencana. Dan untuk persoalan yang muncul dalam tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dan pelanggaran yang dilakukan oleh tim penyelenggara pemilihan dalam tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 disimpulkan bahwa . Ada beberapa pendapat mengenai persoalan yang muncul dalam tahapan kampanye. Menurut beberapa narasumber seperti KPU Kabupaten Brebes, Bawaslu Kabupaten

Brebes dan ketua Tim sukses dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes dengan nomor 1 (satu) itu adanya permasalahan yang terjadi pada tahapan kampanye. Menurut pihak KPU Kabupaten Brebes dan Bawaslu permasalahan itu datang dari tim relawan kampanye dari parpol pengusung dan ketidak netralan oknum anggota PPK. Dan menurut Ketua Tim Kampanye dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) yaitu paslon Suswono dan Ahmad Musttaqin bahwa ada banyak permasalahan yang terjadi pada saat kampanye tapi bukti-bukti itu tidak kuat. Dan ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim penyelenggara pemilihan laporan tersebut berawal dari masyarakat yang dilaporkan ke Panwaslu Brebes. Dan kemudian Panwaslu Kabupaten Brebes memberitahukan kepada KPU Kabupaten Brebes bahwa ada tim penyelenggara pemilihan yang melakukan pelanggaran yaitu oknum anggota PPK dari Kecamatan Larangan yang tidak netral karena menuliskan status memihak/mendukung salah satu pasangan calon di media sosial (Facebook) dan disitu KPU kabupaten Brebes langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan langsung melakukan pemberhentian kepada oknum anggota PPK Larangan dan mengganti dengan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Solusi dari permasalahan yang ada dalam tahapan kampanye yaitu agar semua Tim relawan di daftarkan ke KPU Kabupaten Brebes sehingga bisa lebih di koordinasikan lagi

dan juga semua elemen masyarakat harus mengawal jalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes agar persoalan-persoalan yang muncul tidak terulang lagi dikemudian hari. Dan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh badan adhoc harus ada pembinaan supaya tidak melanggar norma-norma yang ada di kepemiluan. Dan selalu mengingatkan dan menegaskan untuk menjaga netralitas, kode etik dan pakta integritasnya.

c. Laporan Dana Kampanye

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Persoalan apa saja yang muncul dalam tahapan laporan dana kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Seluk beluk pendanaan kampanye serta mekanisme pertanggung jawabannya sendiri kan telah diatur sedemikian rupa oleh Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota penyelenggara pemilihan dalam bentuk keputusan tentang pedoman teknis ya. Jadi untuk pelaporan dana kampanye nya sendiri di sini tugasnya dari Divisi Hukum, pada waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati saya rasa tidak ada persoalan semua dikelola sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama.

Menurut Bapak Iman Syah Budiono, SH. (selaku Ka. Sub. Bag. Hukum) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Untuk dana kampanye bisa dilihat sendiri di Ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa dana kampanye wajib diperoleh, dikelola dan dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan.hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing pasangan calon peserta pemilihan. Sebagaimana diketahui, bahwa ketidak patuhan serta pelanggaran pelaporan dana kampanye dapat berakibat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Dan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tidak ada persoalan mengenai laporan dana kampanye dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati patuh dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam tahap laporan dana kampanye disimpulkan bahwa, Untuk dana kampanye bisa dilihat sendiri di Ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa dana kampanye wajib diperoleh, dikelola dan dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan.hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing pasangan calon peserta pemilihan. tidak ada persoalan, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam laporan dana kampanye patuh dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan untuk persoalan dana kampanye, tidak ada persoalan semua dikelola sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama.

d. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Bagaimanakah persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Brebes dalam proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Ini tugasnya Divisi bagian keuangan, umum dan logistik ya, kalo menurut saya sendiri sih pada saat memantau sekaligus mengawal persiapan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara itu Alhamdulillah berjalan sesuai rencana dan kami (KPU Kabupaten Brebes) sangat mempersiapkan proses dari pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ya walaupun masih ada beberapa kendala ya. Saat persiapan pasti kita (KPU Kabupaten Brebes) terlebih dahulu menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta penginput kedalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) ya mba, lalu penyusunan HPS. Kemudian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/lelang serta penetapan penyedia barang/pemenang kurang lebih seperti itu mba persiapannya.

Menurut Bapak Andi Budi Harjanto, ST. (selaku Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Dalam persiapan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 itu berjalan dengan baik, lancar dan maksimal ya Alhamdulillah. Persiapan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suaranya sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 dijadwalkan pada tanggal 3 November 2016 sampai dengan 22 Januari 2017. Sebelum melakukan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Brebes telah melakukan langkah-langkah persiapan diantaranya :

- 1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta menginput ke dalam Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan mengumumkan melalui laman KPU Kabupaten Brebes.*
- 2. Penyusunan HPS, Sertifikasi Teknis dan Kontrak*

3. *Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa/Lelang serta Penetapan Penyedia/Pemenang.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, persiapan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 dijadwalkan pada tanggal 3 November 2016 sampai dengan 22 Januari 2017. Sebelum melakukan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Brebes telah melakukan langkah-langkah persiapan diantaranya :

1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta menginput ke dalam Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan mengumumkan melalui laman KPU Kabupaten Brebes.
2. Penyusunan HPS, Sertifikasi Teknis dan Kontrak
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa/Lelang serta Penetapan Penyedia/Pemenang.
- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Bagaimanakah proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Di dalam proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada waktu itu juga berjalan dengan sesuai rencana dan aman walaupun terkendala hujan lebat, banjir di beberapa wilayah Kabupaten Brebes dan kendala lainnya. Dalam proses pendistribusiannya dikawal oleh petugas dari Polres Brebes serta pengawasan dari KPU Kabupaten Brebes sendiri. Pendistribusian logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 menggunakan jasa pihak ketiga berupa kendaraan truk pengangkut serta pada waktu itu dikawal oleh salah satu Sekretariat KPU Kabupaten Brebes dan dilaksanakan mulai tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017.

Menurut Bapak Andi Budi Harjanto, ST. (selaku Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suaranya dilakukan mulai dari tanggal 12 Januari sampai dengan 4 Februari 2017. Kami (KPU Kabupaten Brebes) melakukan pengesetan dan pengepakan logistik lainnya berupa formulir, tinta, bantalan alat coblos, segel, sampul kertas suara, sampul hitung cepat, tanda pengenalan KPPS, tanda pengenalan saksi, lem, karet, benang, dan beberapa alat tulis dan lain-lainnya untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, digembok dan disegel,. Kotak suara yang telah digembok dan disegel dikelompokkan perkecamatan, per PPS, dan per TPS untuk memudahkan pendistribusian. Proses pendistribusian logistik dikawal oleh 1 (satu) staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes serta aparat dari Polsek masing-masing. Logistik dari PPK kemudian diteruskan ke seluruh PPS dan masing-masing TPS dengan pengawalan petugas Linmas dan petugas dari Polsek. Adapun pelaksanaan pendistribusian logistik dari PPK ke PPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pencoblosan, dari PPS ke TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pencoblosan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa proses pendistribusian perlengkapan pemungutan

dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suaranya dilakukan mulai dari tanggal 12 Januari sampai dengan 4 Februari 2017. Proses pendistribusian logistik dikawal oleh 1 (satu) staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes serta aparat dari Polsek masing-masing. Logistik dari PPK kemudian diteruskan ke seluruh PPS dan masing-masing TPS dengan pengawalan petugas Linmas dan petugas dari Polsek. Adapun pelaksanaan pendistribusian logistik dari PPK ke PPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pencoblosan, dari PPS ke TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pencoblosan.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Persoalan apa saja yang muncul dalam proses tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Oh mengenai persoalan yang muncul memang ada beberapa kendala, pengiriman logistik pada musim hujan, adanya keterlambatan pendistribusian logistik (stiker untuk PPDP dan C6) dan kurang teliti dalam penghitungan jumlah logistik. Solusi dari persoalan-persoalan tersebut waktu itu pengiriman logistik ditutupi dengan terpal agar aman dari hujan, harus lebih teliti lagi dalam menyiapkan logistik. Kami (KPU Kabupaten Brebes) berharap agar

pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk kedepannya jangan di musim penghujan.

Menurut Bapak Andi Budi Harjanto, ST. (selaku Ka. Sub.

Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Persoalan pasti ada mba, keterlambatan pendistribusian logistik, pendistribusian logistik di musim penghujan, pengiriman logistik terkendala faktor alam pada saat itu ada jembatan putus dan sungai banjir. Solusi dari beberapa persoalan tersebut ya agar penyelenggaraan tidak di musim hujan agar prosesnya berjalan dengan lancar tanpa hambatan, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk pengawalan pengiriman logistik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa persoalan yang muncul dalam proses tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan solusinya, permasalahannya yaitu pengiriman logistik pada musim hujan (musibah bencana banjir), terkendala faktor alam, adanya keterlambatan pendistribusian logistik (stiker untuk PPDP dan C6) dan kurang teliti dalam penghitungan jumlah logistik. Solusi dari persoalan-persoalan tersebut yaitu pengiriman logistik ditutupi dengan terpal agar aman dari hujan, harus lebih teliti lagi dalam menyiapkan logistik. KPU Kabupaten Brebes berharap agar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk kedepannya tidak di musim penghujan agar prosesnya berjalan dengan lancar tanpa hambatan, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk pengawalan pengiriman logistik.

Berdasarkan jawaban dari 3 pertanyaan di atas mengenai tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan

dan Penghitungan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2017 disimpulkan bahwa :

Pertama : persiapan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebelum melakukan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Brebes telah melakukan langkah-langkah persiapan diantaranya :

1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta menginput ke dalam Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan mengumumkan melalui laman KPU Kabupaten Brebes.
2. Penyusunan HPS, Sertifikasi Teknis dan Kontrak
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa/Lelang serta Penetapan Penyedia/Pemenang.

Kedua, proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, proses pendistribusian logistik dikawal oleh 1 (satu) staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes serta aparat dari Polsek masing-masing. Logistik dari PPK kemudian diteruskan ke seluruh PPS dan masing-masing TPS dengan pengawalan petugas Linmas dan petugas dari Polsek. Adapun pelaksanaan pendistribusian logistik dari PPK ke PPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pencoblosan, dari PPS ke TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pencoblosan.

Ketiga, persoalan yang muncul dalam proses tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan solusinya, permasalahannya yaitu pengiriman logistik pada musim hujan (musibah bencana banjir), terkendala faktor alam, adanya keterlambatan pendistribusian logistik (stiker untuk PPDP dan C6) dan kurang teliti dalam penghitungan jumlah logistik. Solusi dari persoalan-persoalan tersebut yaitu harus lebih teliti lagi dalam menyiapkan logistik. KPU Kabupaten Brebes berharap agar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk kedepannya tidak di musim penghujan agar prosesnya berjalan dengan lancar tanpa hambatan, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk pengawalan pengiriman logistik.

e. Pemungutan dan Penghitungan

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Apa saja persiapan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Tahapan ini tugasnya Divisi bagian teknis ya, kita (KPU Kabupaten Brebes) menyiapkan kesiapan logistik, pembentukan TPS, penyebaran surat pemberitahuan, pembentukan KPPS.

Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Kalau persiapan yang dilakukan oleh kita (KPU Kabupaten Brebes) itu yang harus disiapkan kesiapan logistiknya harus sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan, pembentukan TPS yang dilakukan oleh pihak KPPS, lalu penyebaran surat pemberitahuan yaitu berupa Formulir Model C6-KWK yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten Brebes secara berjenjang dari tingkat kecamatan samapai kepada pemilih, serta pembentukan KPPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa persiapan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, meliputi : kesiapan logistik, pembentukan TPS, penyebaran surat pemberitahuan Formulir Model C6-KWK, dan pembentukan KPPS.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu
Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Pada saat itu pelaksanaan pemungutan suaranya pada tanggal 15 Februari 2017. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara lancar meskipun ada sedikit kendala dan masalah, waktu itu juga hujan deras ya, terjadi banjir dan longsor di beberapa desa (Desa Purbayasa Kecamatan Tonjong, Desa Mandala, Watugambir Kecamatan Sirampog, Desa Jatirokeh dan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom) tapi tetap berjalan dengan lancar, kondusif dan sesuai dengan rencana.

Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yang dilaksanakan pada rabu, 15 Februari 2017 relatif berjalan aman

dan lancar walaupun ada sedikit masalah dan kendala dan tidak ricuh, tidak ada permasalahan yang berartilah. Di tahun 2017 itu lancar sampai dengan akhirpun tahapan penetapan suara itu tidak ada masalah, bahkan tidak ada gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) itu kan berarti tidak ada masalah yang fatal di setiap tahapannya. Tidak ada gugatan, sangat lancar sekali, damai. Kalo masalah banjir itu faktor alam dan menjadi tantangan makanya itu tadi termasuk yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, dikarenakan masyarakat ketika daerah yang memang banjir dan jika harus datang ke TPS memang repot. Dan itu yang menjadi kendala dari tingkat partisipasinya.

Menurut Bapak Wakro, S.IP. (selaku Ketua Bawaslu

Kabupaten Brebes) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Waktu itu mba, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan aman tidak ada pelanggaran/laporan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut Bapak Teguh Turmudi (selaku Ketua DPD Partai

Golkar Kabupaten Brebes) pada tanggal 8 Januari 2020, mengatakan:

Oh pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ya waktu itu kan musim hujan ya terus terjadi banjir juga di beberapa desa, tapi pada pelaksanaannya tidak ada masalah tetap aman terkendali dan kondusif.

Menurut Bapak Syafaat (selaku Ketua Tim Sukses

Pasangan Calon Suswono dan Ahmad Musttaqin DPD Partai PKS

Kabupaten Brebes), pada tanggal 13 Januari 2020, mengatakan :

Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya dilapangan berjalan lancar Cuma iya ada sedikit kendala hujan deras dan banjir di beberapa wilayah Brebes jadi mempengaruhi antusiasme, masyarakat juga sedang repot mengurus masalah banjir pada saat itu, tapi untuk pelaksanaannya tetap kondusif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di

simpulkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang

diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017. Pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara lancar meskipun ada sedikit

kendala dan masalah. Kendalanya hujan deras dan terjadi banjir di beberapa desa (Desa Purbayasa Kecamatan Tonjong, Desa Mandala, Watugambir Kecamatan Sirampog, Desa Jatirokeh dan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom) tapi dalam pelaksanaannya tetap berjalan dengan aman, lancar, kondusif dan sesuai dengan rencana.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Persoalan apa saja yang muncul dalam proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Ada sedikit persoalan, yaitu kendala cuaca yang kurang mendukung pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara terjadi banjir dan longsor di beberapa desa (Desa Purbayasa Kecamatan Tonjong, Desa Mandala, Watugambir Kecamatan Sirampog, Desa Jatirokeh dan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom). Dan juga masih ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota KPPS misalnya dalam penulisan form C1-KWK dan ada berkas/dokumen yang salah masuk kotak. Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut pada saat itu pendistribusian dilakukan dengan cara jalan kaki melewati lokasi longsor sehingga hasil perolehan suara di tingkat desa dapat tiba dengan tepat waktu. Dan mengenai penulisan form C1-KWK yang salah sudah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno penghitungan suara dan untuk dokumen yang salah masuk kotak diperbaiki saat rekapitulasi. Kemudian untuk pemilihan selanjutnya kami (KPU Kabupaten Brebes) akan lebih teliti dan maksimal dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Mengenai persoalan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara ya, pasti ada persoalan mba, saat itu musim penghujan hujannya deras dan sampai mengakibatkan banjir di beberapa desa itu yang menjadi kendala kita. Dan juga masih banyak anggota KPPS yang kurang paham dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Solusinya ya kita harus siap menghadapi kendala yang berasal dari faktor alam dan kontrol setiap TPS dan sosialisasi penghitungan kepada KPPS II.

Menurut Bapak Wakro, S.IP. (selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Kami dari bawaslu yang pada saat itu masih badan adhoc (Panwaslu) tidak menemukan masalah yang berat, dan tidak ada laporan kecurangan. Cuman ada musibah banjir dan longsor saja yang menjadi kendala akses untuk ke TPS.

Menurut Bapak Teguh Turmudi (selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes) pada tanggal 8 Januari 2020, mengatakan:

Pada saat pelaksanaan tidak ada masalah mengenai kecurangan atau masalah yang fatal, tidak ada.

Menurut Bapak Syafaat (selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Suswono dan Ahmad Musttaqin DPD Partai PKS

Kabupaten Brebes), pada tanggal 13 Januari 2020, mengatakan :

Ya itu seperti yang tadi sudah dibicarakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya dilapangan berjalan lancar, hanya saja kendala faktor alam musibah banjir dan longsor yang terjadi di beberapa desa mengakibatkan akses ke TPS sulit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa Persoalan yang muncul dalam proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dan solusinya diantaranya yaitu,

kendala cuaca yang kurang mendukung pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara terjadi banjir dan longsor di beberapa desa (Desa Purbayasa Kecamatan Tonjong, Desa Mandala, Watugambir Kecamatan Sirampog, Desa Jatirokeh dan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom). Dan masih ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota KPPS misalnya dalam penulisan form C1-KWK dan ada berkas/dokumen yang salah masuk kotak dan masih banyak anggota KPPS yang kurang paham dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Solusi untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu pendistribusian dilakukan dengan cara jalan kaki melewati lokasi longsor sehingga hasil perolehan suara di tingkat desa dapat tiba dengan tepat waktu. Dan mengenai penulisan form C1-KWK yang salah sudah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno penghitungan suara dan untuk dokumen yang salah masuk kotak diperbaiki saat rekapitulasi. Kemudian untuk pemilihan selanjutnya kami (KPU Kabupaten Brebes) akan lebih teliti dan bekerja maksimal dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Berdasarkan jawaban dari 3 pertanyaan di atas mengenai tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara dapat disimpulkan, pertama : persiapan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, meliputi : kesiapan logistik, pembentukan TPS, penyebaran surat pemberitahuan Formulir Model C6-KWK, dan pembentukan KPPS. Kedua : Pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara lancar meskipun ada sedikit kendala. Kendalanya hujan deras dan terjadi banjir di beberapa desa (Desa Purbayasa Kecamatan Tonjong, Desa Mandala, Watugambir Kecamatan Sirampog, Desa Jatirokeh dan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom) tapi dalam pelaksanaannya tetap berjalan dengan aman, lancar, kondusif dan sesuai dengan rencana. Ketiga : Persoalan yang muncul dalam proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dan solusinya diantaranya yaitu, kendala cuaca yang kurang mendukung pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara terjadi banjir dan longsor di beberapa desa (Desa Purbayasa Kecamatan Tonjong, Desa Mandala, Watugambir Kecamatan Sirampog, Desa Jatirokeh dan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom). Dan masih ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota KPPS misalnya dalam penulisan form C1-KWK dan ada berkas/dokumen yang salah masuk kotak dan masih banyak anggota KPPS yang kurang paham dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Solusi untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu pendistribusian dilakukan dengan cara jalan kaki melewati lokasi longsor sehingga hasil perolehan suara di tingkat desa dapat tiba dengan tepat waktu. Dan mengenai penulisan form C1-KWK yang salah sudah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno penghitungan suara dan untuk dokumen yang salah masuk kotak diperbaiki saat

rekapitulasi. Kemudian untuk pemilihan selanjutnya kami (KPU Kabupaten Brebes) akan lebih teliti dan bekerja maksimal dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

f. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Persoalan apa saja yang muncul dalam proses tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Hitung-hitungan rekap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tidak ada masalah ya, tapi ada juga sih beberapa persoalan yang bisa langsung teratasi pada saat itu juga. Masalahnya itu kurangnya dukungan cuaca pada saat hari pemungutan dan bencana banjir pasca pemungutan suara yang mengakibatkan ruangan untuk melakukan rekapitulasi dan scan form C-KWK tergenang air sehingga mengganggu proses penghitungan, berkas pemungutan dan penghitungan yang dikirimkan oleh PPK ke KPU masih terdapat kekurangan dan kurang telitnya PPK dalam mengisi data rekapitulasi suara ke dalam formulir DAI-KWK sehingga jumlah data laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dengan yang ada di dalam DPT. Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya kita (KPU Kabupaten Brebes) menyewa hotel untuk melakukan rekap dan scan form C-KWK menyewa hotel itu karena ruangan yang sudah disiapkan untuk melakukan rekapitulasi tergenang banjir. Dan mengenai kesalahan PPK, kita (KPU Kabupaten Brebes berkoordinasi dengan PPK yang masih kurang dalam menyerahkan berkas pemungutan dan penghitungan serta segera untuk menyerahkan kekurangannya kepada kita (KPU Kabupaten Brebes) kemudian KPU Kabupaten Brebes juga berkoordinasi dengan PPK yang masih terdapat kesalahan dalam

penginputan formulir DI-KWK ke aplikasi, dan mereka (PPK) segera memperbaiki serta menyerahkan berkas revisi tersebut.

Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag.

Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Mengenai rekap penghitungan suara waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes 2017 itu masalahnya di pengadaan mesin scannernya mba, jumlah mesin scanner yang dibutuhkan saat proses scan form C-KWK kurang karena beberapa scanner rusak. Sehingga pelaksanaan scan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi masalah tersebut langsung diatasi kita (KPU Kabupaten Brebes) mengoptimalkan pelaksanaan scan form C-KWK dengan peralatan yang tersedia.

Menurut Bapak Wakro, S.IP. (selaku Ketua Bawaslu

Kabupaten Brebes) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Pesoalan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara ya mba, gini waktu itu masalahnya saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, terdapat perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan pada formulir DB-1 KWK dengan rekapitulasi DPT di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Jatibarang, Salem, Sirampog, Songgom, dan Wanasari. Solusi pada waktu itu pihak KPU Kabupaten Brebes sendiri langsung melakukan perbaikan data pemilih ke dalam formulir DB-1 KWK di lima Kecamatan setelah mendapat persetujuan dari Panwaskab pada saat itu dan saksi masing-masing paslon, kemudian melakukan antisipasi permasalahan melalui sinkronisasi data pemilih per kecamatan 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten.

Menurut Bapak Teguh Turmudi (selaku Ketua DPD Partai

Golkar Kabupaten Brebes) pada tanggal 8 Januari 2020, mengatakan:

Saat hitungan rekap hasil penghitungan suara kami selaku parpol pengusung paslon nomer 2 (Idza Priyanti dan Narjo), kami rasa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan dan amanlah mba.

Menurut Bapak Syafaat (selaku Ketua Tim Sukses Pasangan

Calon Suswono dan Ahmad Musttaqin DPD Partai PKS Kabupaten

Brebes), pada tanggal 13 Januari 2020, mengatakan :

Sebenarnya ada masalah tapi dari pihak KPU Kabupaten Brebes langsung bisa menangani masalah yang terjadi pada saat itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa Persoalan yang muncul dalam proses tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dan solusi dalam mengatasi persoalannya yaitu, kurangnya dukungan cuaca dan bencana banjir pasca pemungutan suara yang mengakibatkan ruangan untuk melakukan rekapitulasi dan scan form C-KWK tergenang air sehingga mengganggu proses penghitungan, berkas pemungutan dan penghitungan yang dikirimkan oleh PPK ke KPU masih terdapat kekurangan dan kurang telitnya PPK dalam mengisi data rekapitulasi suara ke dalam formulir DA1-KWK sehingga jumlah data laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dengan yang ada di dalam DPT. Dan jumlah mesin scanner yang dibutuhkan saat proses scan form C-KWK kurang karena beberapa scanner rusak. Sehingga pelaksanaan scan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian , terdapat perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan pada formulir DB-1 KWK dengan rekapitulasi DPT di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Jatibarang, Salem, Sirampog, Songgom, dan Wanasari. Solusinya KPU Kabupaten Brebes menyewa hotel untuk melakukan rekap dan scan form C-KWK, KPU kabupaten Brebes berkoordinasi dengan PPK agar segera untuk menyerahkan kekurangan dan kemudian KPU Kabupaten Brebes juga berkoordinasi dengan PPK

yang masih terdapat kesalahan dalam penginputan formulir D1-KWK ke aplikasi, dan segera memperbaiki serta menyerahkan berkas revisi tersebut. Mengenai jumlah mesin scanner yang kurang KPU Kabupaten Brebes mengoptimalkan pelaksanaan scan form C-KWK dengan peralatan yang tersedia.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Bagaimanakah pelaksanaan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Proses pelaksanaan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, prosesnya kita (KPU Kabupaten Brebes) terlebih dahulu melalui rapat pleno internal melakukan perubahan atas Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, rapat pleno tersebut memutuskan melakukan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 014/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor : 010/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, terkait penetapan calon terpilih. Proses penetapan calon terpilih berlangsung dengan khidmat dan lancar.

Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Bentar ya mba saya liat buku laporan tahapan dulu soalnya saya sedikit lupa, nah dalam Penetapan calon terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dilaksanakan pada hari kamis tanggal 16 maret 2017 bertempat di Gedung KORPRI Kabupaten Brebes, pada saat itu dihadiri oleh jajaran Forkompinda Kabupaten Brebes, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Muspika Brebes,

instansi terkait, Ketua PPK se-Kabupaten Brebes, dan Pimpinan Partai Politik. Proses penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes berjalan dengan khidmat.

Menurut Bapak Wakro, S.IP. (selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Saat penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tidak ada masalah seluruhnya berjalan dengan aman dan lancar.

Menurut Bapak Teguh Turmudi (selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes) pada tanggal 8 Januari 2020, mengatakan:

Pelaksanaan penetapan calon terpilih berlangsung dengan lancar mba, kan kami sebagai partai pengusung paslon nomer urut 2 (dua) sangat senang atas terpilihnya kembali Ibu Idza Priyanti dan Bapak Narjo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Menurut Bapak Syafaat (selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Suswono dan Ahmad Musttaqin DPD Partai PKS Kabupaten Brebes), pada tanggal 13 Januari 2020, mengatakan :

Berlangsung lancar walaupun paslon yang kami usungkan kalah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tapi kami tetap sportif dan menerima kekalahan ya mba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa pelaksanaan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, terlebih dahulu melalui rapat pleno internal melakukan perubahan atas Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, rapat pleno tersebut memutuskan melakukan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 014/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor : 010/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Dan pelaksanaannya pada hari kamis tanggal 16 maret 2017 bertempat di Gedung KORPRI Kabupaten Brebes, dihadiri oleh jajaran Forkompinda Kabupaten Brebes, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Muspika Brebes, instansi terkait, Ketua PPK se-Kabupaten Brebes, dan Pimpinan Partai Politik. Proses Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes berjalan dengan lancar khidmat.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu Persoalan apa saja yang muncul dalam proses penetapan hasil calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

Menurut Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP. (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes) pada tanggal 3 Januari 2020, mengatakan :

Seperti yang dibicarakan sebelumnya, bahwa pada waktu penetapan calon terpilih berjalan dengan khidmat dan lancar tanpa adanya gugatan.

Menurut Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP. (selaku Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas) pada tanggal 4 Januari 2020, mengatakan :

Tidak ada persoalan ya mba dalam penetapan hasil calon terpilih, saat itu berjalan dengan baik dan tidak ada sengketa perselisihan penetapan calon terpilih.

Menurut Bapak Wakro, S.IP. (selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes) pada tanggal 14 Januari 2020, mengatakan :

Kami sebagai pengawas saat itu tidak menemui persoalan seluruhnya berjalan dengan aman dan tidak ada perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Dan banyak di hadiri oleh tamu undangan pada saat itu untuk menyaksikan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Menurut Bapak Teguh Turmudi (selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes) pada tanggal 8 Januari 2020, mengatakan:

Sekali lagi tidak ada persoalan mba adanya kesenangan karena calon yang kita usung menang.

Menurut Bapak Syafaat (selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Suswono dan Ahmad Musttaqin DPD Partai PKS Kabupaten Brebes), pada tanggal 13 Januari 2020, mengatakan :

Berlangsung lancar mba kami juga menerima hasilnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan penetapan hasil calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, tidak ada persoalan seluruhnya berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Berdasarkan jawaban dari 3 pertanyaan di atas mengenai Rekapitulasi dan Penetapan Hasil, dapat disimpulkan : pertama : Persoalan yang muncul dalam proses tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dan solusi dalam mengatasi persoalannya yaitu, kurangnya dukungan cuaca dan bencana banjir pasca pemungutan suara yang mengakibatkan ruangan untuk melakukan rekapitulasi dan scan form C-KWK tergenang air sehingga mengganggu proses

penghitungan, berkas pemungutan dan penghitungan yang dikirimkan oleh PPK ke KPU masih terdapat kekurangan dan kurang telitinya PPK dalam mengisi data rekapitulasi suara ke dalam formulir DA1-KWK sehingga jumlah data laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dengan yang ada di dalam DPT. Dan jumlah mesin scanner yang dibutuhkan saat proses scan form C-KWK kurang karena beberapa scanner rusak. Solusinya KPU Kabupaten Brebes menyewa hotel untuk melakukan rekap dan scan form C-KWK, KPU kabupaten Brebes berkoordinasi dengan PPK agar segera untuk menyerahkan kekurangan dan kemudian KPU Kabupaten Brebes juga berkoordinasi dengan PPK yang masih terdapat kesalahan dalam penginputan formulir D1-KWK ke aplikasi, dan segera memperbaiki serta menyerahkan berkas revisi tersebut. Mengenai jumlah mesin scanner yang kurang KPU Kabupaten Brebes mengoptimalkan pelaksanaan scan form C-KWK dengan peralatan yang tersedia.

Kedua : Pelaksanaan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, proses pelaksanaannya pada hari kamis tanggal 16 maret 2017 bertempat di Gedung KORPRI Kabupaten Brebes, dihadiri oleh jajaran Forkompinda Kabupaten Brebes, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Muspika Brebes, instansi terkait, Ketua PPK se-Kabupaten Brebes,

dan Pimpinan Partai Politik. Proses Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes berjalan dengan lancar dan khidmat.

Ketiga : proses pelaksanaan penetapan hasil calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, tidak ada persoalan seluruhnya berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

V.2 Pembahasan atas Hasil Penelitian

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

Pada penelitian ini menggunakan teori kinerja dari Prof. Dr. Wibowo, S.E., Phil (dalam buku Manajemen Kinerja 2007:2) kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes adalah salah satu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di wilayah Jawa Tengah yang mendapatkan kewenangan sebagai penyelenggara pemilu di daerah khususnya Kabupaten Brebes yang memiliki peran sentral terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes selaku pemegang kekuasaan tersebut telah menyiapkan diri dengan persiapan yang matang agar proses

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Brebes berjalan sesuai rencana.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, non partisan, tidak memihak, transparan, dan profesional berdasarkan azas-azas pemilu demokratik dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Adapun serangkaian tugas-tugas kinerja Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari 2 tahapan yaitu :

I. Tahap Persiapan

a. Perencanaan Program dan Anggaran

Penyusunan program dan anggaran menjadi salah satu tahapan persiapan yang penting dan krusial dalam mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan, program dan anggaran yang disusun untuk menentukan besaran anggaran yang diusulkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes melalui 5 kegiatan.

Dan dalam melakukan proses perencanaan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 penyusunan

anggaran diawali dengan pembahasan konsep awal yang telah dibuat sebelumnya dalam rapat koordinasi KPU Kabupaten Brebes, setelah itu dilanjutkan dengan rapat pleno KPU Kabupaten Brebes. kemudian, disepakati besaran anggaran yang akan diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. KPU Kabupaten Brebes mengajukan usulan permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. KPU Kabupaten Brebes melalui rapat pleno membahas perubahan permohonan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dikarenakan penyesuaian dengan regulasi dan standar biaya yang baru. Dan kemudian dalam melakukan proses peencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Brebes berkoordinasi dengan pihak terkait proses penyusunan anggarannya yaitu berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Brebes dan Komisi I DPRD Kabupaten Brebes.

Rekapitulasi Rincian Kebutuhan Biaya Tahapan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

KODE	URAIAN	BIAYA (Rp)
A	Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara Pemilihan	
I	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan	1.542.400.000
II	Honorarium Penyelenggara Pemilihan	17.472.958.000
III	Uang Lembur (10 Hari)	204.840.000
B	Kebutuhan Barang dan Jasa Pemilihan	
I	Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan	
1	Perencanaan Program dan Anggaran	0
2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah	0

	Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	26.760.0000
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	2.214.409.000
5	Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP	1.727.563.000
6	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	550.068.000
7	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	0
8	Pencalonan	161.462.000
9	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	4.829.463.000
10	Laporan Audit Dana Kampanye	88.900.000
11	Proses Perhitungan	343.200.000
12	Advokasi Hukum	1.075.670.000
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.867.822.000
14	Rapat Kerja/Pelatihan/Bimtek dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS	140.690.000
15	Rapat Kerja dan Supervisi	68.600.000
16	Perjalanan Dinas	1.877.115.000
17	Evaluasi dan Pelaporan	9.780.000
II	Operasional dan Administrasi Perkantoran	
18	Pemeliharaan	0
19	Bahan Bakar Minyak Roda 4 dan Roda 3	0
20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.708.973.000
21	Sewa Roda 4, Roda 2 atau Kendaraan Lainnya	275.500.000
22	Pngelolaan Logistik Pemilihan	378.916.000
	JUMLAH	40.565.089.000

Sumber : Buku Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes 2017.

b. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis

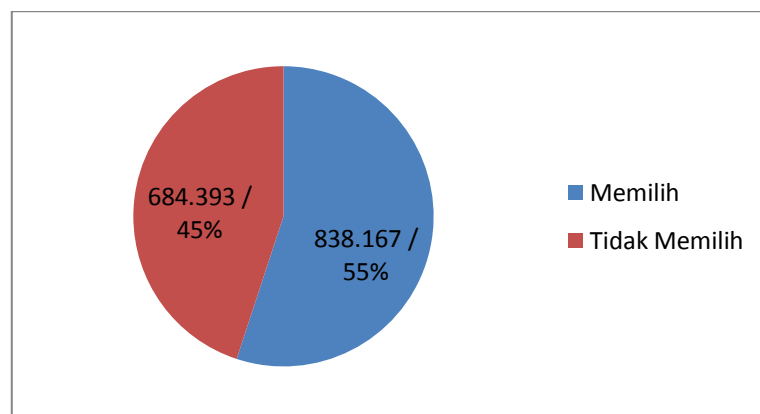
Sosialisasi pemilihan dimaksudkan untuk menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan, memberikan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat Brebes dalam pemilihan.

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sudah semaksimal mungkin dilaksanakan, hal itu terbukti dengan adanya pelaksanaan 27 kegiatan sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan melalui media massa (media elektronik/radio, laman/website KPU Brebes, media cetak dan media online/berita lokal online) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Brebes. Kemudian sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi meliputi komponen masyarakat umum, pemilih pemula, tokoh masyarakat/pemuka adat, kelompok media massa, partai politik, pengawas, pemantau pemilihan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok adat, instansi pemerintah, partai politik dan pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas). Dan dampak kegiatan sosialisasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sangat berpengaruh, karena lewat kegiatan sosialisasi masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan pemungutan suara, mengetahui pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan mengingatkan untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya.

Faktor yang menjadi kendala yaitu : Di tingkat partisipasi pada saat pencoblosan (pemungutan suara), masih rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor alam (musibah banjir, dan longsor) dan faktor mobilisasi masyarakat (merantau ke luar daerah).

solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu kegiatan sosialisasi yang sudah pernah dilakukan dimaksimalkan dan perbanyak sosialisasi di daerah rantau seperti di Kota Jakarta, Semarang dan kedepannya bisa ditambah sosialisasi ke kota yang banyak perantau dari masyarakat Brebes. Dan diharapkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tidak pada musim penghujan.

Jumlah Partisipasi Memilih Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Brebes Tahun 2017



Sumber : Buku Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Brebes 2017.

Keterangan Rincian Pengembalian Formulir C6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

NO	KETERANGAN	JUMLAH
	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	
1	2	3
1	MENINGGAL DUNIA	9.014
2	PINDAH ALAMAT	12.857
3	TIDAK DIKENAL	19.951
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	195.498
5	LAIN-LAIN	69.356
TOTAL		306.676

Sumber : Divisi Perencanaan Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 :

1. Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Melalui Konser Musik



2. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Segmen Perempuan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017



3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Segmen Disabilitas



Gowes KPU



Semua foto diambil dari Laman Website KPU Kabupaten Brebes dengan alamat <http://kpu-brebeskab.go.id>.

c. Pembentukan PPK,PPS,KPPS

Dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU Kabupaten Brebes dibantu oleh badan penyelenggara *ad hoc* yang terdiri dari Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Keempat badan penyelenggara tersebut bersifat sementara untuk membantu pemilihan serentak di daerah. proses pembentukan anggota PPK dan anggota PPS itu melalui beberapa proses yaitu :

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS
2. Menerima pendaftaran calon PPK dan PPS
3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS
4. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS
5. Melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS
6. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS

Selain itu proses pembentukan anggota KPPS dibentuk dengan keputusan ketua PPS dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Brebes. kemudian proses pembentukan PPDP dilakukan secara terbuka melalui pengumuman Ketua KPU Kabupaten Brebes Nomor 165/KPU-Kab-021.329305/VIII/2016 di website KPU Kabupaten Brebes. Setelah semua proses dilakukan PPDP terpilih ditetapkan oleh Ketua PPS atas nama KPU Kabupaten Brebes melalui keputusan Ketua PPS dengan masa kerja anggota PPDP selama 1 (satu) bulan.

d. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2015, dalam Pasal 1 ayat 24 menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari Pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih, data tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. penyusunan DPS, DPT, dan proses pencatatan DPTb itu ada tahapannya masing-masing diantaranya:

- a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
 1. Pengelolaan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4)
 2. Penyusunan daftar pemilih
 3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran
 4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- b. Penyusunan daftar pemilih tetap
 1. Rapat kerja dan koordinasi persiapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT)
 2. Rekapitulasi daftar pemilih tetap
- c. Proses pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pemilih yang telah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, dalam hal belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga Kabupaten Brebes yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara menggunakan KTP-elektrik atau surat keterangan dari Disdukcapil Kabupaten Brebes kemudian pemilih tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Faktor kendala yang ditemui yaitu : Terdapat data NIK dan NKK invalid, masyarakat kurang aktif dalam melihat apakah sudah masuk dalam DPS ataupun DPT, masih banyak data pemilih yang belum ber KTP-Elektrik, aturan/Juknis cokolit pemilih mengalami perubahan di tengah jalan (pengecekan pemilih ber KTP-EL dan tidak ber KTP-EL), pemilih yang sudah dimasukkan dalam portal mengalami perubahan (data yang sudah diajukan oleh PPS tidak muncul dalam DPS maupun DPT), banyak ditemukan pemilih dengan NIK, Nama dan Tanggal lahir yang sama (ganda) serta NIK sama tetapi dengan nama yang berbeda, data awal yang diterima untuk cokolit banyak yang tidak sesuai dengan data riil.

Solusi atas kendala yang ada yaitu : Data diteliti ulang untuk dicocokkan dengan buku induk di kelurahan, memperbanyak sosialisasi mengenai DPS maupun DPT, PPS menghimbau masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-Elektronik, mengundang kembali

sebagian pemilih yang telah dicoklit, pemilih tersebut dimasukkan dalam DPTb saat menggunakan hak pilihnya, setelah dilakukan kroscek dilapangan ada yang benar-benar orangnya sama dan ada pula orangnya berbeda, dilakukan kroscek langsung perbaikan.

Keterangan Rincian Pengembalian Formulir C6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

NO	KETERANGAN	JUMLAH
	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	
1	2	3
1	MENINGGAL DUNIA	9.014
2	PINDAH ALAMAT	12.857
3	TIDAK DIKENAL	19.951
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	195.498
5	LAIN-LAIN	69.356
TOTAL		306.676

Sumber : Divisi Perencanaan Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Menghasilkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2017
KABUPATEN BREBES

NO	KECAMATAN	TOTAL TPS	DATA PEMILIH		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	SALEM	119	24,474	24,310	48,784
2	BANTARKAWUNG	181	38,251	37,690	75,941
3	BUMIAYU	192	44,171	42,755	86,926
4	PAGUYANGAN	179	41,909	40,765	82,674
5	SIRAMPOG	133	26,586	25,745	52,331
6	TONJONG	123	29,392	28,669	58,061
7	LARANGAN	223	60,053	60,373	120,426
8	KETANGGUNGAN	215	56,593	55,905	112,498
9	KERSANA	98	24,745	24,800	49,545
10	BANJARHARJO	210	50,474	50,945	101,419
11	LOSARI	207	55,421	55,747	111,168
12	TANJUNG	153	39,264	39,214	78,478
13	BULAKAMBA	231	70,930	68,512	139,442
14	WANASARI	242	62,864	61,368	124,232
15	SONGGOM	137	34,363	34,909	69,272
16	JATIBARANG	145	35,831	35,410	71,241
17	BREBES	213	70,432	69,690	140,122
TOTAL		3,001	765,753	756,807	1,522,560

Sumber : Divisi Perencanaan Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

II. Tahap Penyelenggaraan

a. Pencalonan

Merupakan proses penyeleksian tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, mauoun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Tahapan pencalonan tidak ada persoalan yang muncul dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, hanya saja ada salah satu pasangan calon yang mendaftarkan pasangan calon wakilnya mendaftar di hari terakhir. Solusi dari persoalan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes berharap para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes dari partai politik mendaftarkan diri di awal jangan di akhir pendaftaran jadi kalau ada kekurangan berkas bisa diselesaikan.



Penerimaan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

b. Kampanye

Berdasarkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, merupakan serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak (masyarakat) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Penyampaian visi, misi dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya dengan tujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih sebagaimana disebut sebagai kegiatan kampanye.

1. Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1

No	Bentuk Kampanye	Waktu	Tempat
1.	Kampanye damai yang diselenggarakan KPU Kabupaten Brebes	Hari : Jum'at Tanggal : 28 Oktober 2016 Pukul : 13.00-17.00 WIB.	Gedung KORPRI Kabupaten Brebes
2.	Pembentukan Tim Sukses	Hari : Kamis-Sabtu. Tanggal : 03 s/d 12 November 2016. Pukul : 07.00-21.00 WIB.	Ketanggungan, Brebes, Losari, Wanasari, Paguyangan, Bulakamba, Jatibarang, Songgom, Tanjung, Bumiayu, Banjarharjo, Kersana, Sirampog, Larangan, Salem dan Bantarkawung.
3.	Silaturahmi, Sosialisasi dan Blusukan	Hari : Kamis-Kamis. Tanggal : 17 s/d 24 November 2016.	Desa Tengguli Kec. Tanjung, Bumiayu Kec. Bumiayu, Ketanggungan, Bulakamba, Desa

		Pukul : 07.00-21.00 WIB.	Tambakserang Kec. Bantarkawung, Desa Cilibur Kec. Pguyangan.
4.	Silaturahmi, Sosialisasi dan Blusukan	Hari : Sabtu-Minggu. Tanggal : 19 s/d 27 November 2016. Pukul : 07.00-21.00 WIB.	Berkunjung ke pasar Ketanggungan, di Pasar Losari, Berkunjung ke Pasar Linggapura Kec. Tonjong, dll.

Sumber : Buku Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes

2017.

2. Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2

No	Bentuk Kampanye	Waktu	Tempat
1.	Kampanye damai yang diselenggarakan KPU Kabupaten Brebes	Hari : Jum'at Tanggal : 28 Oktober 2016 Pukul : 13.00-17.00 WIB.	Gedung KORPRI Kabupaten Brebes
2.	Kampanye Dialogis	Hari : Selasa-Jum'at. Tanggal : 1 s/d 4 November 2016 Pukul : 07.00-22.00 WIB.	Pasar Linggapura, Tonjong, Tanggeran, Purwodadi, Pepedan, Watujaya, Purbayasa, Talok, Pasar Induk, Jatisawit, Laren, Kalisumur, nagaradaha, dll
3.	Kampanye Dialogis	Hari : Sabtu-Selasa. Tanggal : 5-8 November 2016. Pukul : 07.00-22.00 WIB.	Pasar Losari, Pasar Limbangan Kec.Losari, ke Kampung Bumiayu, Pasar Sirampog, Pasar Jatibarang, Klampis, Pasar Larangan, Sitanggal, Pasar Songgom dan Jatorokeh.

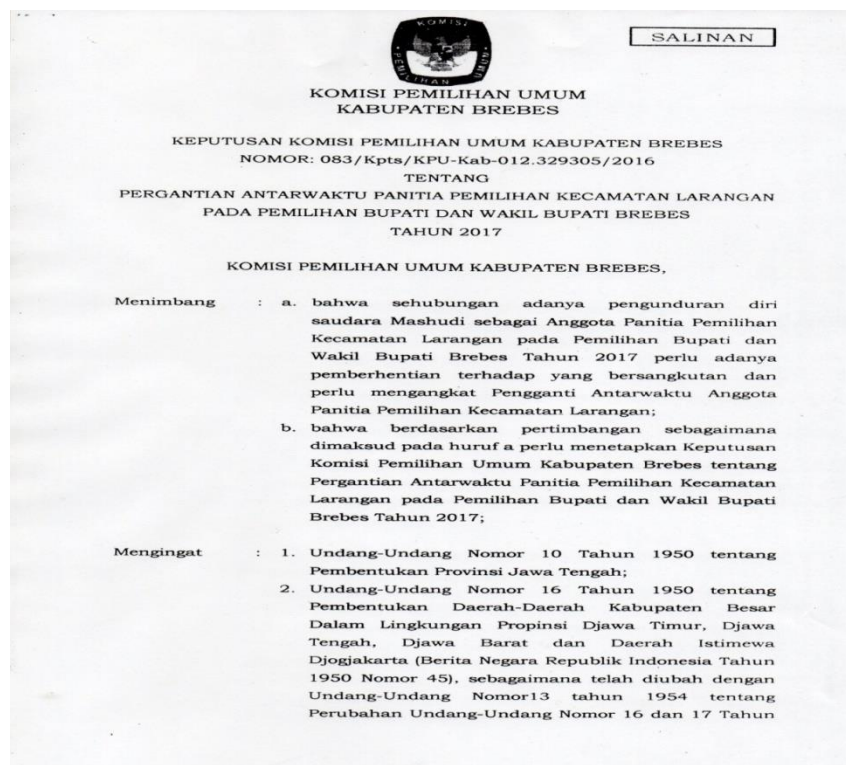
4.	Kampanye Dialogis	Hari : Rabu-Minggu. Tanggal : 9-13 November 2016. Pukul : 07.00-22.00 WIB.	Ke Tokoh Masyarakat Kec. Tonjong, Pasar Songgom, Jatirokeh, pasar Larangan, Salatri, Sitanggal, pasar Bantarkawung, dll.
5.	Kampanye Dialogis	Hari : Senin-Minggu. Tanggal : 14-20 November 2016. Pukul : 07.00-22.00 WIB.	Pasar Brebes, Rapat DPC, PDIP Brebes, pengajian di Kel. Limbangan Kec. Brebes, Pasar PKL/Jatisawit, Pasar Wage, dll.
6.	Silaturahmi, Sosialisasi dan Blusukan	Hari : Senin-Rabu. Tanggal : 21-23 November 2016. Pukul : 07.00-21.00 WIB.	Pasar Jatibarang, pasar ayam kelampok, pasar Sawojajar dan pasar bawang Kelampok, dll.
7.	Silaturahmi, Sosialisasi dan Blusukan	Hari : Kmis-Minggu. Tanggal : 24-27 November 2016. Pukul : 07.00-21.00 WIB.	Blusukan di Desa Negla, Karangjunti, Karangsambung, Bojongsari, dll.
8,	Silaturahmi, Sosialisasi dan Blusukan	Hari : Senin-Rabu. Tanggal : 28-30 November 2016. Pukul : 07.00-21.00 WIB.	Pengajian di Ds. Padakaton, Blusukan di Ds. Ciduwet Kec. Ketanggungan, Ds. Dukuhlo Kec. Bulakamba, Blusukan di Kec. Salem, dan menghadiri Pengajian di Ds. Kubangwungu, dll.

Sumber : Buku Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes

2017.

Faktor kendala yang ada pada kegiatan kampanye adanya ketidaknetralan anggota PPK, karena mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Solusi atas kendala tersebut yaitu : untuk pelanggaran yang dilakukan oleh badan *ad hoc* harus ada pembinaan supaya tidak melanggar norma-norma yang ada di kepemiluan. Dan selalu mengingatkan dan menegaskan untuk menjaga netralitas, kode etik dan pakta integritasnya.

SK Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 083/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 Tentang Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Larangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.



Sumber : data diambil dari Divisi Bagian Hukum

c. Laporan Dana Kampanye

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. dalam tahap laporan dana kampanye disimpulkan bahwa, Untuk dana kampanye bisa dilihat sendiri di Ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa dana kampanye wajib diperoleh, dikelola dan dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan. Hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing pasangan calon peserta pemilihan. Tidak ada persoalan, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam laporan dana kampanye patuh dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

KPU Kabupaten Brebes dalam melakukan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berpedoman pada prinsip efisien dan efektif. persiapan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebelum melakukan proses pengadaan perlengkapan

pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Brebes telah melakukan langkah-langkah persiapan diantaranya :

1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta menginput ke dalam Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan mengumumkan melalui laman KPU Kabupaten Brebes.
2. Penyusunan HPS, Sertifikasi Teknis dan Kontrak
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa/Lelang serta Penetapan Penyedia/Pemenang.

proses pendistribusian logistik dikawal oleh 1 (satu) staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes serta aparat dari Polsek masing-masing. Logistik dari PPK kemudian diteruskan ke seluruh PPS dan masing-masing TPS dengan pengawalan petugas Linmas dan petugas dari Polsek. Adapun pelaksanaan pendistribusian logistik dari PPK ke PPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pencoblosan, dari PPS ke TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pencoblosan.

Faktor yang menjadi kendala pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan pendistribusian yaitu : Terkendala faktor alam, adanya keterlambatan pendistribusian logistik (stiker untuk PPDP dan C6) dan kurang teliti dalam penghitungan jumlah logistik. Solusinya yaitu Harus lebih teliti lagi dalam menyiapkan logistik dan KPU Kabupaten Brebes berharap agar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk kedepannya tidak di

musim penghujan agar prosesnya berjalan dengan lancar tanpa hambatan, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk pengawalan pengiriman logistik.



[https://m.tribunnews.com/regional/2017/02/14/petugas-harus-seberang-
arus-deras-sungai-bawa-logistik-pilkada-brebes](https://m.tribunnews.com/regional/2017/02/14/petugas-harus-seberang-arus-deras-sungai-bawa-logistik-pilkada-brebes)

Panitia Pemungutan Suara Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Brebes, mengirimkan logistik Pilkada ke TPS di Dukuh Wadas Gumantung, Selasa (14/2/2017). Satu-satunya akses menuju daerah tersebut hanya berupa jembatan yang melintas Sungai Glagah. Beberapa waktu lalu, jembatan sepanjang 108 meter dan lebar 2,5 meter itu putus diterjang banjir.



Petugas dalam pendistribusian logistik dikawal oleh personel TNI dan Polri yang melintasi sungai menuju desa yang terisolir.

e. Pemungutan dan Penghitungan

Adalah mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Pemilih yang mempunyai hak harus mencoblos pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya. Pemungutan suara merupakan salah satu mekanisme yang dipilih dalam menjalankan demokrasi. Persiapan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, meliputi : kesiapan logistik, pembentukan TPS, penyebaran surat pemberitahuan Formulir Model C6-KWK, dan pembentukan KPPS. Kemudian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara lancar meskipun ada sedikit kendala.

Faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yaitu kendala cuaca yang kurang mendukung pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara terjadi banjir dan longsor di beberapa desa (Desa Purbayasa Kecamatan Tonjong, Desa Mandala, Watugambir Kecamatan Sirampog, Desa Jatirokeh dan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom). Dan masih ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota KPPS misalnya dalam penulisan form C1-KWK dan ada berkas/dokumen yang salah masuk kotak dan masih banyak anggota KPPS yang kurang paham dalam

proses pemungutan dan penghitungan suara. Solusi untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu pendistribusian dilakukan dengan cara jalan kaki melewati lokasi longsor sehingga hasil perolehan suara di tingkat desa dapat tiba dengan tepat waktu. Dan mengenai penulisan form C1-KWK yang salah sudah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno penghitungan suara dan untuk dokumen yang salah masuk kotak diperbaiki saat rekapitulasi. Kemudian untuk pemilihan selanjutnya kami (KPU Kabupaten Brebes) akan lebih teliti dan bekerja maksimal dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.



Petugas dalam pendistribusian logistik dikawal oleh personel TNI dan Polri yang melintasi sungai menuju desa yang terisolir.

a. Jumlah partisipasi memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

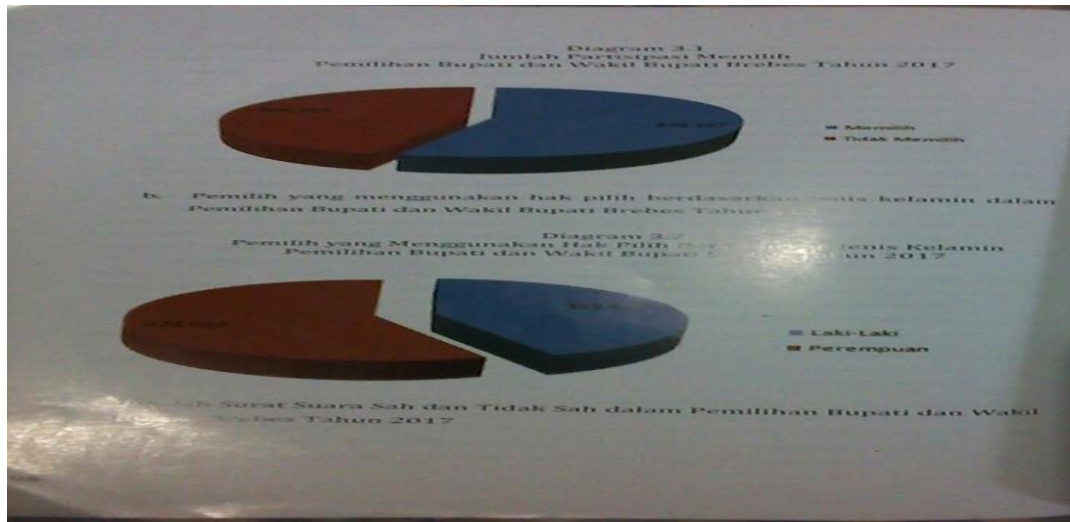
Prosentasenya : - Memilih (838.167)

- Tidak Memilih (684.393)

b. Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan jenis kelamin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Prosentasenya : - Laki-laki (359.650)

- Perempuan (478.517)



c. Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Prosentasenya : - Surat Suara Sah (818.657)

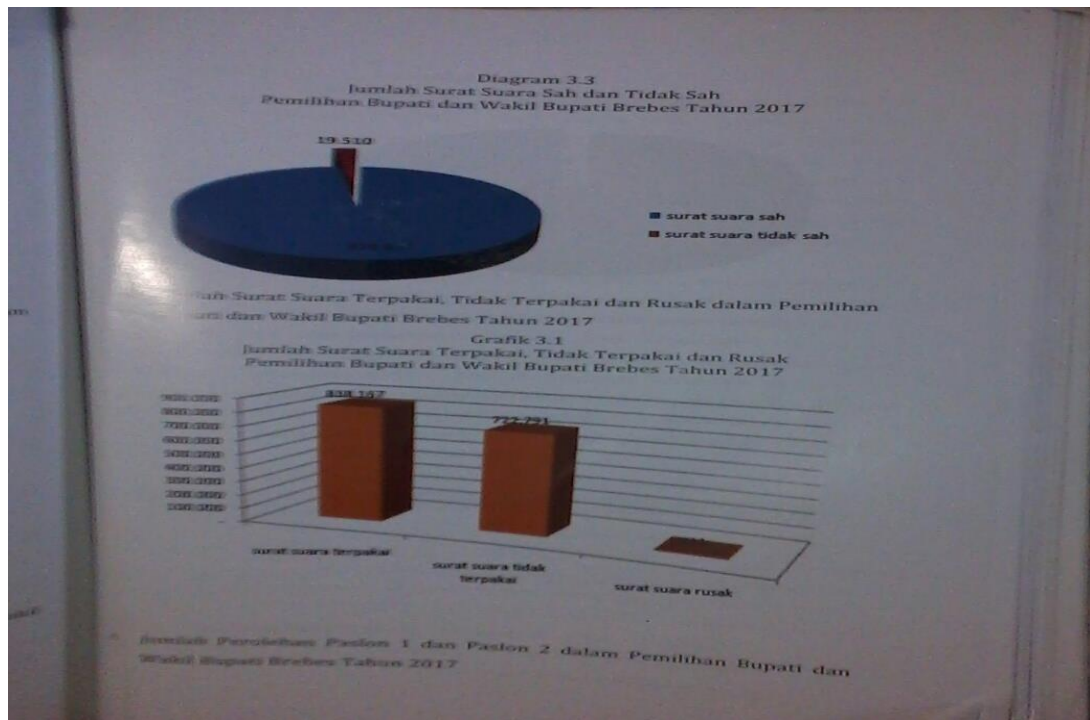
- Surat Suara Tidak Sah (19.510)

d. Jumlah Surat Suara Terpakai, Tidak Terpakai, dan Rusak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Prosentasenya : - Surat Suara Terpakai (838.167)

- Surat Suara Tidak Terpakai (722.791)

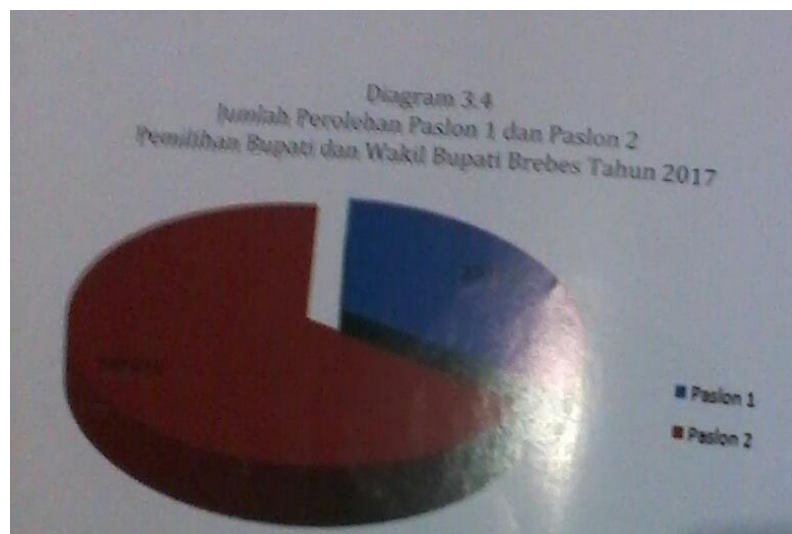
- Surat Suara Rusak (711)



e. Jumlah Perolehan Paslon 1 dan Paslon 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dengan prosentasenya :

Prosentasenya : - Paslon 1 (270.036)

- Paslon 2 (548.621)



Sumber : Buku Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

f. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Proses rekapitulasi dilakukan secara manual dari TPS, PPK hingga Kabupaten dan rekapitulasi Hasil penghitungan suara terakhir dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dibantu dengan mesin scanner.

Faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil yaitu kurangnya dukungan cuaca dan bencana banjir pasca pemungutan suara yang mengakibatkan ruangan untuk melakukan rekapitulasi dan scan form C-KWK tergenang air sehingga mengganggu proses penghitungan. Dan jumlah mesin scanner yang dibutuhkan saat proses scan form C-KWK kurang karena beberapa scanner rusak. Solusinya yaitu , mengenai jumlah mesin scanner yang kurang KPU Kabupaten Brebes mengoptimalkan pelaksanaan scan form C-KWK dengan peralatan yang tersedia.

Penetapan Hasil Pasangan Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Tabel 3.42
Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JALUR PENCALONAN	HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
1	Dr. H. SUSWONO – AKHMAD MUSYTAQIN	Gabungan Partai Politik : ➤ PKS ➤ P. Gerindra	270.036 suara atau (32,98%)
2	Hj. IDZA PRIYANTI, S.E. – NARJO, S.H.	Gabungan Partai Politik : ➤ PDI-P ➤ PKB ➤ P. Golkar ➤ PAN ➤ P. Demokrat ➤ PPP ➤ P. Hanura	548.621 suara atau (67,02%)

Sumber : Buku Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Mengacu pada temuan penelitian, ternyata kendala-kendala dari Kinerja KPU Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yang dijumpai dilapangan masih terdapatnya kendala di beberapa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis : Tingkat partisipasi rendah, karena disebabkan oleh faktor alam (musibah bencana banjir) dan faktor mobilisasi masyarakat (merantau ke luar kota).
2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih : Terdapat data NIK dan NKK invalid, masyarakat kurang aktif dalam melihat apakah sudah masuk dalam DPS ataupun DPT, masih banyak data pemilih yang belum ber KTP-Elektrik, aturan/Juknis cokolit

pemilih mengalami perubahan di tengah jalan (pengecekan pemilih ber KTP-EL dan tidak ber KTP-EL), pemilih yang sudah dimasukkan dalam portal mengalami perubahan (data yang sudah diajukan oleh PPS tidak muncul dalam DPS maupun DPT), banyak ditemukan pemilih dengan NIK, Nama dan Tanggal lahir yang sama (ganda) serta NIK sama tetapi dengan nama yang berbeda, data awal yang diterima untuk cokolit banyak yang tidak sesuai dengan data riil.

3. Kampanye : Adanya ketidak netralan anggota PPK, karena mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
4. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara : Terkendala faktor alam, adanya keterlambatan pendistribusian logistik (stiker untuk PPDP dan C6) dan kurang teliti dalam penghitungan jumlah logistik.
5. Pemungutan dan Penghitungan : kendala cuaca yang kurang mendukung pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara terjadi banjir dan longsor di beberapa desa (Desa Purbayasa Kecamatan Tonjong, Desa Mandala, Watugambir Kecamatan Sirampog, Desa Jatirokeh dan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom). Dan masih ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota KPPS misalnya dalam penulisan form C1-KWK dan ada berkas/dokumen yang salah masuk kotak dan masih

banyak anggota KPPS yang kurang paham dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

6. Rekapitulai dan Penetapan Hasil : kurangnya dukungan cuaca dan bencana banjir pasca pemungutan suara yang mengakibatkan ruangan untuk melakukan rekapitulasi dan scan form C-KWK tergenang air sehingga mengganggu proses penghitungan. Dan jumlah mesin scanner yang dibutuhkan saat proses scan form C-KWK kurang karena beberapa scanner rusak.

Jadi kesimpulannya di 2 Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes dalam 10 kegiatan tersebut terdapat kendala yang saling terkait dan saling mempengaruhi yaitu karena faktor alam (musibah bencana banjir dan longsor) dan mobilitas masyarakat Brebes yang banyak merantau di luar kota sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Brebes belum maksimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Untuk mengatasi kendala yang ada dalam penelitian ini maka solusi alternatif yang dapat dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis : sosialisasi yang sudah pernah dilakukan dimaksimalkan dan perbanyak sosialisasi di daerah rantau seperti di Kota Jakarta, Semarang dan kedepannya bisa ditambah sosialisasi ke kota yang banyak perantau dari masyarakat Brebes. Dan diharapkan pelaksanaan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tidak pada musim penghujan.

2. Pemutakhiran data dan daftar pemilih : Data diteliti ulang untuk dicocokkan dengan buku induk di kelurahan, memperbanyak sosialisasi mengenai DPS maupun DPT, PPS menghimbau masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-Elektronik, mengundang kembali sebagian pemilih yang telah dicoklit, pemilih tersebut dimasukkan dalam DPTb saat menggunakan hak pilihnya, setelah dilakukan kroscek di lapangan ada yang benar-benar orangnya sama dan ada pula orangnya berbeda, dilakukan kroscek langsung perbaikan.
3. Kampanye : Solusi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh badan *ad hoc* harus ada pembinaan supaya tidak melanggar norma-norma yang ada di pemilihan. Dan selalu mengingatkan dan menegaskan untuk menjaga netralitas, kode etik dan pakta integritasnya.
4. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara : Harus lebih teliti lagi dalam menyiapkan logistik dan KPU Kabupaten Brebes berharap agar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk kedepannya tidak di musim penghujan agar prosesnya berjalan dengan lancar tanpa hambatan, serta berkoordinasi dengan

pihak kepolisian dan TNI untuk pengawalan pengiriman logistik.

5. Pemungutan dan Penghitungan : Solusi untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu pendistribusian dilakukan dengan cara jalan kaki melewati lokasi longsor sehingga hasil perolehan suara di tingkat desa dapat tiba dengan tepat waktu. Dan mengenai penulisan form C1-KWK yang salah sudah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno penghitungan suara dan untuk dokumen yang salah masuk kotak diperbaiki saat rekapitulasi. Kemudian untuk pemilihan selanjutnya kami (KPU Kabupaten Brebes) akan lebih teliti dan bekerja maksimal dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes menyewa hotel untuk melakukan rekap dan scan form C-KWK, mengenai jumlah mesin scanner yang kurang KPU Kabupaten Brebes mengoptimalkan pelaksanaan scan form C-KWK dengan peralatan yang tersedia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2017, Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan juga berdasarkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 014/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2017 Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu :
 1. Tahap Persiapan : a. Perencanaan Program dan Anggaran,
 - b. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis, c. Pembentukan PPK,PPS,KPPS, d. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

2. Tahap Penyelenggaraan : a. Pencalonan, b. Kampanye, c. Laporan Dana Kampanye, d. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, e. Pemungutan dan Penghitungan, f. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil.

Dari 2 (dua) tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tersebut dapat dilihat bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 berjalan belum maksimal, karena dari 2 (dua) tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 masih terdapat kendala.

Dari kendala yang ada dalam 2 tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yang belum maksimal yaitu pada tahap persiapan dibuktikan masih rendahnya tingkat partisipasi dan Pemutakhiran data yang kurang teliti dan di tahap penyelenggaraan dibuktikan dengan masalah dalam kampanye, Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil pemungutan suara.

2) Kendala dan solusi dari Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Brebes Tahun 2017 di beberapa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

- a. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis : Tingkat partisipasi rendah disebabkan faktor alam (Bencana Banjir dan Longsor) dan mobilitas masyarakat Brebes yang banyak merantau ke luar daerah.
- b. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih : Terdapat data NIK dan NKK invalid, masyarakat kurang aktif dalam melihat apakah sudah masuk dalam DPS ataupun DPT, masih banyak data pemilih yang belum ber KPT-Elektrik, aturan/Juknis cokolit pemilih mengalami perubahan di tengah jalan (pengecekan pemilih ber KTP-EL dan tidak ber KTP-EL), pemilih yang sudah dimasukkan dalam portal mengalami perubahan (data yang sudah diajukan oleh PPS tidak muncul dalam DPS maupun DPT), banyak ditemukan pemilih dengan NIK, data awal yang diterima untuk cokolit banyak yang tidak sesuai dengan data riil.
- c. Kampanye : Adanya ketidak netralan anggota PPK
- d. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara : Terkendala faktor alam, adanya keterlambatan pendistribusian logistik (stiker untuk PPDP dan C6) dan kurang teliti dalam penghitungan jumlah logistik.
- e. Pemungutan dan Penghitungan : kendala cuaca, terjadi banjir dan longsor di beberapa desa (Desa Purbayasa Kecamatan

Tonjong, Desa Mandala, Watugambir Kecamatan Sirampog, Desa Jatirokeh dan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom). Terdapat kesalahan dalam penulisan form C1-KWK, berkas/dokumen yang salah masuk kotak dan anggota KPPS yang kurang paham dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

- f. Rekapitulai dan Penetapan Hasil : kurangnya dukungan cuaca dan bencana banjir pasca pemungutan suara yang mengakibatkan ruangan untuk melakukan rekapitulasi dan scan form C-KWK tergenang air sehingga mengganggu proses penghitungan. Dan jumlah mesin scanner yang dibutuhkan saat proses scan form C-KWK kurang karena beberapa scanner rusak.

Dilihat dari kendala-kendala tersebut, kinerja tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yang paling dominan adalah di tahapan penyelenggaraan. Sedangkan kendala yang paling dominan di tahap persiapan yaitu di kegiatan sosialisasi karena tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dan di kegiatan pemutakhiran data masih kurang teliti.

- solusi alternatif yang dapat dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis : sosialisasi yang sudah pernah dilakukan dimaksimalkan dan perbanyak sosialisasi di

daerah rantau. Dan diharapkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tidak pada musim penghujan.

- b. Pemutakhiran data dan daftar pemilih : Data diteliti ulang untuk dicocokkan dengan buku induk di kelurahan, memperbanyak sosialisasi mengenai DPS maupun DPT, PPS menghimbau masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-Elektronik, mengundang kembali sebagian pemilih yang telah dicoklit, pemilih tersebut dimasukkan dalam DPTb saat menggunakan hak pilihnya, dilakukan kroscek langsung perbaikan.
- c. Kampanye : Solusi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh badan *ad hoc* harus ada pembinaan supaya tidak melanggar norma-norma yang ada di kepemiluan. Dan selalu mengingatkan dan menegaskan untuk menjaga netralitas, kode etik dan pakta integritasnya.
- d. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara : Harus lebih teliti lagi dalam menyiapkan logistik serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk pengawalan pengiriman logistik.
- e. Pemungutan dan Penghitungan : Solusi untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu pendistribusian dilakukan dengan cara jalan kaki melewati lokasi longsor sehingga hasil perolehan suara di tingkat desa dapat tiba dengan tepat waktu. Dan mengenai penulisan form C1-KWK yang salah sudah dilakukan perbaikan

pada saat rapat pleno penghitungan suara dan untuk dokumen yang salah masuk kotak diperbaiki saat rekapitulasi. Kemudian untuk pemilihan selanjutnya kami (KPU Kabupaten Brebes) akan lebih teliti dan bekerja maksimal dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

- f. Rekapitulai dan Penetapan Hasil : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes menyewa hotel untuk melakukan rekap dan scan form C-KWK, mengenai jumlah mesin scanner yang kurang KPU Kabupaten Brebes mengoptimalkan pelaksanaan scan form C-KWK dengan peralatan yang tersedia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi (saran) sebagai berikut :

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes kedepannya dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang lebih menarik dan memperluas kegiatan sosialisasi agar partisipasi masyarakat meningkat.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes seyogyanya selalu melibatkan masyarakat sebagai control public terutama dalam penyusunan daftar pemilih yang memang dianggap sebagai salah satu output terpenting dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes.

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes sebaiknya selalu berkomunikasi dan ber koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan stakeholder terutama dalam pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Anwar, A.P. 2002. *Psikologi Pelayanan*. Bandung : Alfabeta Azheri.
- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta : UGM Press.
- Ahmad, Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Malang : Penerbit Averroes Press
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bratakusumah, Dedy S, dan Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Utama.
- Tim Penyusun : Sub Bag Program dan Data Sekretaris KPU Kabupaten Brebes. 2017. *Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017*. Brebes : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
- Duverger, Maurice. 1998, *Sosiologi Politik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Faisal Sanifah, 1990. *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Aplikasinya*. Malang: YA3
- Friedrich Ebert Stiftung. Nuridin, Rachamad K. Dwi Susilo, Tri Sulistyaningsih, 2006, *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*, Malang : Penerbit Pustaka Pelajar-FISIP UMM
- Fathurrohman, Deden & Sobari, Wawan. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UMM Press
- Hikam, M.A.S. 2007, *“Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik” Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : PPW LIPI & Sinar Grafika.
- Malayu S.P Hasibuan 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Prihatmoko, Joko. 2005. *Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

- Ramlan Surbakti dkk, 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk*
- Salossa, Daniel. 2005, *Pilkada Langsung*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo
- Sarundajang, 2012, *Pilkada Langsung Problematika dan Prospek*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Tim Edukasi, 2005, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Pondok Edukasi,
- Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika,
- Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu*, Malang : In-Trans Publishing
- Wahidin, 2008, *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prof. Dr. Wibowo, S.E., Phil, 2007, *Manajemen Kinerja*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Situs Internet

- <http://jateng.tribunnews.com/2017/02/23/ada-tujuh-kasus-pelanggaran-pilkada-yang-ditangani-panwaslu-brebes-baru-satu-kasus-yang-terbukti?page=2>
- <https://radartegal.com/berita-lokal/pimen-kiye-golput-saat-coblosan-pilkada-brebes.13872.html> senin 20 februari 2017
- <http://kpu-brebeskab.go.id/>

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6788/Bab%202.pdf>

<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/03/pengertian-kinerja-menurut-para-ahli.html>

<http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-kinerja.html>

<https://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi-kinerja.html>

1. Judul : KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BREBES DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2017

2. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan (Jabatan) :

Alamat :

3. Petunjuk Wawancara :

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, Peneliti memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan informasi mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan di pandu oleh peneliti. Informasi yang Bapak / Ibu berikan akan digunakan untuk kepentingan akademik. Terimakasih atas kesediaan Bapak / Ibu yang telah bersedia menjawab pertanyaan wawancara yang telah disampaikan oleh peneliti. Mengingat keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, dimohon dengan sangat agar Bapak / Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap, jujur dan benar.

INTERVIEW GUIDE :

1. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

A. PERSIAPAN

- a. Perencanaan Program dan Anggaran :

- 3) Apa saja tahap-tahap dalam proses perencanaan program dan anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?
- 4) Bagaimana proses perencanaan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes ?

- b. Sosialisasi / Penyuluhan / Bimbingan Teknis

1. Bagaimana proses kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam rangka persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017?
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah kegiatan sosialisasi dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sudah maksimal dilakukan ?
3. Siapa saja sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana dampak kegiatan sosialisasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?

5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 :

- a. Apakah partisipasi dari masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sudah maksimal/belum ?
- b. Jika belum maksimal, apa penyebab dari partisipasi masyarakat yang kurang/rendah ?
- c. Apa solusi yang tepat agar partisipasi masyarakat bisa maksimal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes untuk tahun/periode berikutnya ?

6. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimanakah ke ikut sertaan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?

c. Pembentukan PPK, PPS, KPPS

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimanakah proses pembentukan anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP se-Kabupaten Brebes ?
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah proses pembentukan dan pelantikan anggota PPK, PPS, KPPS dan anggota PPDP se-Kabupaten Brebes sudah terlaksana dengan baik ?

d. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1. Menurut Bapa/Ibu/Saudara, Apa saja tahapan penyusunan DPS, DPT dan proses pencatatan DPTb ?
2. Menurut Bapa/Ibu/Saudara, Persoalan apa saja yang muncul dalam proses tahapan penyusunan DPS, DPT dan DPTb ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?
3. Menurut Bapa/Ibu/Saudara, Apa saja langkah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam proses pelayanan hak pilih warga Kabupaten Brebes yang belum terdaftar dalam DPT dan belum memiliki E-KTP ?

B. PENYELENGGARAAN

a. Pencalonan

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Persoalan apa saja yang muncul dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

b. Kampanye

1. Apa saja tahapan jadwal kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan apakah jadwal kampanye sudah terlaksana dengan baik ?
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Persoalan apa saja yang muncul dalam tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim penyelenggara pemilihan dalam tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? jika ada, apakah ada sanksi yang diberikan? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut agar tidak terulang kembali ?

c. Laporan Dana Kampanye

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Persoalan apa saja yang muncul dalam tahapan laporan dana kampanye pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

d. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Bagaimanakah persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?
2. Bagaimanakah proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Persoalan apa saja yang muncul dalam proses tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

e. Pemungutan dan Penghitungan

1. Apa saja persiapan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 ?
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Persoalan apa saja yang muncul dalam proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada

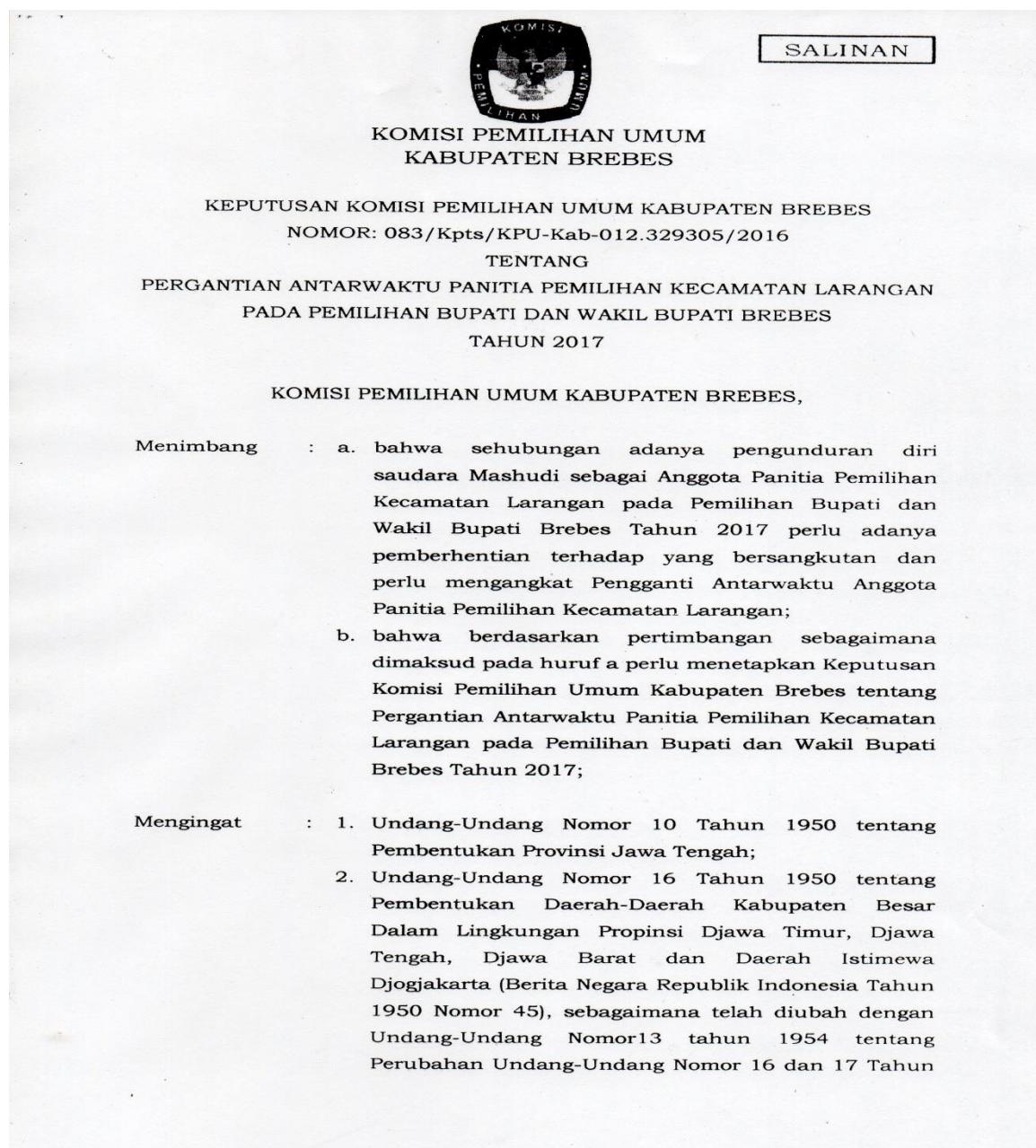
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

f. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Persoalan apa saja yang muncul dalam proses tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ?
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Persoalan apa saja yang muncul dalam proses pelaksanaan penetapan hasil calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ? dan bagaimana solusi dari persoalan tersebut ?

LAMPIRAN

1. SK Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 083/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 Tentang Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Larangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.



1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Besar dan Kabupaten-Kabupaten Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 010/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 061/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 010/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 012/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 028/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;
4. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Larangan Nomor 028/Bawaslu-Prov.JT-06.09/PM.03/X/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 perihal Rekomendasi;
5. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes Nomor 177/Bawaslu-Prov.JT-06/PM.03/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 perihal Rekomendasi;
6. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Larangan atas Nama saudara Mashudi, S.Pd., tanggal 9 November 2016;
7. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 9 November 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LARANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2017.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat saudara Mashudi dari jabatannya selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Larangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;
- KEDUA : Mengangkat saudara Tri Kristanto Sedy Hartana menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Larangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, dengan masa kerja terhitung sejak ditetapkan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Brebes;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 9 November 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Ka Subbag Hukum,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

NOMOR: 083/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016

TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN LARANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2017

PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LARANGAN

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2017

PPK	Nama	NIK	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan
Semula	Mashudi	3329152712780007	Brebes, 27 Desember 1978	Guru
Pengganti Antarwaktu	Tri Kristanto Sedya Hartana	3329152512680003	Surakarta, 25 Desember 1968	Karyawan BUMN

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Ka Subbag Hukum,



IMAN SYAH BUDIONO

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 9 November 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

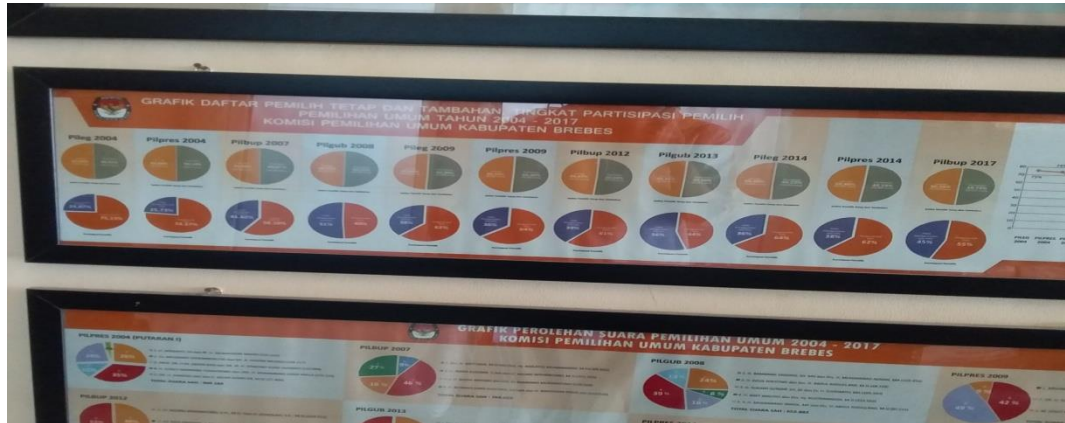
MUAMAR RIZA PAHLEVI

2. Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 Kabupaten Brebes

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2017
KABUPATEN BREBES**

NO	KECAMATAN	TOTAL TPS	DATA PEMILIH		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	SALEM	119	24,474	24,310	48,784
2	BANTARKAWUNG	181	38,251	37,690	75,941
3	BUMIAYU	192	44,171	42,755	86,926
4	PAGUYANGAN	179	41,909	40,765	82,674
5	SIRAMPOG	133	26,586	25,745	52,331
6	TONJONG	123	29,392	28,669	58,061
7	LARANGAN	223	60,053	60,373	120,426
8	KETANGGUNGAN	215	56,593	55,905	112,498
9	KERSANA	98	24,745	24,800	49,545
10	BANJARHARJO	210	50,474	50,945	101,419
11	LOSARI	207	55,421	55,747	111,168
12	TANJUNG	153	39,264	39,214	78,478
13	BULAKAMBA	231	70,930	68,512	139,442
14	WANASARI	242	62,864	61,368	124,232
15	SONGGOM	137	34,363	34,909	69,272
16	JATIBARANG	145	35,831	35,410	71,241
17	BREBES	213	70,432	69,690	140,122
TOTAL		3,001	765,753	756,807	1,522,560

3. Dokumentasi Tingkat Partisipasi Pemilih dari Beberapa Periode



4. Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Melalui Konser Musik



Sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih dikalangan pemilih pemula maka, KPU Kabupaten Brebes mengadakan Konser Musik di Stadion Karang Birahi pada hari Sabtu 14 Juni 2016. Ketua KPU

Kabupaten Brebes Bapak Muamar Riza Pahlevi, S.IP menyerukan untuk kalangan muda menggunakan hak pilihnya.

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Segmen Perempuan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017



Dilaksanakan di Brebes, 23 Juni 2016. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan presentase jumlah pemilih dalam Pemilu adalah emansipasi perempuan. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Brebes mengadakan Sosialisasi Pendidikan pada Segmen Perempuan di Balai Desa Tegallagah Bulakamba Brebes dengan dihadiri puluhan Ibu-ibu PKK. Ketua KPU Kabupaten Brebes Muamar Riza Pahlevi, S.IP dalam sambutannya, beliau mengingatkan kembali tentang informasi berkaitan dengan pemilu dengan harapan peran serta ibu-ibu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 jumlah pemilih dari perempuan lebih banyak dari jumlah pemilih dari kalangan kaum laki-laki. Beliau juga menghimbau agar nantinya ibu-ibu yang sudah mempunyai anak usia 17 tahun atau sudah menikah agar menggunakan hak pilihnya

dalam pemilu dan mengingatkan petugas verifikasi jika belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Segmen Disabilitas



Brebes, 21 Juni 2016. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017, dalam hal ini ditujukan kepada kaum disabilitas yang memiliki usia lanjut namun masih memiliki hak pilih dalam pemilu. Acara tersebut dilaksanakan di Balai Pelayanan Sosial Asuhuan Anak Suka Mulya Tegal Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia Purbo Yuwono Brebes yang terletak di jalan raya Klampok no. 69.

Gowes KPU



Brebes, 25 September 2016. Ribuan warga masyarakat Brebes antusias mengikuti kegiatan Sepeda Santai (Gowes) bersama KPU Kabupaten Brebes. Hal ini bertujuan untuk menarik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

5. Foto Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Muamar Riza Pahlevi, S,IP selaku Ketua KPU Kabupaten Brebes, Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes





2. Wawancara dengan Bapak Akhmad Nuryanto, S.IP Selaku Ka. Sub. Bag.
Teknis Pemilu dan Hupmas



3. Wawancara dengan Bapak Iman Syah Budiono, SH. Selaku Ka. Sub. Bag.

Hukum



4. Dokumentasi dengan Ibu Shinta selaku pegawai Bawaslu Kabupaten

Brebes



5. Wawancara dengan Bapak Teguh Turmudi selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes



6. Wawancara dengan Bapak Abdullah Syafaat selaku Tim sukses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dari DPD Partai PKS Kabupaten Brebes





YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
ILMU KOMUNIKASI

(SK. Nomor : 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014)
Jl. Halmahera KM. 1 Telp. (0283) 323290 Tegal

Nomor : 463/K/A-4//FISIP-UPS/XII/2019 12 Desember 2019
Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Ijin Research**

Kepada : Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
Kabupaten Brebes
di-
Brebes

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak berkenan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Rahmatun Nazilah**
NPM : 2115500043
Tempat, Tgl. Lahir : Brebes, 25 Oktober 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga Rt. 03/ 02 Kaligangsa
Wetan Brebes

Untuk menjalankan research di Kantor yang Bapak/Ibu pimpin.

Perlu kiranya kami beritahukan bahwa research ini dijalankan oleh yang bersangkutan dalam rangka pembuatan skripsi pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Adapun Judul Skripsi : **"Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017"**.

Atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak disampaikan terima kasih.


Dr. Nurridin, SH.,MH.
NIPY 9351091960



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
ILMU KOMUNIKASI
(SK. Nomor : 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014)
Jl. Halmahera KM. 1 Telp. (0283) 323290 Tegal

Nomor : 463/K/A-4/FISIP-UPS/XII/2019
Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Ijin Research**

12 Desember 2019

Kepada : Yth. 1. Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
2. Ketua DPD Partai Golkar
3. Ketua DPD Partai Gerindra
Kabupaten Brebes
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak berkenan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

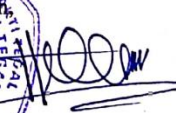
Nama : **Rahmatun Nazilah**
NPM : 2115500043
Tempat, Tgl. Lahir : Brebes, 25 Oktober 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga Rt. 03/ 02 Kaligangsa
Wetan Brebes

Untuk menjalankan research di Kantor yang Bapak/Ibu pimpin.

Perlu kiranya kami beritahukan bahwa research ini dijalankan oleh yang bersangkutan dalam rangka pembuatan skripsi pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Adapun Judul Skripsi : **"Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017"**.

Atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak disampaikan terima kasih.


Dekan
FISIP
Dr. Nuridin, SH., MH.
NIPY 9351091960



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Sekretariat : Jl. Halmahera Km. 1 Telp. (0283) 323290

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 819/K/E/FISIP-UPS/VIII/2019 Perihal penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi :

1. Nama : **Drs. Sana Prabowo, M.Si**
NIP : 195612251983121001
2. Nama : **Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si**
NIPY : 16952681974

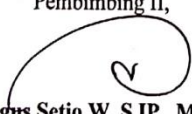
Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah dibimbing skripsinya.

Nama : **Rahmatun Nazilah**
NPM : 2115500043
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

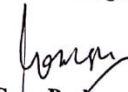
No	Tahapan	Tanggal	Keterangan
1.	Penunjukkan Dosen Pembimbing	12 Agustus 2019	
2.	Proposal	13 Agt – 16 Sept 2019	
3.	Rencana Penelitian	17 Sept – 17 Okt 2019	
4.	Pengumpulan Data	20 Okt – 20 Nov 2019	
5.	Analisis Data	21 Nov – 23 Des 2019	
6.	Penyusunan Laporan / Penulisan Skripsi	24 Des 2019 - 13 Jan 2020	

Demikian Berita Acara Bimbingan Skripsi ini dibuat dan digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pembimbing II,


Agus Setio W, S.IP., M.Si
NIPY. 16952681974

Pembimbing I,


Drs. Sana Prabowo, M.Si
NIP. 195612251983121001




Dr. Nuridin, SH., MH
NIPY. 9351091960



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Sekretariat : Jl. Halmahera Km. I Telp. (0283) 323290

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, **Kamis tanggal 23 Januari 2020** Pukul 08.30 wib sampai dengan selesai berdasar Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal tentang Susunan Tim Penguji Ujian Skripsi atau Pendadaran bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal tingkat Sarjana :

1. Nama : **Drs. Sana Prabowo, M.Si**
NIP : 196305271988032001
2. Nama : **Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si**
NIPY : 16952681974
3. Nama : **Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si**
NIPY : 14251921973


Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya.

Nama : **Rahmatun Nazilah**
NPM : 2115500043
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.


	Angka	Equivalen
Nilai	78,9	B
Keterangan		

Demikian Berita Acara Ujian Skripsi ini dibuat untuk diketahui dan digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

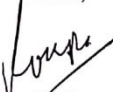
a/n Anggota,



Unggul Sugi H, S.IP., M.Si
NIPY. 14251921973

Sekretaris,


Agus Setio W, S.IP., M.Si
NIPY. 16952681974

Ketua,


Drs. Sana Prabowo, M.Si
NIP. 196305271988032001


Dekan
Dr. Nuridin, SH., MH
NIPY. 9381091960